

2019



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
2017 - 2022
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,



Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen **Perubahan Rencana Strategis (Perubahan RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022** dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum, Renstra ini dipergunakan sebagai panduan dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode tahun 2017-2022 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan keluaran yang maksimal.

Penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian dengan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Banten yang telah dirubah dan telah ditetapkan, seiring juga dengan adanya perubahan nomenklatur pada Balai, UPT menjadi UPTD dan Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta penyesuaian penambahan program, penyesuaian tolok ukur, penambahan dan penyesuaian Target Indikator Kinerja Sasaran Program Kegiatan. Untuk itu disusunlah **Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017-2022**, dengan harapan dapat mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangannya dan dapat dijadikan sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam rangka pencapaian tujuan serta untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas/instansi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan perubahan dinamika lingkungan sehingga Renstra yang disempurnakan dapat bertujuan positif kedepan dan dapat diandalkan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional serta menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas OPD Provinsi dan Kab /Kota. Dengan disusunnya PerubahanRenstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017-2022 ini, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan agar skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih konkrit.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan penyusunan Dokumen Perubahan Renstra ini, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada periode mendatang serta dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

Wassalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Serang, Nopember 2019

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Banten,**



Ir. H.M. Husni Hasan, CES

Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19621222 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

1. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 9

1.3 Maksud dan Tujuan..... 12

1.4 Sistematika Penulisan..... 13

2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 17

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 17

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 90

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 98

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah 109

3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .. 112

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah..... 112

3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih..... 126

3.3 Telahan Renstra Kementerian LHK..... 133

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis..... 137

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 162

4. TUJUAN DAN SASARAN..... 165

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD..... 165

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi 172

5.2 Arah Kebijakan 173

6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 178

6.1 Program dan Kegiatan..... 178

6.2 Indikator Kinerja..... 190

6.3 Kelompok Sasaran 190

6.4 Pendanaan Indikatif 190

7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 217

8. PENUTUP..... 223

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017	90
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017	91
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten.....	92
Tabel 2.4	Jenis Aset dan Nilai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun	92
Tabel 2.5	Luas Kawasan Hutan di Propinsi Banten	94
Tabel 2.6	Rencana Kawasan Lindung Propinsi Banten Tahun 2010-2030	96
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten.....	100
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten.....	105
Tabel 3.1	Komposisi Jumlah Penyuluh Kehutanan ASN di Wilayah Provinsi Banten.....	114
Tabel 3.2	Luas Kawasan hutan di Provinsi Banten	115
Tabel 3.3	Luas Lahan Kritis di Provinsi Banten	115
Tabel 3.4	Data Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil Hutan Non Kayu di Provinsi Banten	116
Tabel 3.5	Capaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Air	116
Tabel 3.6	Capaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Udara	117
Tabel 3.7	Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Analisis Faktor Internal (Strength-Weakness)	119
Tabel 3.8	Telaah Isi dan Analisi Kebutuhan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan.....	131
Tabel 3.9	Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi dan Misi KLHK dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan OPD	135
Tabel 3.10	Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan RTRW dan KLHS dan Analisis Kekuatan dan Kelamahan OPD	155
Tabel 3.11	Penentuan Isu-Isu Strategis	162
Tabel 4.1	Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang terkait tugas dan fungsi DLHK Provisni Banten.....	166
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022	168
Tabel 4.3	Aspek Penilaian Indikator Capaian SAKIP	170
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas LIngkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022	175
Tabel 6.1	Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022	180

Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022	191
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022	218
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022	219

	DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten.....	25
Gambar 2.2	Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten.....	91
Gambar 2.3	Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten	93
Gambar 2.4	Gambaran Luas Kawasan Hutan di Propinsi Banten ...	95
Gambar 2.5	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya	109
Gambar 3.1	Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Air tahun 2009-2016 di Provinsi Banten	117
Gambar 3.2	Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien tahun 2009-2016 di Provinsi Banten.....	117

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Sehingga baik buruknya kualitas lingkungan akan ditentukan oleh prilaku masyarakat disekitarnya juga. Maka dari itu, lingkungan yang sehat akan berdampak pada kesehatan masyarakat disekitarnya.

Selama ini terdapat tiga indikator yang menjadi dasar penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia yang mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup versi baru (IKLH baru) merupakan istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

Lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara otomatis. Artinya kalau salah satu komponen rusak maka akan mengganggu komponen yang lain karena dalam suatu lingkungan hidup berlaku sistem yang disebut dengan rantai makanan. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup manusia dihadapkan pada rangkaian permasalahan yang saling berkaitan. Rangkaian pokok permasalahan dalam lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemanfaatan daya alam yang semakin terbatas.
2. Grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18 yang meningkat tajam.
3. Pertumbuhan ekonomi tidak merata.

4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan di dunia.

Masalah lingkungan hidup dan kelestarian hutan ini telah lama menjadi bahasan masyarakat internasional, bahkan masalah ini akan menjadi isu berkepanjangan hingga akhir zaman. Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai suatu kesatuan ekosistem lahan yang berisi sumber daya alam hayati, hutan memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Setidaknya ada tiga alasan yang membuat kita harus melestarikan hutan: Pertama, setiap pohon besar mampu memproduksi 4.580 kilogram oksigen per tahun. Sedangkan seseorang membutuhkan oksigen 2,9 kg/hari yang berarti sekitar 1.058,5 kg/tahun. Jadi jika rumah dihuni oleh 4 orang dibutuhkan sekitar 4.234 kg oksigen per tahunnya. Ini bisa dipraktekan dengan menanam 1 pohon besar dipekarangan rumah kalian tentunya kebutuhan oksigen tercukupi dan udara di rumah terasa segar sepanjang tahun. Kedua, setiap pohon mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata 5 unit AC (Air Conditioner) yang dioperasikan selama 20 jam/hari. Ketiga, setiap hektar hutan dapat menetralkan karbondioksida (CO₂) yang diakibatkan oleh 20 kendaraan bermotor. Setiap hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat 1000 kg debu per tahun yang diakibatkan oleh polusi udara (debu, asap, aerosol, dll) dan mengolahnya menjadi humus.

Namun pada kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi rusaknya hutan di Indonesia, seperti pengusahaan hutan yang dilakukan secara tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Kemudian juga tidak adanya kesadaran untuk menanam kembali hutan yang sudah diusahakan/dikelola, belum lagi adanya inefisiensi yang sering kali terjadi mulai dari penebangan sampai kepada pemakaiannya. Selain itu, sebagian besar jenis kayu yang tumbuh di hutan adalah jenis kayu yang sangat laku di pasaran. Hal ini akan meningkatkan tingkat eksploitasi jenis kayu tersebut

di hutan. Semakin tinggi permintaan akan kayu, maka tingkat eksploitasi akan semakin besar, sehingga peluang terjadinya kerusakan hutan akan semakin besar pula.

Upaya pencegahan kerusakan hutan harus lebih digencarkan untuk menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan, khususnya hutan di kawasan Provinsi Banten. Upaya pelestarian hutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di areal sekitar hutan. Di satu sisi masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan, disisi lain manfaat ekologi dan sosial juga dapat dioptimalkan. Sehingga hutan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga dapat dimanfaatkan hingga generasi yang akan datang. Hal ini seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah dideklarasikan organisasi-organisasi ditingkat internasional.

Secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. Dalam hal ini, tujuan pembangunan tidak hanya untuk saat ini dan hanya bagi golongan tertentu tapi juga memperhatikan keberlangsungan antar generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk hidup lain. Adapun keadilan berarti pencapaian pembangunan di satu sisi tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada beberapa dekade terakhir, telah menjadi mainstream pembangunan, dimana banyak negara di dunia telah mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan, baik pada level lokal (daerah), nasional hingga pada level internasional. Keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi elemen inti (*core element*) bagi banyak kebijakan negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga strategis lainnya (Ekins dan Simon 2001).

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 oleh *World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)* salah satu komisi United Nation (PBB), melalui buku *Our*

Common Future. WCED (1987) mendefinisikan *sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dalam arti harfiahnya dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam tataran implementasi di Indonesia, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU RI No.32 tahun 2009). Lebih jauh Munasinghe (1993) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yakni; ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social equity*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological sustain*). Menurut Serageldin (1996) suatu kegiatan pembangunan (termasuk pengelolaan sumber daya alam dan berbagai dimensinya) dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi, ekologi, dan sosial bersifat berkelanjutan.

Meskipun banyak variasi definisi pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, namun pada intinya mencakup dan bertumpuh pada tiga aspek/pilar utama yakni; ekonomi, sosial, dan ekologi (Munasinghe 1993). Dengan kata lain, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan ekonomi (*profit*), keberlanjutan sosial (*equity*), keberlanjutan ekologi (*sustain*). Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus diperhatikan secara berimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumberdaya alam dan lingkungan merupakan basis untuk

kegiatan ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial budaya maupun kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sistem sosial yang tidak stabil akan cenderung menimbulkan tindakan yang merusak kelestarian sumberdaya alam dan merusak kesehatan lingkungan, sementara ancaman kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (misalnya kelangkaan tanah dan air) dapat mendorong terjadinya kekacauan dan penyakit sosial (Suryana, 2005).

Secara spesifik *Cincin-Sain* dan *Knecht* (1998), menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga aspek utama, yaitu: (1) pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, yaitu pembangunan yang menekankan manusia sebagai pusat perhatian; (2) pembangunan yang memperhatikan lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya, perlindungan proses ekologi, sistem pendukung kehidupan maupun keanekaragaman hayati; (3) pembangunan sosial secara adil dalam distribusi keuntungan pembangunan yang meliputi keadilan antar masyarakat, antar generasi, antar negara.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan untuk lingkungan hidup dan kehutanan, menjadi sangat penting, dengan mengedepankan pada tiga pilar utama tersebut secara bersama-sama. Agar keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan dapat terjaga dengan baik, khususnya di wilayah Provinsi Banten, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun daerah untuk mengarahkan pelayanan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi OPD dan merupakan dokumen perencanaan daerah berorientasi 5 (lima) tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD dan acuan dalam penilaian kinerja OPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Renstra OPD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan apa yang terdapat dalam dokumen perencanaan tersebut. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP OPD

Renstra OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Banten khususnya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen Renstra ini bersifat jangka menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 yang memuat visi, misi pemerintah melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Banten untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Gubernur sebagai Kepala Daerah terpilih untuk periode 2017-2022.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang diterjemahkan kedalam program-program pembangunan, kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Penyusunan Renstra juga didasarkan atas pertimbangan yuridis yang memayungi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara khusus telah didukung oleh adanya peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk perundang-undangan, yakni ; Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana kedua undang-undang tersebut pada intinya menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan **Perubahan Renstra DLHK** Provinsi Banten tahun 2017-2022, dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif dan *bottom-up/top-down* serta kerangka pendanaan. Proses penyusunannya meliputi 4 tahapan sebagai berikut;

1. Tahap Persiapan Penyusunan perubahan Renstra; merupakan tahap awal dalam penyusunan perubahan Renstra,
2. Tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; merupakan tahapan penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, yang terdiri atas;
 - Perumusan rancangan perubahan Renstra OPD;
 - Penyajian rancangan perubahan Renstra OPD; menyampaikan hasil rancangan perubahan Renstra yang telah disusun dalam bentuk dokumen dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah; serta

- Pelaksanaan forum Renstra OPD dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan OPD dan para pemangku kepentingan pelayanan OPD yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan OPD;
3. Tahap penyusunan rancangan akhir perubahan Renstra
- Merupakan tahapan penyusunan rancangan final/akhir dari perubahan Renstra yang disusun, terdiri atas;
- Penyusunan rancangan akhir perubahan Renstra.
merupakan penyempurnaan rancangan perubahan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah diperubahan;
 - Penyempurnaan rancangan perubahan Renstra.
bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD yang telah diperubahan;
4. Tahap Penetapan Renstra.
- Merupakan tahapan akhir dari penyusunan Perubahan Renstra, yang terdiri atas :
- Rancangan akhir perubahan Renstra OPD disampaikan oleh Kepala OPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah;
 - Rancangan akhir perubahan Renstra OPD selanjutnya diverifikasi akhir oleh BAPPEDA untuk menjamin/ memastikan kesesuaian Rancangan Akhir perubahan Renstra dengan RPJMD yang telah diperubahan dan yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya;
 - Pengesahan rancangan akhir hasil perubahan Renstra OPD menjadi Renstra OPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

Penyusunan perubahan Renstra OPD haruslah mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah diperubahan dan telah ditetapkan, dimana memuat; a) visi, misi, dan program kepala daerah; b) arah kebijakan keuangan daerah; c) strategi pembangunan daerah; d) kebijakan umum; e) program OPD; f) program lintas OPD; g) program kewilayahan; h) rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan i) rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Serta terkait pula dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD merupakan keterkaitan tugas dan fungsi OPD sebagai organisasi/lembaga pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan visi dan misinya. Kewenangan tugas dan fungsi OPD tersebut dituangkan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Keterkaitan tersebut juga merupakan keterkaitan struktural ditingkat daerah. Sedangkan keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah keterkaitan sektoral yakni kajian lingkungan hidup dan kehutanan serta keterkaitan struktural antara pemerintah pusat dengan daerah/Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2017-2022, meliputi; Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, yakni;

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
24. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

- Banten (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten 2017-2022;
 32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian Renstra OPD dengan RPJMD yang telah dirubah dan telah ditetapkan, agar renstra ini dapat mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangannya dan dapat dijadikan sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam rangka pencapaian tujuan serta untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas/instansi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Tujuan disusunnya perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten 2017-2022 adalah:

- a. Memberikan arahan dan pedoman kepada aparatur internal DLHK dan *stakeholders* terkait, dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten.
- b. Membangun sistem kerja DLKH Provinsi Banten yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- c. Memberikan dorongan moral bagi aparatur DLHK Provinsi Banten dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja dinas.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi utama dalam perubahan Renstra OPD adalah penyesuaian isi Renstra OPD dengan RPJMD yang telah diperubahan, terutama penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja. Sistematika penyusunan perubahan Renstra DLHK Provinsi Banten tahun 2017-2022, disajikan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

- Latar Belakang; memuat penjelasan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan perubahan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
- Landasan Hukum; memuat dasar hukum yang menjadi acuan/referensi, meliputi; undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra OPD
- Sistematika Penulisan; memuat penjelasan ringkas tentang pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini berisikan uraian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD;

- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD; memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, dan mekanisme).

- Sumber Daya OPD; memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- Kinerja Pelayanan OPD; memuat tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD; mengemukakan tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dari kondisi pelayanan OPD sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi eksternal dari rencana strategi yang disusun.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang identifikasi isu-isu strategis. Telaah tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Banten. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; mengemukakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam pelayanan OPD berdasarkan tugas dan fungsinya, serta analisis kebutuhan dan isu-isu strategisnya.
- Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; mengemukakan tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupate/Kota; mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra OPD kabupaten/kota.

- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- Penentuan Isu-isu Strategis; menguraikan kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: Gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian; sasaran jangka menengah dari Renstra OPD kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD serta dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisikan tentang Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

- Visi dan Misi OPD; dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD;
- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD; dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD;

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

- Strategi dan Kebijakan OPD; dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang (2017-2022);

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisikan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

BAB VIII. Penutup

Bab ini berisikan kalimat Penutup sebagai bagian akhir dari dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2017-2022.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLHK

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun uraian secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagaimana peraturan Gubernur diatas adalah sebagai berikut :

(1). Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

(3) Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;

- a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- c. Pengelolaan Kehati provinsi;
- d. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
- j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

- 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
- k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
 - l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Pemungutan hasil hutan;
 - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
 - o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
 - p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
 - q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 - r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
 - s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
 - t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
 - u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES.
 - v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - 1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

- 2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profesiensi dan mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan. UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;
- e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparatatur dan masyarakat;
- g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;
- j. Fasilitasi pengembangan tanaman Langka /endemik/langka/varietas/species yang hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara invitro;
- k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber benih;
- l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan; dan
- m. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
- c. pelaksanaan perlindungan;
- d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
- f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan
- g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan

- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

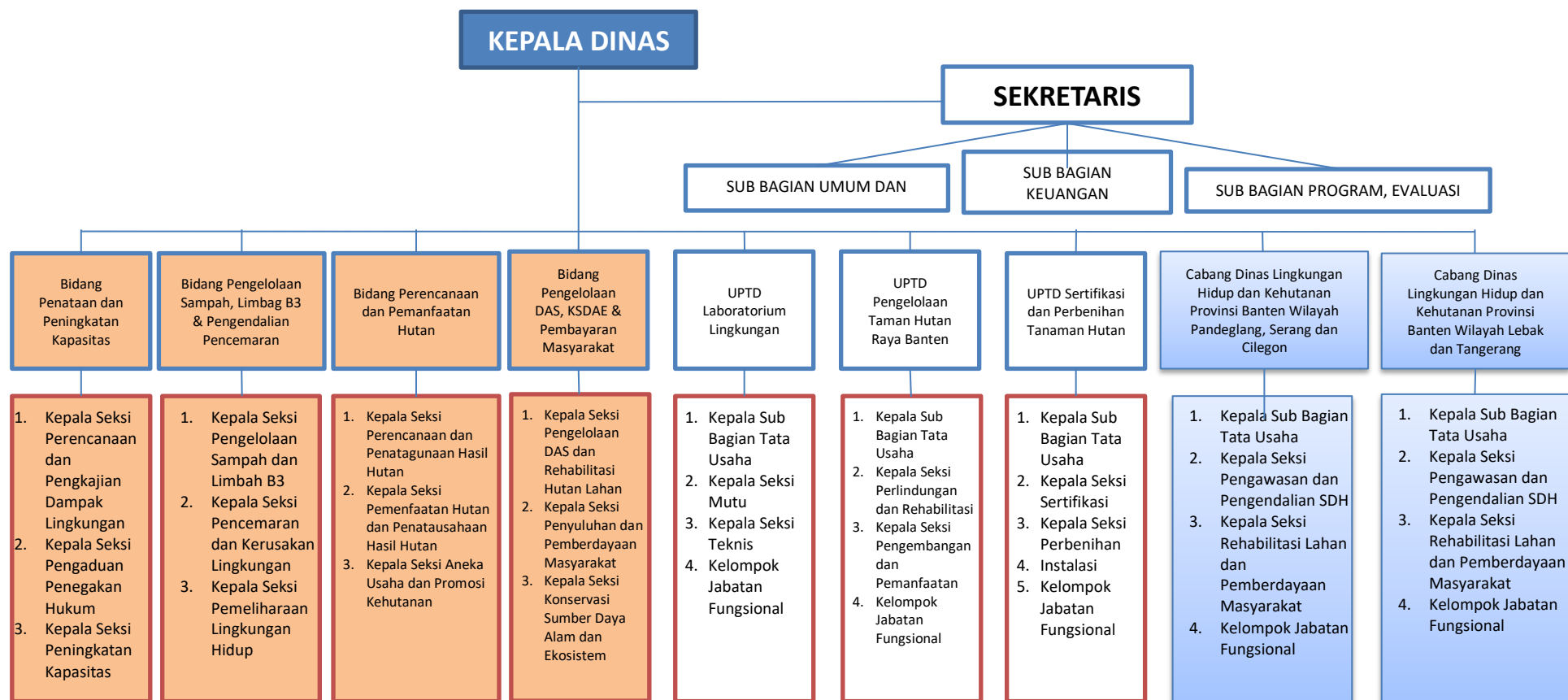
Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya pekerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
- b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

(4) Struktur Organisasi OPD

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Cabang Dinas LHK Provinsi serta jabatan fungsional sebagai penyuluh kehutanan. Gambaran Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris, membawahi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahi;
 - Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi;
 - Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
 - Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 - Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi;
 - Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
 - Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas 3 unit yakni; UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
8. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; terdiri atas 2 Cabang Dinas LHK yakni; Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang;
9. Jabatan Fungsional.

(5) Uraian Tugas

Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Adminsitrator dan Pengawas pada Dinas Daerah dan Peraturan Gubenur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengoordinasikan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan
6. Merumuskan kebijakan operasional pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan
7. Mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan

8. Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan
9. Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan
10. Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan
11. Menetapkan surat rekomendasi teknis perizinan dibidang lingkungan hidup yaitu izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) skala Provinsi;
12. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota
13. Mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah Provinsi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

B. Sekretaris

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tata laksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan
7. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Melaksanakan fungsi kehumasan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
7. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
2. Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

- pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 6. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 7. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananyang bersumber dari APBD maupun APBN;
 8. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
 11. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
6. Mengoordinasikan fasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup;
7. Merencanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota yang menerbitkan izin lingkungan bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL UPL dalam wilayah provinsi;
8. Merencanakan bahan pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan/pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

9. Merencanakan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
10. Merencanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup;
11. Menyusun bahan dan memfasilitasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
12. Merencanakan bahan penilaian dan pemberian penghargaan;
13. Merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang penataan dan peningkatan kapasitas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan

- prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan;
 6. Menyusun bahan kebijakan RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 7. Melaksanakan pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melaksanakan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung daya tampung.
 8. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 9. Melaksanakan kajian sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 10. Melaksanakan kajian Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 11. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 12. Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
 13. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemantauan dan evaluasi KLHS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 15. Memberikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, daUKL/UPL);
 16. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar

dan konsultan) dan menyusun surat rekomendasi teknis perizinan untuk proses izin lingkungan;

17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan kebijakan teknis penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi Sanksi Administrasi, Sengketa/Perdata dan Pidana;
6. Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Melaksanakan program penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

8. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat dan daerah dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap daerah dan kegiatan/usaha yang diduga/sudah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas

1. Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas berdasarkan rencana operasional Bidang penataan dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
9. Melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
10. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
13. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
14. Melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- 15 Menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 16 Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, dan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 17 Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 18 Melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 19 Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan termasuk menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH ;
- 20 Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH dan mengembangkan jenis penghargaan LH;
- 21 Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22 Melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.
- 23 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 24 Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 25 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah, limbah B3, pencemaran lingkungan, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan di Provinsi;
6. Merencanakan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
8. Merencanakan dan mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
9. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan Sampah;
10. Merencanakan dan mengoordinasikan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
11. Merencanakan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes)

- menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
12. Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 13. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3 dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
 14. Merencanakan dan mengoordinasikan pemantauan sumber pencemar institusi, non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 15. Merencanakan dan mengoordinasikan penentuan baku mutu lingkungan sumber pencemar;
 16. Merencanakan dan mengoordinasikan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
 17. Merencanakan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 18. Merencanakan dan mengoordinasikan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 19. Merencanakan dan mengoordinasikan Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 20. Merencanakan dan mengoordinasikan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 21. Merencanakan dan mengoordinasikan pencadangan sumber daya alam Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 22. Merencanakan dan mengoordinasikan inventarisasi GRK, penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pelaksanaan konservasi,
 23. Merencanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan, pemantauan dan pengawasan, konservasi keanekaragaman hayati;

24. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
25. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
26. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
27. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ; dan
28. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;

6. Menyusun target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu Tertentu;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
8. Menyiapkan dan mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah
9. Menyusun dan menyiapkan pengembangan teknologi pengelolaan Sampah;
10. Menyusun dan menyiapkan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
11. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan bagi pengumpul teknis perizinan bagi pengumpul limbah B3;
12. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pengangkutan Limbah B3 (Fasyankes) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
13. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah B3;
14. Menyiapkan dan mengoordinasikan Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
15. Menyiapkan dan mengoordinasikan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
16. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
17. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

L. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
5. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
7. Meleksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
8. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
12. Melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturanyang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

M. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian pencemaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
6. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
7. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
8. Melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati;
9. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

10. Melaksanakan pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
11. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
12. Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

N. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan secara berkala

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi pelayanan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
7. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
8. Merencanakan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan dalam 1 (satu) Provinsi;
9. Merencanakan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
10. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
11. Merencanakan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;
12. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

13. Merencanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
14. Merencanakan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
15. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
16. Merencanakan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

O. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional

- Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
 3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 5. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 6. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
 7. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
 8. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
 9. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
 10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

P. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SeksiPemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha

- pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
8. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
 9. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
 10. Menyiapkan bahan dalam rangka inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
 11. Menyiapkan bahan dalam rangka Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
 12. Menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu.
 13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Q. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan aneka usaha dan jasa lingkungan;
6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman aneka usaha dan promosi kehutanan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produk primer hasil hutan;
8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pemanfaatan dan aneka usaha kehutanan;
9. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan ekowisata, agrowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring aneka usaha hasil hutan non kayu;
11. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan;
12. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan pengembangan aneka usaha kehutanan;
13. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pemanfaatan hasil hutan;

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

R. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi pelayanan urusan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;

6. Merencanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;
7. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
8. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
9. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
10. Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
11. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi; dan
12. Merencanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi;
13. Merencanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

15. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

S. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahanberdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakatsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
8. Menyiapkan bahan dalam pembangunan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;

9. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
10. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
12. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

T. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Merencanakan kegiatan Seksi Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran

pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi
6. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
9. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
10. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi;
12. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

U. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

1. Merencanakan kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
6. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
7. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;

8. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
9. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
10. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
11. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

V. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya dan menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
6. menetapkan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan limbah laboratorium serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
7. merencanakan monitoring pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan serta pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan serta validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;
8. merencanakan monitoring perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
9. merencanakan monitoring komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi dan pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
10. merencanakan monitoring penanganan pengaduan hasil pengujian;
11. merencanakan monitoring Audit Internal, Audit Eksternal dan Kaji Ulang Manajemen Uji Profisiensi Laboratorium;
12. merencanakan pelaksanaan Akreditasi Laboratorium;
13. merencanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan serta memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
14. merencanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak dan membantu dalam melaksanakan

pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;

15. merencanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
16. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
17. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

W. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

X. Kepala Seksi Mutu

1. merencanakan kegiatan Seksi Mutu berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Mutu;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penjagaan standar kompetensi dan objektivitas personel;
6. melaksanakan Monitoring standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
7. melaksanakan penjagaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
8. melaksanakan monitoring dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
9. melaksanakan evaluasi penanganan pengaduan hasil pengujian;
10. melaksanakan Audit Internal, Audit Eksternal dan Kaji Ulang Manajemen;
11. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Uji Profisiensi Laboratorium;
12. melaksanakan Akreditasi Laboratorium;
13. melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan dan pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/ Kota se Provinsi Banten
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Mutu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Mutu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Y. Kepala Seksi Teknis

1. merencanakan kegiatan Seksi Teknis berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Teknis;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
6. melaksanakan Monitoring preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
7. menyusun rencana validasi metoda pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
8. menyusun rencana klaim ketidakpastian pengujian;
9. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan serta pengelolaan/ pengolahan limbah dan pengelolaan K3;
10. melaksanakan pengadaan bahan kimia/ glasware laboratorium;
11. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
12. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
13. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Teknis dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Teknis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Z. Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merencanakan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bidang kehutanan dan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan hasil hutan bukan kayu (HHBK);
6. merencanakan pelaksanaan pengawasan peredaran benih/bibit tanaman hutan;
7. merencanakan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah tanaman endemic Banten;
8. merencanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas pelaku usaha perbenihan, kelompok tani, aparatur serta masyarakat lainnya;
9. merencanakan bahan rekomendasi Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan /atau Bibit Terdaftar;

10. merencanakan fasilitasi dalam bidang proteksi tanaman meliputi pengamatan, identifikasi dan pengendalian OPT serta faktor yang mempengaruhinya dan pembinaannya;
11. merencanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
12. merencanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset serta kerumahtanggaan UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

AA. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset,

rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
14. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BB. Kepala Seksi Sertifikasi

1. merencanakan kegiatan Seksi Sertifikasi berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;;
5. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Sertifikasi;
6. melaksanakan pelayanan kegiatan Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit dan Sumber Benih Tanaman Hutan;
7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran benih/bibit di wilayah Provinsi Banten melalui pemantauan aktivitas pengadaan/pengedar beinh dan/atau bibit tanaman hutan serta pembinaannya;
8. mengecek dan mengkoreksi kelengkapan administrasi dan teknis penetapan pengada dan pengedar benih dan /atau bibit terdaftar, serta memfasilitasi rekomendasi dan penetapan Pengadaan/pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar;
9. melaksanakan penelusuran dan pembangunan areal konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG);
10. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sumber Benih Tanaman Hutan dan ASDG yang telah ditetapkan;
11. melaksanakan pelayanan data dan informasi tentang peredaran benih/bibit tanaman hutan;
12. melaksanakan sosialisasi peraturan serifikasi benih/Bibit dan Sumber Benih Tanaman Hutan dan Bimtek Pengendalian OPT Tanaman Hutan.

13. mengecek dan mengontrol pelaksanaan pelestarian plasma nutfah melalui kebun koleksi/arboretum dan pemeliharaannya;
14. menyusun data dan informasi penyebaran benih dan bibit tanaman hutan;
15. menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan fisik serta keuangan program dan kegiatan Seksi Sertifikasi secara berkala;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
17. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sertifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sertifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

CC. Kepala Seksi Perbenihan

1. merencanakan kegiatan Seksi Perbenihan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan; membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
3. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

4. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Seksi Perbenihan;
5. melaksanakan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi produksi, pengadaan, penyediaan, pengelolaan dan penyaluran benih/bibit tanaman hutan, tanaman produktif/MPTS dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
6. mengecek dan mengkoreksi penyusunan petunjuk teknis pelayanan penyediaan bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan HHBK;
7. melaksanakan pengelolaan persemaian permanen, laboratorium kultur jaringan, green house, kebun sumber benih dan ruang aklimatisasi;
8. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi pengembangan perbenihan tanaman hutan, tanaman produktif dan atau HHBK kepada pelaku usaha, dunia pendidikan, aparat, petani dan masyarakat;
9. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan tanaman langka/endemik atau yang bernilai ekonomi tinggi baik secara in vitro maupun konvensional;
10. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi calon sumber benih serta melaksanakan fasilitasi pengelolaan sumber benih;
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi calon sumber benih, pengelolaan sumber benih, dan Penyaluran bibit tanaman hutan, tanaman produktif dan HHBK serta pengelolaan areal konservasi sumber daya genetik tanaman hutan (ASDG); menyusun data dan informasi produksi dan distribusi bibit tanaman hutan; menyusun laporan pertanggungjawaban, laporan fisik serta keuangan program dan kegiatan Seksi Perbenihan secara berkala;
12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perbenihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perbenihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

DD. Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

1. menyusun rencana operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merencanakan operasional di lingkungan UPTD berdasarkan program kerja UPTD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
4. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
5. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
6. mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perlindungan, rehabilitasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;
7. mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perlindungan, rehabilitasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD dengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

9. melaporkan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

EE. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

FF. Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

1. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. memberi petunjuk teknis Perlindungan dan Rehabilitasi;
6. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data perlindungan dan rehabilitasi;
7. melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi lahan dan Melaksanakan pengawetan tumbuhan dan satwa;
8. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan masyarakat daerah penyangga;
9. mengoreksi bahan kerjasama pengelolaan meliputi perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat;
10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

GG. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. mengoreksi bahan pertimbangan dan kajian teknis dan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan;
6. mengecek inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
7. melaksanakan pelayanan kerjasama penelitian, pendidikan cinta alam, rekreasi dan wisata alam dan menyiapkan bahan kerjasama pengelolaan meliputi pengembangan penelitian, pendidikan dan pemanfaatan;
8. melaksanakan penyusunan bahan promosi dan publikasi;
9. melaksanakan pengembangan usaha dan pelayanan pengunjung;
10. mengontrol pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

HH. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja Cabang Dinas;
6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada diluar kawasan hutan;
7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;
10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;
11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang Dan Cilegon dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

II. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;

9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Cabang Dinas;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Cabang Dinas;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

JJ. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

1. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;

12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;
14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;
19. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

KK. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
4. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;
6. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
7. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
8. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;

10. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya; fasilitasi forum DAS, pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
12. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah kerjanya;
14. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
15. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
16. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah kerjanya.
17. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
18. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

LL. Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang

1. menyusun rencana operasional di lingkungan Cabang Dinas berdasarkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang di bebani hak di wilayah kerja Cabang Dinas;
6. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada diluar kawasan hutan;
7. melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota dan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara;
8. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/ bukan kayu di wilayah kerja Cabang Dinas;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi/ tidak masuk lampiran (appendix) CITES;

10. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada diluar kawasan hutan negara;
11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

MM. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup Cabang Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset Cabang Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup Cabang Dinas;
9. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan Cabang Dinas;
11. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Cabang Dinas;
12. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Cabang Dinas;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

NN. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH

1. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan penyusunan rencana tata guna hutan tingkat Cabang Dinas dan neraca sumber daya hutan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah kerjanya;
7. melaksanakan penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
8. h. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;

10. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer serta pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu;
11. melaksanakan inventarisasi potensi, promosi pengembangan pengolahan, pelatihan pengembangan pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu;
12. menyiapkan bahan dalam rangka Rekomendasi Pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
13. melaksanakan Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu;
14. melaksanakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
15. memfasilitasi Pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelaksanaan pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
16. melaksanakan pelatihan pendidikan dan penyuluhan kegiatan, pembangunan sistem informasi, bimbingan teknis dan evaluasi Dalkarhutla;
17. melaksanakan Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
18. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di wilayah kerjanya;
19. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH pada Cabang Dinas

Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang

20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

OO. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas berdasarkan rencana operasional Cabang Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
6. melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah kerjanya;
7. fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;
8. fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial di wilayah kerjanya;

9. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
11. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
12. fasilitasi forum DAS, pelaksanaan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
13. melaksanakan pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah kerjanya;
14. menyusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
15. melaksanakan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah kerjanya;
16. memfasilitasi pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
17. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
18. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah kerjanya.
19. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang

- 20. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, seperti halnya OPD lainnya, dilengkapi dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya lainnya. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kinerja organisasi agar menjadi lebih baik dan optimal.

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 285 orang yaitu pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 154 orang dan tenaga Non-PNS (kontrak) sebanyak 131 orang. Adapun rincian jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut ::

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	KepalaDinas
2	Esselon III	9	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	27	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	9	Penyuluh
5	Fungsional Umum	108	Pelaksana/ASN
	Jumlah	154	

Sumber: DLHK Banten, 2019

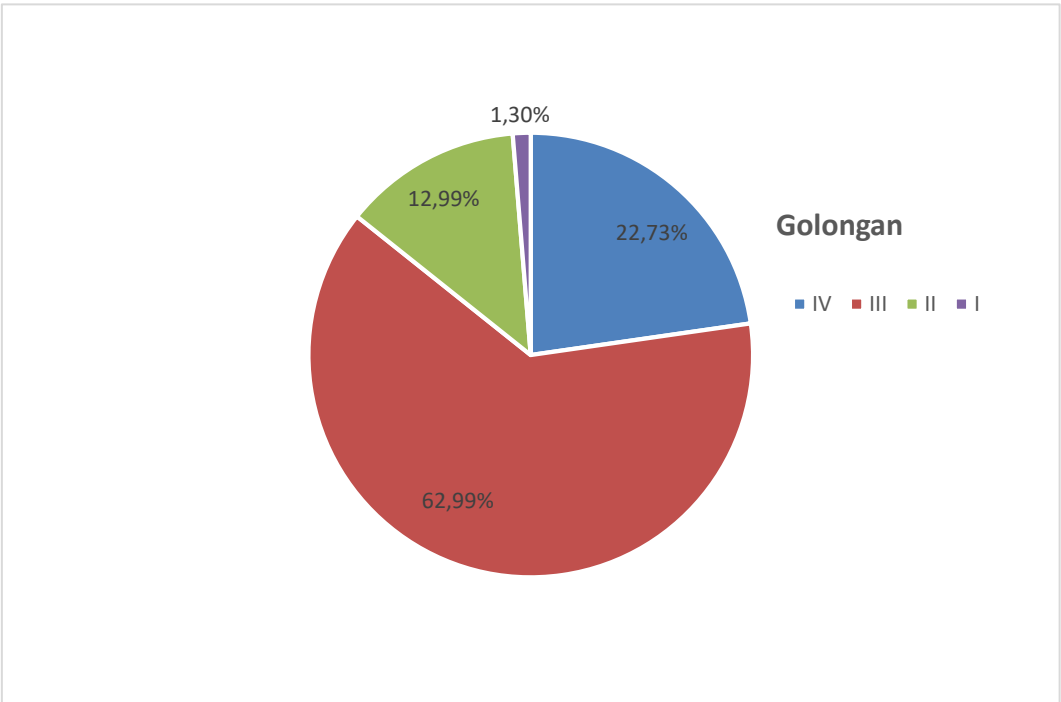
Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	-	-	3
4	Kepala CDLHK / UPTD	5	-	-	-	5
6	Kepala Sub Bagian	2	5	-	-	7
7	Kepala Seksi	5	15	-	-	20
8	Penyuluh	4	5	-	-	9
9	Pelaksana/ASN	4	82	20	2	108
Jumlah		35	97	20	2	154

Sumber: DLHK Banten, 2019

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 35 orang (22,73%), Golongan III sebanyak 97 orang (62,99%), Golongan II sebanyak 20 orang (12,99%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,30%). Secara grafis disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yakni; barang bergerak dan barang tidak bergerak. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Sarana Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan	
			Baik	Rusak
A	Barang Bergerak			
1	Roda Empat	44	33	11
2	Roda Dua	80	57	23
3	Roda Tiga	11	6	5
B	Barang Tidak Bergerak			
1	Gedung Persemaian	3	3	-
2	Laboratorium	3	3	-
3	Gedung Pertemuan Petani	-	-	-
4	Gedung Kantor Dinas	3	3	-
5	Meja Kerja	791	457	334
6	Kursi Kantor	1173	645	528
7	Komputer	64	54	10
8	Mesin Ketik	8	8	-
9	Peralatan Laboratorium	322	167	155
10	Peralatan Gambar	2	2	-
11	Barang lainnya	3395	1755	1640

Sumber: DLHK Banten, 2019

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan kategori aset dan nilainya diestimasi mencapai ± 78,1 milyar dengan rincian sebagai berikut:

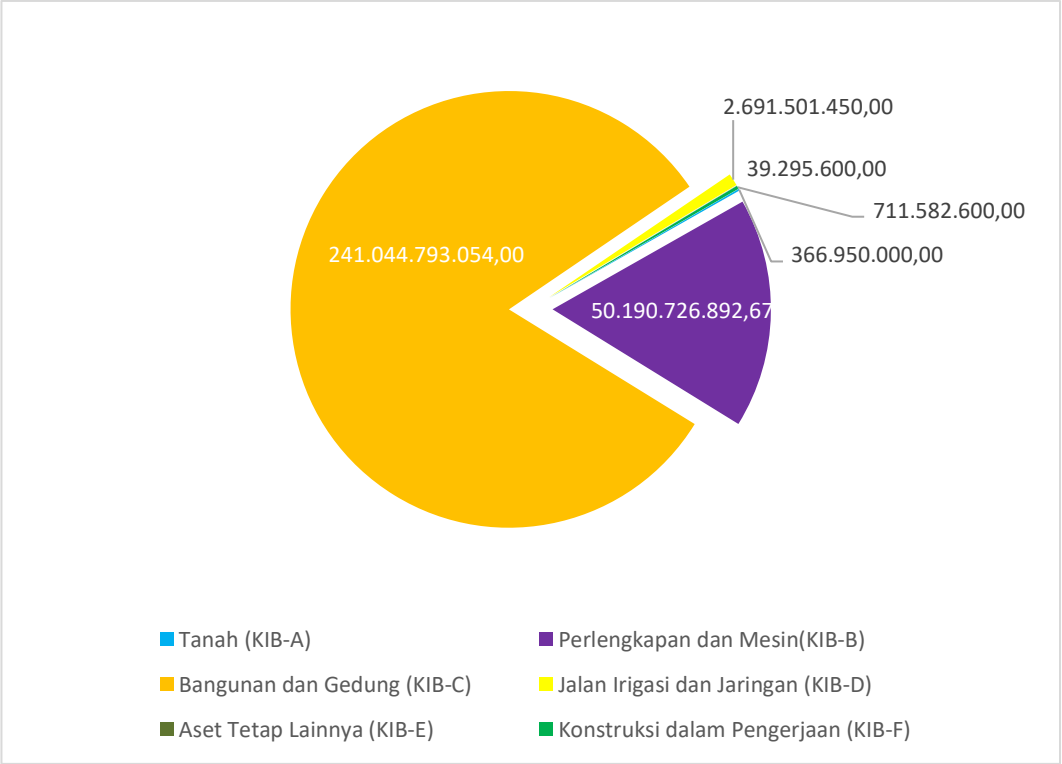
Tabel 2.4. Jenis Aset dan Nilai Barang
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Barang/Aset	NilaiBarang (Rp)	Keterangan
1	Tanah (KIB-A)	366.950.000,00	
2	Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)	50.190.726.892,67	Kendaraan, Meja, Kursi,AC,PC,Printer,Laptop

3	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	24.104.479.3054,00	GedungKantor, Kantin,KanopiParkir, Toilet,TempatWudhu, Kanopi Musholah
4	Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)	2.691.501.450,00	IPAL,InstalasiLAN
5	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	39.295.600,00	Maket Gunung Krakatau danBadak Bercula
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB-F)	711.582.600,00	AlatPemantau Kualitas Udara
Total		78.104.535.847,67	

Sumber: DLHK Banten, 2019

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun 2019 adalah senilai Rp. 78.104.535.847,67 dengan persentase tertinggi jenis perlengkapan dan mesin yakni 50,1 milyar (55,05%) atau lebih dari setengah nilai total aset. Sedangkan persentase terendah adalah aset tetap lainnya/maket yakni 14,8 juta (0,03%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut:



Gambar 2.3 Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

C. **Sumberdaya Lainnya**

Sumber Daya lainnya atau dikategorikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sumber daya yang dimiliki atas hak pengelolaan sumber daya alam, meliputi; hutan/kawasan hutan, ekosistem hutan dan sumber daya hasil hutan.

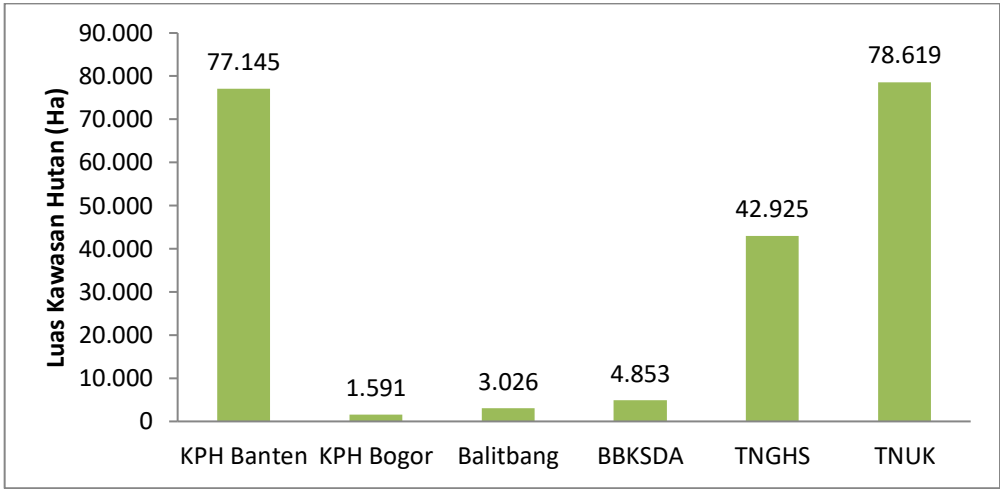
Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 208.161,27 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat termanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

Tabel 2.5. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten

No	Pengelola Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah
1	KPH Banten	69.266	7.879	-	77.145
2	KPH Bogor	-	1.591	-	1.591
3	Balitbang	3.026	-	-	3.026
4	BBKSDA	-	-	4.853	4.853
5	TNGHS	-	-	42.925	42.925
6	TNUK	-	-	78.619	78.619
	Total	72.292	9.471	126.397	208.161

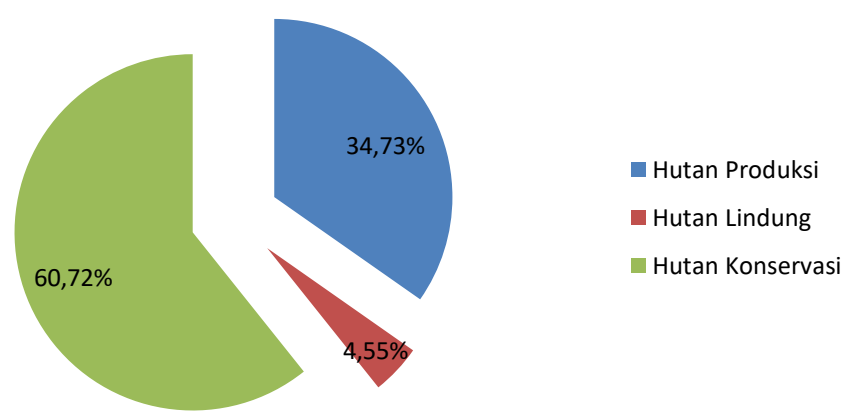
Sumber: DLHK Banten, 2019

Berdasarkan jenis/tipe pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Banten yang termasuk dalam kewenangan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah seluas 208.161 Ha, meliputi; KPH Banten 77.145 Ha, KPH Bogor 1.591 Ha, Balitbang 3.026 Ha, BBKSDA 4.853 Ha, TNGHS 42.925 Ha dan TNUK 78.619 Ha. Grafik luasan kawasan hutan berdasarkan pengelolaannya disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.4. Gambaran Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Banten meliputi; Hutan Produksi (HP) seluas 72.292 Ha, Hutan Lindung 9.471 Ha dan Hutan Konservasi 126.397 Ha. Persentase luasan dari masing-masing tipe fungsi tersebut disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.5 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten terdiri dari dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Luas Taman Nasional Ujung Kulon (daratan) adalah seluas 78.619 Ha, dan kawasan taman/perairan lautnya seluas 44.337 Ha. Sedangkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terbagi dua Provinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat dengan areal yang masuk di Provinsi Banten seluas

42.925,15 Ha. Kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam seluas 4.230 ha dan Taman Wisata Alam seluas 623,15 Ha serta Taman Wisata Alam Perairan Laut seluas 720,00 Ha.

Tabel 2.6 Rencana Kawasan Lindung
Provinsi Banten Tahun 2010-2030

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Hutan Lindung	9.804,47	1,01	Kep.Direksi Perhutani No.681/KPTS/DIR/2013
2	Sempadan Pantai	5.174,00	0,54	
3	Sempadan Sungai	7.877,00	0,82	
4	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	83.155,00	8,61	
5	Kawasan Sekitar Mata Air	787,00	0,08	
6	Kawasan Cagar Alam Rawa Danau	3.542,70	0,37	SK.3586/Menhut-VII/KUH/2014
7	Kawasan Cagar Alam Tukung Gede	1.519,50	0,16	SK.3622/Menhut-VII/KUH/2014
8	Kawasan Cagar Alam Pulau Dua	32,85	0,003	SK.3107/Menhut-VII/KUH/2014
9	Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	61.357,46	6,35	SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014
10	Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	42.925,15	4,44	Kepmenhut No.698/Kpts-II/2003
11	Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1.595,90	0,17	SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014
12	Kawasan Taman Wsiata Alam Pulau Sangiang	528,15	0,05	Kepmenhut No.698/Kpts-II/1991
13	Kawasan Rawan Bencana	66.451,33	6,88	
14	Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy	5.136,58	0,53	
	Total	289.887,60	30,00	

Sumber: DLHK Banten, 2019

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe Ekosistem Hutan Hujan Dataran rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya

yang unik serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalamnya terdapat satwa spesifik endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sundaicus*). Selain hal tersebut di atas Provinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat.

Kawasan hutan produksi di Provinsi Banten terbagi kedalam beberapa kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan Jati 34.759,15 Ha, kelas perusahaan Mahoni 14.844,44 Ha, dan kelas perusahaan Acacia mangium 22.179,19 Ha. Selain memiliki kawasan-kawasan hutan tersebut diatas, Provinsi Banten memiliki juga kawasan konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Pengelolaan hutan tidak mengikuti pembagian administratif Pemerintahan, tetapi mengacu pada satu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Banten terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai penting antara lain DAS Ciujung seluas 279.839 Ha, DAS Cidanau seluas 22.620 Ha dan DAS Cibaliung seluas 63.669 Ha yang merupakan DAS prioritas. Keutuhan dan kemantapan fungsi catchment area DAS Ciujung sangat berpengaruh kepada daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang khususnya berkaitan dengan sering terjadinya banjir di wilayah DAS Ciujung, selain itu DAS Ciujung berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk mensuplai air bagi Waduk Karian sedangkan DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai keberlangsungan Waduk Krenceng.

Pengelolaan kawasan hutan produksi di Provinsi Banten diarahkan bagi pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Lokasi kawasan hutan produksi

tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, meliputi kecamatan Banjarsari, Cileles, Gunung Kencana, Bojong Manik, Cikulur dan Cimarga); Kabupaten Pandeglang, meliputi Cikeusik, Munjul, Cibaliung, Mandalawangi, Labuan dan Cimanggu; serta Kabupaten Serang yang meliputi Kecamatan Mancak dan Ciomas.

Selain kawasan hutan negara, luas indikatif hutan rakyat di Provinsi Banten mencapai 322.152,59 ha dengan potensi kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m³ dan potensi karbon mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan rakyat di Provinsi Banten terbesar luasannya berturut-turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang dominan di Provinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni, dll

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten seluas 865.120 ha, sedangkan luas kawasan hutan negara baru mencapai 208.161,27 ha. Bila mengacu kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi luas hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS) tetapi secara faktual proporsi luas hutan di Provinsi Banten baru mencapai 24,06 %. Walaupun demikian dengan terdapatnya hutan rakyat diluar kawasan hutan, luas total tutupan lahan di Provinsi Banten masih lebih luas dari kawasan hutan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan OPD sangat terkait dengan tugas dan fungsi OPD tersebut, demikian halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Tugas dan fungsinya telah dijabarkan secara detil dan terstruktur sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan tugas pokok adalah membantu Gubernur melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Disamping kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, juga melaksanakan kewenangan lainnya sebagai pelaksanaan atas dekosentrasi maupun azas tugas pembantuan. Dengan kewenangan tersebut penanganan lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan di Provinsi Banten ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan suatu ekosistem yang serasi, selaras dan berkesinambungan serta memperhatikan aspek kelestarian fungsi hutan yang bernilai ekonomis.

Penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu terus menerus dilakukan penyempurnaan kearah yang lebih baik, yang disusun dalam suatu tahapan perencanaan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil/*output*.

Agar perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih terstruktur dan objektif, maka evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan dan Kehutanan perlu menjadi dasar dalam penyusunan rencana-rencana program dan kegiatan. Adapun tabel capaian kinerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten periode tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten

A. Urusan Lingkungan Hidup

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pencemaran Udara (%)		IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Cakupan Pengawasan dan Pelaksanaan AMDAL (%)		IKK		0	0	63,83	78,13	78,13	0	0	63,83	78,13	78,1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
3	Penegakan Hukum Lingkungan (%)		IKK		37,5	62,5	82,35	97,73	100	37,5	62,5	82,35	97,73	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Pelayanan Informasi Status Mutu Air (%)			SPM	20	20	20	20	20	20	80	100	100	100,0	1,00	4,00	5,00	5,00	5,00
5	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara (%)			SPM	100	100	100	100	100	25	100	100	100	100,0	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (%)			SPM	42	78	82,35	92	75	42	78	82,35	92	75,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	*Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)				20	20	20	20	20	0	80	100	100	100	0,00	4,00	5,00	5,00	5,00
8	*Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)				20	20	20	20	20	42,11	77,78	82,35	100	75,0	2,11	3,89	4,12	5,00	3,75
9	Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)				20	20	20	20	20	20	20	20	20	7,8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,39
10	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan				100	100	100	100	100	100	50	100	62,07	100	1,00	0,50	1,00	0,62	1,00
15	Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan adm. kepegawaian				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	* Target Kinerja RPJMD																		

B.Urusan Kehutanan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	* Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)				162,5	137,5	150	150	150	162,5	137,5	150	150	150	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	* Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)				100	100	100	100	100	100	100	117,5	100	100	1,00	1,00	1,18	1,00	1,00
	* Target Kinerja RPJMD																		

Pada urusan wajib bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 urusan lingkungan hidup diampu oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten sedangkan Urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, pada umumnya target capaian kinerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan rata rata dapat tercapai, bahkan melampaui diatas 100%, hanya pada tahun awal pelaksanaan renstra pada terdapat realisasi capaian kinerja berupa Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%) tidak mencapai target karena pada tahun 2012 tersebut merupakan tahun peralihan dari periode rentra lima tahun sebelumnya, capaian kinerja tersebut merupakan target capaian baru yang mulai dilaksanakan pada tahun 2013.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh OPD antara lain : 1) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih terbatas disebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan, 2) Belum terosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berpengaruh langsung terhadap penerapan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, 3) Semakin kompleksnya dan rumitnya permasalahan lingkungan hidup sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pembangunan. 4) kualitas lahan di Provinsi Banten memiliki kecenderungan penurunan kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya

Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila tidak ada langkah-langkah penanganan untuk mengelola lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan lahan di Provinsi Banten akan semakin turun dan terancam, 5) Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu :

- a) Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH),
- b) Sertifikat di dalam kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan kompensasi belum selesai,
- c) Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti diokupasi oleh masyarakat,
- d) Pemanfaatan Hutan Konservasi/Pemanfaatan ilegal di kawasan konservasi,
- e) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat/Hutan adat di dalam kawasan hutan

Beberapa solusi/upaya yang dilakukan OPD, antara lain : 1) Penanganan pencemaran sungai yang terintegrasi, diperlukan pembangunan embung-embung dan revitalisasi situ-situ, upaya untuk mengurangi dampak banjir dan kekeringan. 2) Tindak lanjut dari PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu segera ditindaklanjuti penerbitan peraturan teknis dari Kementerian Teknis agar ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah, 3) Diperlukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu oleh investor karena tidak setiap industri mempunyai kemampuan untuk membangun instalasi limbah, 4) Perlu

dilakukan upaya terpadu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya, 5) perlu dilakukanya pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dengan dikawal oleh Instansi terkait.

Adapun target anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 , dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten

uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	5.360.000.000	5.052.000.000	8.025.000.000	10.536.248.000	8.099.909.650	4.999.017.500	4.718.010.600	7.099.734.150	9.581.395.110	7.784.915.966							
Pemantauan Kualitas Lingkungan	1.400.000.000	977.000.000	1.125.000.000	1.581.847.000	832.197.250	1.201.453.000	920.703.500	1.042.809.800	1.346.982.300	822.705.850	0,858	0,942	0,927	0,852	0,989	(0,05)	(0,05)
Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3	750.000.000	800.000.000	950.000.000	1.050.000.000	770.000.000	728.007.500	763.927.500	824.965.500	856.672.300	646.434.784	0,971	0,955	0,868	0,816	0,840	0,02	(0,02)
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	1.110.000.000	700.000.000	1.500.000.000	2.350.000.000	2.428.370.000	1.090.798.000	666.421.400	1.391.347.650	2.194.890.800	2.365.986.500	0,983	0,952	0,928	0,934	0,974	0,34	0,34
Pengkajian Dampak Lingkungan	1.175.000.000	1.125.000.000	1.600.000.000	2.722.121.000	850.000.000	1.058.449.000	975.290.000	1.425.889.300	2.526.527.660	799.765.750	0,901	0,867	0,891	0,928	0,941	0,10	0,12
Pengawasan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	925.000.000	-	-	-	-	920.310.000	-	-	-	-	0,995	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	-	850.000.000	1.400.000.000	1.333.500.000	837.500.000	-	841.103.200	1.300.129.000	1.230.936.750	831.935.392	-	0,990	0,929	0,923	0,993	0,06	0,04
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan	-	600.000.000	1.450.000.000	1.148.780.000	1.670.142.400	-	550.565.000	1.114.592.900	1.119.263.300	1.640.702.400	-	0,918	0,769	0,974	0,982	0,42	0,37
Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	-	-	-	150.000.000	300.000.000	-	-	-	112.257.000	270.464.490	-	-	-	0,748	0,902	0,25	0,35
Pengujian dan analisis Lab Untuk Seluruh Komponen Lingkungan	-	-	-	200.000.000	411.700.000	-	-	-	193.865.000	406.920.800	-	-	-	0,969	0,988	0,26	0,27

uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1.150.000.000	-	-	-	-	1.136.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	600.000.000	-	-	-	-	597.720.000	-	-	-	-	0,996	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air	550.000.000	-	-	-	-	538.505.000	-	-	-	-	0,979	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup		1.000.000.000	2.800.000.000	2.820.000.000	3.552.850.000		990.660.000	2.536.630.800	2.626.647.700	3.349.646.800							
Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam	-	500.000.000	1.350.000.000	1.320.000.000	1.062.690.000	-	497.335.000	1.255.844.000	1.233.148.000	958.425.000	-	0,995	0,930	0,934	0,902	0,37	0,32
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air	-	500.000.000	1.450.000.000	1.500.000.000	800.000.000	-	493.325.000	1.280.786.800	1.393.499.700	761.697.800	-	0,987	0,883	0,929	0,952	0,37	0,31
Pengendalian Perubahan Iklim	-	-	-	-	1.690.160.000	-	-	-	-	1.629.524.000	-	-	-	-	0,964	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah	3.310.000.000	-	-	-		3.157.635.384	-	-	-								
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD	1.022.470.000	-	-	-	-	976.651.000	-	-	-	-	0,955	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.100.000.000	-	-	-	-	1.064.987.384	-	-	-	-	0,968	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	263.000.000	-	-	-	-	257.380.000	-	-	-	-	0,979	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)

uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana Aparatur	150.000.000	-	-	-	-	146.208.000	-	-	-	-	0,975	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	699.530.000	-	-	-	-	637.409.000	-	-	-	-	0,911	-	-	-	-	(0,25)	(0,25)
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		950.000.000	1.040.000.000	1.150.000.000	991.285.000		905.101.900	911.954.400	1.107.423.300	912.619.000							
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	100.000.000	190.000.000	200.000.000	130.000.000	-	100.000.000	179.359.000	184.254.450	128.195.000	-	1,000	0,944	0,921	0,986	0,15	0,13
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	850.000.000	850.000.000	950.000.000	861.285.000	-	805.101.900	732.595.400	923.168.850	784.424.000	-	0,947	0,862	0,972	0,911	0,01	0,00
Program peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur	-	1.723.000.000	5.178.510.000	30.479.432.000	17.382.750.350	-	1.377.563.459	4.657.554.554	21.281.358.673	13.487.365.807							
Pengadaan sarana dan prasarana kantor	-	259.990.000	3.087.255.000	24.070.609.000	3.970.040.750	-	120.180.700	2.867.896.000	15.548.803.500	903.691.100	-	0,462	0,929	0,646	0,228	4,21	6,59
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	-	200.000.000	539.610.000	1.931.840.000	1.426.506.000	-	188.755.000	481.900.000	1.864.088.300	1.147.604.150	-	0,944	0,893	0,965	0,804	1,00	1,01
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	-	1.263.010.000	1.491.645.000	2.494.022.000	1.395.920.000	-	1.068.627.759	1.247.880.554	2.295.732.566	1.260.782.265	-	0,846	0,837	0,920	0,903	0,10	0,14
Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	60.000.000	-	244.891.000	-	-	59.878.000	-	234.261.100	-	-	0,998	-	0,957	(0,25)	(0,25)
Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT Laboratorium	-	-	-	54.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,25)	-
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium	-	-	-	303.000.000	298.926.600	-	-	-	294.900.200	294.731.479	-	-	-	0,973	0,986	(0,00)	(0,00)
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	-	-	-	800.000.000	500.000.000	-	-	-	609.743.607	499.946.713	-	-	-	0,762	1,000	(0,09)	(0,05)
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium	-	-	-	125.000.000		-	-	-	62.410.500	-	-	-	-	0,499	-	(0,25)	(0,25)
Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	-	650.961.000		-	-	-	575.159.000	-	-	-	-	0,884	-	(0,25)	(0,25)

uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Laboratorium	-	-	-	50.000.000	393.700.000	-	-	-	30.521.000	353.975.000	-	-	-	0,610	0,899	1,72	2,65
Pengadaan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK)	-	-	-	-	9.152.766.000	-	-	-	-	8.792.374.000	-	-	-	-	0,961	-	-
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	-	275.000.000	235.000.000	249.920.000	300.000.000	-	271.955.500	223.565.000	229.215.000	295.717.500							
Penyediaan Data pembangunan	-	275.000.000	235.000.000	249.920.000	300.000.000	-	271.955.500	223.565.000	229.215.000	295.717.500	-	0,989	0,951	0,917	0,986	0,03	0,03

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan/Ancaman (*Threat*) dan peluang (*Opportunities*) merupakan analisis lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi dalam implementasi rencana strategis (program dan kegiatan). Peluang (*Opportunities*) adalah faktor-faktor positif dan bersifat eksternal yang mampu mengarahkan kelembagaan/organisasi kearahnya yang lebih baik. Sedang Ancaman (*Threats*) adalah faktor-faktor negatif dan bersifat eksternal yang dapat menghambat tercapainya tujuan kelembagaan/organisasi.

Tahapan awal yang dilakukan agar rencana strategi yang disusun dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan khususnya pada lingkungan eksternal, maka perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang, sebagai berikut:

1. **Tantangan (*Threat*)**

- a) Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik ditingkat daerah (Kab/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya;
- b) Pertumbuhan ekonomi daerah, nasional dan internasional yang terus tumbuh, memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c) Perubahan iklim global (*global warming*), akan berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehutanan secara langsung, seperti; kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata, elnino dan lanina, kenaikan muka air laut (banjir ROB);
- d) Isu ekonomi hijau (*green economics*) dan ekonomi biru (*blue economics*) menjadi masa depan yang dapat diharapkan dapat menekan laju penurunan kualitas lingkungan hidup dan deforestasi hutan;

- e) Produktivitas hutan dari aspek non-kayu masih sangat rendah dan belum dilakukan sebagai sebuah usaha yang menguntungkan;
- f) Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- g) Masih banyaknya peraturan dan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang tumpang tindih, sehingga masih sangat sulit dalam implementasinya;
- h) Masih lemahnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga belum memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
- i) Jangkauan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak kepada lingkungan belum memadai;
- j) Konsep *environmental warrant* pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagai dampak dari eksternalitas usaha belum diterapkan;

2. ***Peluang (Opportunities)***

- a) Adanya program perhutanan sosial yang telah dicanangkan Presiden dan telah dimulai untuk skala pilot project sebanyak 16 lokasi, skala kolaborasi dengan Kementerian Desa sebanyak 50 lokasi, dan skala kolaborasi dengan NGO dan kelompok masyarakat sebanyak 34 lokasi;
- b) Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dengan akses pemasaran yang relatif dekat;
- c) Mulai tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi produk pemanfaatan hasil hutan, seperti; jamur, madu, gula areng dan lainnya;
- d) Mulai berkembangnya Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); seperti; pengembangan budi daya Jamur Kayu, lebah madu (Afis Cerana, Trigona/Lanceng);

- e) Potensi kebutuhan pupuk organik yang sangat tinggi untuk menunjang pertanian organik;
- f) Potensi mitra usaha/investor pada sektor kehutanan yang tergolong cukup tinggi, seperti; penanaman tanaman hutan;
- g) Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman kehutanan tersedia;
- h) Perkembangan kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli lingkungan;
- i) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- j) Penerapan otonomi daerah yang mulai baik dan kondusif, baik ditingkat Provinsi ataupun ditingkat kabupaten/kota;

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya untuk mengetahui faktor internal dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun, sehingga kekuatan (*strength*) yang ada dapat dioptimalkan dan kelemahannya (*Weaknesses*) diminimalisir. Faktor Kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) merupakan dua faktor internal yang harus diketahui dengan baik agar tujuan yang dicanangkan dapat terwujud dengan baik. Setiap lembaga/organisasi memiliki faktor kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelayanannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal, yakni kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi OPD.

Kekuatan (*strengths*) merupakan segala hal/daya yang dibutuhkan dan dimiliki dan bersifat internal kelembagaan/organisasi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Sedang Kelemahan (*weaknesses*) adalah segala hal yang berupa kekurangan/ketidakmampuan yang bersifat internal kelembagaan/organisasi yang dapat menghambat tercapainya tujuan. Secara umum kekuatan dan kelemahan yang dihadapi SKPD/OPD dalam memenuhi tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)

- a. Telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Telah diterbitkannya berbagai peraturan teknis dalam implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009; UU Nomor 41 tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi; kompetensi, profesionalisme;
- d. Komitmen pimpinan OPD yang tinggi;
- e. Motivasi dan kepercayaan yang diberikan pimpinan;
- f. Komunikasi dan jejaring kerja yang baik antar unit;
- g. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu; kendaraan operasional, sarana prasarana/peralatan kantor dan peralatan laboratorium;
- h. Tersedianya dukungan anggaran, meliputi; Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD serta APBN;

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Masih terbatasnya data dan informasi tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, *social marketing* belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan;
- c. Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup belum dibuat);
- d. Produksi, produktivitas dan mutu komoditas kehutanan belum sesuai standar;
- e. Perlindungan dan pengendalian usaha kehutanan belum optimal;
- f. Belum tersedianya hasil hutan yang bersertifikat serta teknologi tepat guna yang memadai;

- g. Masih lemahnya Sumber daya manusia, khususnya dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu;
- h. Terbatasnya SDM penyuluh kehutanan;

Penyuluh Kehutanan sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan kehutanan di Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN penyuluh kehutanan yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya penambahan formasi penyuluh kehutanan, sampai dengan tahun 2019 jumlah penyuluh kehutanan ASN di Provinsi Banten tinggal berjumlah 9 Orang di tiga wilayah kabupaten sebagai berikut :

Tabel 3.1 Komposisi Jumlah Penyuluh Kehutanan ASN di Wilayah Provinsi Banten

No	Wilayah Kabupaten	Jumlah Penyuluh ASN	Keterangan
1	Kabupaten Lebak	1	
2	Kabupaten Pandeglang	6	
3	Kabupaten Serang	2	
4	Kabupaten Tangerang	0	
5	Kota Serang	0	
6	Kota Tangerang	0	
7	Kota Tangerang Selatan	0	
8	Kota Cilegon	0	
Jumlah		9	

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 208.161,27 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat termanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

Tabel 3.2 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten

No	Pengelola Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah
1	KPH Banten	69.266	7.879	-	77.145
2	KPH Bogor	-	1.591	-	1.591
3	Balitbang	3.026	-	-	3.026
4	BBKSDA	-	-	4.853	4.853
5	TNGHS	-	-	42.925	42.925
6	TNUK	-	-	78.619	78.619
	Total	72.292	9.471	126.397	208.161

Sumber: DLHK Banten, 2019

Selain kawasan hutan negara, luas indikatif hutan rakyat di Provinsi Banten mencapai 322.152,59 ha dengan potensi kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m3 dan potensi karbon mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan rakyat di Provinsi Banten terbesar luasannya berturut-turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang dominan di Provinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni dan sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan hutan rakyat merupakan salahsatu upaya Rehabilitasi Lahan Kritis di Provisni Banten dengan jumlah luasan lahan kritis dengan kategori sangat kritis seluas 59.224,94 Ha dan kategori kritis seluas 170.615,79 Ha, adapun luasan lahan kritis di Provisni Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel . 3.3 Luas Lahan Kritis di Provinsi Banten

KABUPATEN/KOTA	KRITIS	SANGAT KRITIS	LUAS LAHAN KRITIS
KOTA CILEGON	749,87	1.835,52	2.585,39
KOTA SERANG	2.167,56		2.167,56
SERANG	16.985,15	4.984,53	21.969,67
PANDEGLANG	64.787,11	4.900,99	69.688,10
LEBAK	85.896,59	47.503,90	133.400,49
TANGERANG	29,52		29,52
JUMLAH	170.615,79	59.224,94	229.840,73

Sumber: DLHK Banten, 2019

Hasil hutan bukan kayu di Provinsi Banten mempunyai potensi yang cukup baik hal tersebut dapat dilihat dari produksi/ketersediaan komoditas hasil hutan bukan kayu yang cukup besar seperti dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Data Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil Hutan Non Kayu Di Provinsi Banten

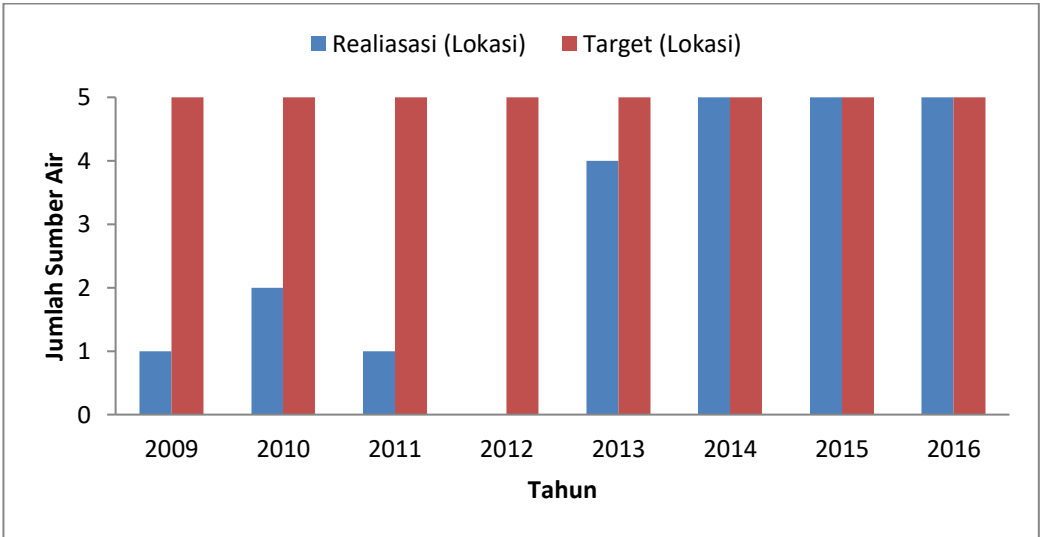
No	Komoditas	Ketersediaan/Produksi per tahun	Kebutuhan per tahun
1	Madu		
	Madu Hutan/Odeng	15 Ton/ Tahun	18 Ton/ Tahun
	Madu Budidaya/Lokal	2 Ton/ Tahun	5 Ton/ Tahun
	Madu Klanceng/Kelulut	0,75 Ton/ Tahun	3 Ton/ Tahun
2	JAMUR TIRAM	3 Ton / Hari	6 Ton / Hari

Adapun pelaksanaan jenis pelayanan bidang lingkungan hidup (Pelayanan Informasi Status Mutu Air) di Propinsi Banten, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Air

Tahun	Jumlah Sumber Air Yang Dipantau KualitasnyaDitetapkan Status Mutu Air& Diinformasikan	Jumlah Sumber Air Yang Ditetapkan dari Hasil Identifikasi	Persentase Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Kualitasnya & Ditetapkan Status Mutu Air & Diinformasikan
2009	1	5	20%
2010	2	5	40%
2011	1	5	20%
2012	0	5	0%
2013	4	5	80%
2014	5	5	100%
2015	5	5	100%
2016	5	5	100%

Sumber: DLHK Banten, 2017

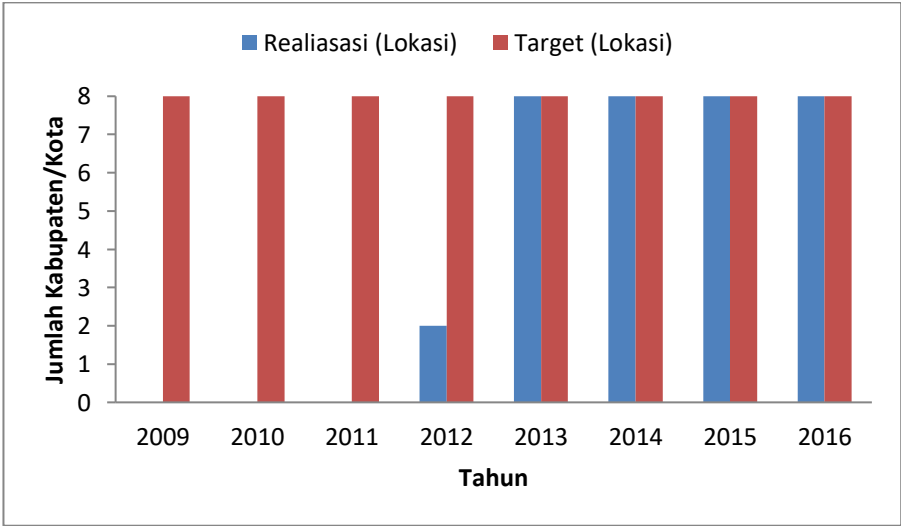


Gambar 3.1. Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Air tahun 2009-2016 di Provinsi Banten

Tabel 3.6. Capaian SPM untuk Pelayanan Informasi Status Mutu Udara

Tahun	Jumlah Kab/Kota Yang Dipantau Kualitas Udara Ambien & Diinformasikan Status Mutunya	Jumlah Kab/Kota Yang Ada di Wil Banten	Persentase Jumlah Kab/Kota Dipantau Kualitas Udara Ambien & Diinformasikan Status Mutunya
2009	0	8	0%
2010	0	8	0%
2011	0	8	0%
2012	2	8	25%
2013	8	8	100%
2014	8	8	100%
2015	8	8	100%
2016	8	8	100%

Sumber: DLHK Banten, 2017



Gambar 3.2. Grafik Target dan Realisasi Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien tahun 2009-2016 di Provinsi Banten

3. Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Tugas dan Fungsi OPD

Telaah isi (*Content Analysis*) digunakan untuk melihat keterkaitan keselarasan antara tugas dan fungsi DLHK Propinsi Banten. Sedang analisis kebutuhan digunakan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan DLHK Propinsi Banten berdasarkan Tugas dan Fungsinya. Analisis kebutuhan merupakan analisis lanjutan atas telaah isi yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan OPD dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan berdasarkan Tugas dan Fungsi serta Analisis Faktor Internal (Strength-Weakness)

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
Mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi	- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Propinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Propinsi; - Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi; - Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi; - Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah propinsi; - Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat	Bidang Lingkungan Hidup; - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Propinsi Banten - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Propinsi Banten - Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Propinsi Banten - Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Pengelolaan Limbah B3 - Izin PPLH - Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan	- Penyusunan RPPLH, KLHS, dan KRP - Penyusunan Rencana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Penyusunan rencana pengelolaan limbah B3 - Inventarisasi izin PPLH - Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal	<u>Kekuatan (Strength)</u> - Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Telah diberlakukannya UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah - Telah diterbitkannya berbagai peraturan terknis dalam implementasi UU PPLH dan UU PS - Tersedianya Sumberdaya

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi; - Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi; - Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah propinsi; - Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah propinsi;	tradisional dan hak kearifan lokal - Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup - Penghargaan lingkungan hidup - Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH - Pengelolaan sampah	- Inventarisasi dan penyelesaian pengaduan dan konflik terkait lingkungan hidup - Penyelenggaraan Diklat dan penyuluhan - Inventarisasi dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup - Pengelolaan Sampah dan penetapan TPA	Manusia yang profesioanal - Komitmen dan pengalaman Pimpinan OPD dalam memimpin - Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf - dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan) - Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	- Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah propinsi; 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota; - Penanganan sampah di TPA/TPST regional;			<u>Kelemahan (Weakness)</u> - DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk - Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, <i>social marketing</i> belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan; - Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup belum dibuat); - Terbatasnya tim penyuluh lingkungan hidup

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	- Pengelolaan Kehati Propinsi; - Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); - Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); - Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon; - Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;	Bidang Kehutanan; - Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) - Pengelolaan Hutan (KPHK) - Program rehabilitasi - TAHURA (Taman Hutan Raya) - Perlindungan tumbuhan (Appendix CITES) - Diklat dan Penyuluhan Hutan - Pemberdayaan Masyarakat terkait Hutan - Pengelolaan DAS	- Implementasi KEHATI - Peningkatan program rehabilitasi - Peningkatan program perlindungan tumbuhan - Peningkatan kapasitas SDM - Peningkatan program pemberdayaan masyarakat - Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal - Peningkatan kapasitas kelembagaan OPD - Peningkatan kapasitas	<u>Kekuatan (Strength)</u> - Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan - Telah diterbitkannya berbagai peraturan terknis dalam implementasi UU Kehutanan dan UU PPPH - Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional dibidang

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	- Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi; - Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu; - - Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; - Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi; - Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota; - Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. - Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga		masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup - & kehutanan	Kehutanan (Sarjana & Magister Kehutanan) - Komitmen dan pengalaman Pimpinan SKPD/OPD dalam memimpin - Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf - Kelengkapan sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan) - Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam; - Pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi; - Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; - Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah propinsi; - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya			<u>Kelemahan (Weakness)</u> - DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk - Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, social marketing belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan; - Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro Kehutanan belum dibuat) - Terbatasnya tim penyuluh kehutanan - Produksi, produktivitas dan mutu komoditas

Tugas	Fungsi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan sesuai Tugas & Fungsi OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
				kehutanan belum sesuai standar - Perlindungan dan pengendalian usaha kehutanan belum optimal; - Belum tersedianya hasil hutan yang bersertifikat serta teknologi tepat guna yang memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi antara lain:

A. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
2. KLHS dan Kebijakan dan Rencana Program (KRP) Provinsi;
3. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. Pengelolaan KEHATI Provinsi.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;
7. Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
8. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
10. Pemberian penghargaan LH tingkat daerah provinsi;
11. Penyelesaian pengaduan LH di bidang PPLH terhadap:
 - Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi
 - Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota.

12. Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

B. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Kehutanan

1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
 - a. Pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. Pemungutan hasil hutan;
 - d. Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.
8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
9. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.
10. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*)
11. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
12. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
14. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Berpijak pada kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi sampai dengan tahun 2025 serta mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan harapan masyarakat Provinsi Banten, maka Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 ***"Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"***. Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2005-2025, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Dalam kerangka keterpaduan pembangunan nasional, Misi pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk mendukung pencapaian Misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Tahapan pembangunan dalam RPJPD dibagi menjadi lima tahapan sebagai berikut:

1. RPJMD Ke-1 (Renstrada Tahun 2005-2006 & Renstra Transisi 2007) / Tahap Revitalisasi - I
2. RPJMD Ke-2 (Tahun 2008-2012) / Tahap Revitalisasi - II
3. RPJMD Ke-3 (Tahun 2013-2017) / Tahap Akselerasi - I
4. RPJMD Ke-4 (Tahun 2018-2022) / Tahap Akselerasi - II
5. RPJMD Ke-5 (Tahun 2023-2025) / Tahap Modernisasi

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih merupakan arah utama dalam pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi tersebut akan sangat menentukan kemana arah pembangunan sutau daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Banten serta mempertimbangkan budaya yang

hidup dalam masyarakat, maka visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “**Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah**”. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan-perubahan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Propinsi Banten dapat lebih berperan segala aspek di lingkup nasional, regional, maupun global.

Kerangka visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut untuk tahun 2017-2022 adalah ditekankan pada 5 (lima) aspek, yakni;

- 1) Maju; dimaknai sebagai Banten yang memiliki kemajuan dalam segala aspek pembangunan, seperti; Sumberdaya Manusia, Sarana Prasarana dan sebagainya;
- 2) Mandiri; dimaknai sebagai Banten yang mampu berdiri sendiri dalam segala aspek pembangunan daerah dan nasional, dengan kata lain tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau daerah lainnya menjadi sangat minim;
- 3) Berdaya Saing; dimaknai sebagai Banten yang memiliki daya saing yang tinggi dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat. Berdaya Saing tinggi yang ditunjang oleh pendidikan yang baik dan merata serta *skill* (kemampuan/keterampilan).
- 4) Sejahtera; dimaknai sebagai Banten yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif baik dengan persentase tingkat kemiskinan yang relatif kecil;
- 5) Berakhlakul Karimah; dimaknai sebagai Banten yang memiliki masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dalam segala aspek kehidupannya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Misi Pertama, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Misi Kedua, Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Misi Ketiga, Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas
4. Misi Keempat, Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Misi Kelima, Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Pernyataan Misi ke-1 dan ke-5. Pernyataan Misi ke-1 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tujuan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat, dengan arah kebijakan yang diambil adalah Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan dengan sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.

Sedangkan pernyataan misi ke-5 “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”. Dengan tujuan daerah yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”. Arah kebijakan yang diambil adalah Peningkatan Kualitas Air dan Udara melalui pengelolaan sampah dan limbah, Meningkatkan Fungsi Hutan, Kawasan Lindung dan Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Meningkatnya pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal

Tabel 3.8 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi Kepala Daerah Terpilih dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah	1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas. 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	- Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) - Kualitas Infrastruktur - Pemerataan Pendidikan - Pemerataan Pelayanan Kesehatan - Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan	- Peningkatan SDM - Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD - Peningkatan Infrastruktur - Peningkatan akses pendidikan - Peningkatan akses kesehatan - Peningkatan pertumbuhan ekonomi	<u>Kekuatan (Strength)</u> - Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional - Komitmen dan pengalaman Pimpinan OPD dalam memimpin - Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf - Tersedianya Sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan) - Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
				<u>Kelemahan (Weakness)</u> - DLHK merupakan dinas gabungan dan baru terbentuk - Kapasitas kerja diantaranya sistem akuntabilitas publik, <i>social marketing</i> belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan; - Pelayanan prima belum optimal (beberapa SOP dan Rencana Makro lingkungan hidup dan kehutanan belum dibuat); - Terbatasnya tim penyuluh

3.3 Telaahan Renstra Kementerian LHK

Renstra KLHK mengacu pada Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan tujuan pembangunan nasional tersebut, maka visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni: “Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang Handal dan Proaktif, serta Berperan dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, dengan Menekankan pada Ekonomi Hijau”. Visi tersebut didasarkan pada Nawa Cita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015. Untuk mewujudkan visi KLHK tersebut, maka misi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- 2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
- 3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Tabel 3.9 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan Visi & Misi KLHK dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan OPD

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang Handal dan Proaktif, serta Berperan dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, dengan Menekankan pada Ekonomi Hijau	- Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; - Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; - Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan	- Kualitas lingkungan - Daya dukung lingkungan - Pengendalian pencemaran - Pengelolaan DAS - Keanekaragaman hayati - Pengendalian perubahan iklim - Luasan dan fungsi hutan - Hutan kegiatan sosial - Ekonomi rakyat - Jenis dan jumlah flora dan fauna yang dilindungi - Keseimbangan ekosistem	- Peningkatan sarana prasarana pengukuran & pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>) - Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga surveyor dan laboran terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan - Peningkatan kapasitas kelembagaan/	<u>Kekuatan (Strength)</u> - Tersedianya Sumberdaya Manusia yang profesional - Kelengkapan Kelembagaan yang telah terpenuhi beserta unit kerjanya dan staf - Tersedianya Sarana dan prasana penunjang kinerja (kantor dan kendaraan) - Ketersediaan dana yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan <u>Kelemahan (Weakness)</u> - Masih minimnya sarana pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (khususnya digital equipments)

Visi	Misi	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4	5
	ekosistem dan keberadaan sumberdaya	- Keberadaan sumberdaya	OPD terkait pengukuran & pemantauan kualitas -	- Belum lengkapnya SOP pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan - Terbatasnya tim survei dan laboran

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan dan strategi penataan ruang ini meliputi; 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, dan 3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Lebih rinci sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Strategi pada Struktur Ruang

- A. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten;
 - Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
 - mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);
- B. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten;
 - Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
 - Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- C. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten;
 - Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;

2. Kebijakan dan Strategi pada Pola Ruang

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten akan meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

- A. Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - Mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
- B. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.
- C. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- D. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggir sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
 - Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;

E. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya

- Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisinya;

F. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

- Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
- Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;

G. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
- Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Strategi Pengembangan Pola Ruang

Strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Banten terdiri atas strategi pengembangan kawasan lindung dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Strategi pengembangan kawasan lindung terdiri dari:

Strategi berupa peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya meliputi:

1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
2. Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;
3. Mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
4. Mewujudkan kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;
5. Mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah banten selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup meliputi:

1. Menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
2. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah.

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

3. Meningkatkan kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
4. Mengendalikan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6. Mewujudkan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
7. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang, meliputi:

1. Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggiran sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya;
2. Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;
3. Mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
4. Meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan perlindungan bawahnya.

Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Strategi peningkatan produktivitas kawasan budidaya, meliputi :

1. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
2. Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
3. Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:

1. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
4. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
5. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

1. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
2. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
3. Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
4. Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;

Rencana Kawasan Lindung

Pengertian kawasan berfungsi lindung dalam suatu rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan lindung geologi;
7. Kawasan lindung lainnya.

Adapun kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam. Rencana kawasan lindung di Wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 260.843 Ha atau 30,15 % dari luas wilayah Provinsi Banten, meliputi :

1. Kawasan Hutan Lindung

- a) Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan.
- b) Kriteria Penetapan
 - Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau;
 - Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40% dan/atau;
 - Kawasan hutan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan seluas kurang lebih 20.646 Ha (2,39%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- b) Kriteria Penetapan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Kecamatan Anyer Kabupaten Serang, Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten

Pandeglang, Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Rawa Danau di Kabupaten Serang, Pegunungan Asepun-Karang-Pulosari (Akarsari) di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

a) Sempadan Pantai

- Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- Kriteria Penetapan. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih 5.174 Ha (0,60%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak dan Kota Cilegon.

b) Sempadan Sungai

- Perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- Kriteria Penetapan
 - Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan pemukiman.
 - Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter.

- Kawasan sempadan sungai di Provinsi Banten terdiri dari DAS Ciujung, DAS Cidurian, DAS Cilemer, DAS Ciliman, DAS Cibanten, DAS Cidanao, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Cibuangeun, DAS Cihara, DAS Cimadur, dan DAS Cibareno dengan total panjang sungai 787,68 Km dengan luas sempadan sungai kurang lebih 7.877 Ha (0,91%) dari luas Provinsi Banten sedangkan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen.

c) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

- Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/situ untuk melindungi danau/waduk/situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/situ.
- Kriteria Penetapan. Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk antara 50 - 100 meter ke arah darat. Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan seluas kurang lebih 83.155,09 Ha (9,61%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di sebagian Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten lebak, dan Kota Cilegon.

d) Kawasan Sekitar Mata Air

- Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kondisi fisik kawasan di sekitarnya.
- Kriteria Penetapan. Kawasan mata air adalah daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air. Kawasan sekitar mata air ditetapkan seluas kurang lebih 787 Ha (0,09%) dari luas Provinsi

Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.

- e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
- Perlindungan terhadap kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
 - Kriteria Penetapan Kawasan Suaka, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya adalah sebagai berikut.
 - Kriteria Cagar Alam, adalah :
 - Kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya;
 - Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
 - Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi. Cagar alam di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut:
 1. CA Rawa Danau seluas kurang lebih 2.500 Ha (0,29%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
 2. CA G. Tukung Gede seluas kurang lebih 1.700 Ha (0,20%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Serang.
 3. CA Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kota Serang.

- Kriteria Taman Nasional, adalah :
 - Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
 - Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
 - Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
 - Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;

Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri. Taman Nasional yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

1. TN Ujung Kulon seluas kurang lebih 78.619 Ha (9,09%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang.
2. TN Gunung Halimun-Salak seluas kurang lebih 42.925 Ha (4,96%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.
3. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Adapun kriteria penunjukan dan penetapan taman wisata alam adalah sebagai berikut :
 - Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
 - Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

- Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Kawasan taman wisata alam yang terdapat di Wilayah Provinsi Banten, meliputi :

1. TWA Pulau Sangiang seluas kurang lebih 528 Ha (0,06%) dari luas Provinsi Banten yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Serang.
2. TWA Carita seluas kurang lebih 95 Ha (0,01%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Pandeglang
3. Kriteria Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam (landscape) yang baik, memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari. Rekomendasi yang memungkinkan dijadikan kawasan TAHURA di Provinsi Banten adalah Komplek Gunung Asepun seluas kurang lebih 7.000 Ha. Adapun alokasi pemanfaatan TAHURA pada tahun 2030 diarahkan seluas kurang lebih 3.026 Ha (0,35%) dari luas Provinsi Banten. Adapun di dalam komplek Gunung Asepun tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani, kawasan Taman Wisata Alam dan Kawasan Suaka Alam yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang saat ini dikelola oleh Badan Litbang Kehutanan Departemen Kehutanan RI.
4. Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk ilmu pengetahuan. Kawasan konservasi cagar budaya perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha (0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

- a. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- b. Kriteria Penetapan Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir. Adapun kawasan rawan bencana alam tersebut, meliputi :
 - Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Gunung Krakatau.
 - Kawasan rawan banjir terdapat di Kabupaten Tangerang (berada pada DAS Cisadane, Pasanggrahan, Cirarab, Cimanceuri, Cidurian), Kota Tangerang (berada pada DAS Cisadane), Kabupaten Pandeglang (berada pada DAS Ciliman, Cilemer), Kabupaten Lebak (berada pada DAS Ciujung dan Cibuangeun), Kabupaten Serang (berada pada DAS Ciujung).
 - Kawasan rawan tsunami terdapat di Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang), Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak), Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon).
 - Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Pandeglang (Kecamatan, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cadasari, Kecamatan Mandalawasngi, Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis), Kabupaten Lebak (Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Sobang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan).

Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan yang terdiri dari:

- a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- b) Kawasan Peruntukan Pertanian
- c) Kawasan Peruntukan Perkebunan
- d) Kawasan Peruntukan Perikanan
- e) Kawasan Peruntukan Pertambangan
- f) Kawasan Peruntukan Industri
- g) Kawasan Peruntukan Pariwisata
- h) Kawasan Peruntukan Permukiman

Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara –Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Adapun rencana pengembangan kawasan budidaya di wilayah Provinsi Banten tahun 2030 seluas kurang lebih 604.277 Ha atau 69,85% dari luas Wilayah Provinsi Banten, meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
 - a. Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi dilakukan untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan tanaman untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
 - b. Kriteria Penetapan
 - Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (score) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.

- Kawasan secara ruang apabila digunakan untuk budidaya, hutan alam dan hutan tanaman dapat memberikan manfaat:
 - Mendorong perkembangan sektor atau kegiatan ekonomi di sekitarnya;
 - Meningkatkan fungsi lindung;
 - Meningkatkan upaya pelestarian sumber daya hutan;
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
 - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
 - Meningkatkan ekspor;
 - Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
- c. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi:
 - Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan hutan rakyat.
 - Mengarahkan pada kawasan perkotaan untuk mewujudkan hutan kota di dalam atau di tepi kota.
 - Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 58.091 Ha (6,71%) dari luas Provinsi Banten.

2. Kawasan Peruntukan Perkebunan

- a. Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan lahan kering dalam meningkatkan produksi tanaman lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Kriteria Penetapan

- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering.
- Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat:
 - Meningkatkan produksi tanaman lahan kering dan pendayagunaan investasi yang adil;
 - Meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - Meningkatkan fungsi lindung;
 - Upaya pelestarian sumber daya alam untuk pertanian pangan;
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
 - Meningkatkan kesempatan kerja;
 - Meningkatkan ekspor;
 - Meningkatkan perkembangan masyarakat.

c. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan :

- Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor.
- Dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
- Peningkatan Peruntukan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Kimbun masing-masing.
- Perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang,

Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi kawasan budidaya lahan kering diarahkan pengembangannya seluas kurang lebih 176.957 Ha (20,45%) dari luas Provinsi Banten.

3. Kebijakan dan Strategi Pada Kawasan Strategis

- A. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.
 - Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
- B. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar;
 - Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - Meningkatkan kepariwisataan;
- C. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
 - Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;
- D. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;

Tabel 3.10 Telaah Isi dan Analisis Kebutuhan RTRW & KLHS dan Analisis Kekuatan dan Kelemahan OPD

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
Kebijakan dan Strategi pada Struktur Ruang	<u><i>Kebijakan Struktur Ruang</i></u> 1. Peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Provinsi Banten; 2. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Provinsi Banten; 3. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Provinsi Banten;	- Peningkatan perizinan permukiman dan jaringan - Peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan khususnya permukiman dan jaringan	<u><i>Kekuatan (Strength)</i></u> - SOP Perizinan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah ada - Tim Koordinasi Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terbentuk
	<u><i>Strategi Struktur Ruang</i></u> 1. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan; 2. Mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW);		<u><i>Kelemahan (Weakness)</i></u> - Terbatasnya personil dalam pengawasan dan pemantauan secara berkala

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	3. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; 5. Mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Provinsi Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di Kota Cilegon, Tangerang, dan Bandara Panimbang melalui pembangunan jaringan jalan tol;		
Kebijakan dan Strategi pada Pola Ruang	<u>Kebijakan Pola Ruang</u> 1. Peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya; 2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;	- Peningkatan Peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas	<u>Kekuatan (Strength)</u> - Tersedianya sarana dan prasarana

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	3. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; 4. Perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang; 5. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya 6. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; 7. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. <u>Strategi Pola Ruang</u> 1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; 2. Mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;	lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi) - Peningkatan keahlian SDM khususnya terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)	pendukung (ruang kantor yang luas & kendaraan operasional) - Tersedianya SDM Profesional yang siap di latih <u>Kelemahan (Weakness)</u> - Masih terbatasnya sarana pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi) - SDM yang ada belum memiliki keahlian khusus terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi)

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	3. Menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Provinsi Banten paling sedikit 30% dari luas wilayah. 4. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; 5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 6. Mengelola sempadan sungai untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan pada pinggir sungai dan tidak terganggunya aliran sungai dan beban di kawasan sekitarnya; 7. Mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai; 8. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung serta kawasan bekas pertambangan harus direhabilitasi menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;		

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	9. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat; 10. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan; 11. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut; 12. Mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.		
	<u>Kebijakan Kawasan Strategis</u>		

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
Kebijakan dan Strategi pada Kawasan Strategis	1. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan. 2. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan Ramsar; 3. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional; 4. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan; <u>Strategi Kawasan Strategis</u> 1. Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan	- Peningkatan kualitas lingkungan & pelestarian keanekaragaman hayati - Peningkatan nilai kawasan - Peningkatan nilai ekonomi masyarakat disekitar kawasan	<u>Kekuatan (Strength)</u> - Tersedianya tenaga-tenaga operasional hingga ditingkat UPTD dan Balai <u>Kelemahan (Weakness)</u> - Terbatasnya tenaga dan dukungan sarana prasarana karena luasnya kawasan yang dikelola

RTRW	Telaah Isi	Analisis Kebutuhan Sesuai dengan Fungsi & Tugas OPD	Analisis Kekuatan & Kelemahan OPD
1	2	3	4
	strategis Provinsi Banten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya; 2. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota. 3. Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya; 4. Meningkatkan kepariwisataan; 5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 6. Mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif;		

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada hasil analisis SWOT (faktor internal; kekuatan dan kelemahan) berdasarkan tugas dan fungsi OPD. Lebih rinci seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Penentuan Isu-isu strategis

No	Objek Telaah	Analisis Kebutuhan	Isu-isu Strategis
1	2	3	4
1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD/OPD	- Penyusunan RPPLH, KLHS, dan KRP - Penyusunan Rencana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan - Penyusunan rencana pengelolaan limbah B3 - Inventarisasi izin PPLH - Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal - Inventarisasi dan penyelesaian pengaduan dan konflik terkait lingkungan hidup - Penyelenggaraan Diklat dan penyuluhan - Inventarisasi dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup - Pengelolaan Sampah dan penetapan TPA - Implementasi KEHATI - Peningkatan program rehabilitasi - Peningkatan program perlindungan tumbuhan - Peningkatan kapasitas SDM - Peningkatan program pemberdayaan masyarakat	- Kualitas lingkungan hidup - SDM & Infrastruktur - Konflik kawasan hutan - Keanekaragaman hayati - Masyarakat Hukum Adat (MHA)

No	Objek Telaah	Analisis Kebutuhan	Isu-isu Strategis
1	2	3	4
		- Inventarisasi dan penetapan MHA dan pengakuan kearifan lokal - Peningkatan kapasitas kelembagaan OPD - Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup& kehutanan	
2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	- Peningkatan SDM - Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD - Peningkatan Infrastruktur - Peningkatan akses pendidikan - Peningkatan akses kesehatan - Peningkatan pertumbuhan ekonomi	- SDM, kapasitas kelembagaan & infrastruktur - Akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi
3	Telaahan Renstra Kementerian LHK	- Peningkatan sarana prasarana pengukuran & pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>) - Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga surveyor dan laboran terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan - Peningkatan kapasitas kelembagaan/ OPD terkait pengukuran & pemantauan kualitas	- Sarana prasarana pengukuran & pemantauan kualitas lingkungan (<i>digital equipments</i>) - SDM & kapasitas kelembagaan
4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	- Peningkatan perizinan permukiman dan jaringan - Peningkatan pengawasan pengelolaan	- Perizinan & pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

No	Objek Telaah	Analisis Kebutuhan	Isu-isu Strategis
1	2	3	4
		lingkungan khususnya permukiman dan jaringan - Peningkatan Peralatan pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi) - Peningkatan keahlian SDM khususnya terkait pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah dan vegetasi) - Peningkatan kualitas lingkungan & pelestarian keanekaragaman hayati - Peningkatan nilai kawasan - Peningkatan nilai ekonomi masyarakat disekitar kawasan	- Peralatan pengukuran (<i>digital equipment</i>) - Nilai ekonomi kawasan hutan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengurangi nilai ekonomi dan ekologi sumberdaya tersebut atau dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan.

Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat makhluk hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lain sedangkan kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang lestari diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten saat ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten yang akan datang.

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni : **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”**.

Misi SKPD/OPD tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan demikian Misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2017-2022, adalah **Misi ke-1 (satu) dan Misi ke-5 (lima)** yaitu:

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Misi ke-5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Tabel 4.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang terkait tugas dan fungsi DLHK Provisni Banten

Visi	Misi ke-
1	2
Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah	1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
	5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau ingin dicapai dimana organisasi/lembaga bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang.

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan maupun mempermudah alokasi penempatan sumber daya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal. Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun Tujuan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada misi ke-1 adalah : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif,

efisien,transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat, serta Tujuan RPJMD yang mengacu kepada misi ke-5 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Meningkatkan Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal.

Mengacu kepada Tujuan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Tujuan Renstra yang mengacu kepada Misi ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

Adapun Tujuan Renstra yang mengacu pada Misi ke-5 dan tujuan RPJMD, yaitu : Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem.

Tujuan dalam Renstra ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi terakait, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Agar tujuan tersebut dapat terwujud dengan baik dan tepat waktu, maka dirumuskan sasaran nya antara lain : 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien. 2) Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas 3) Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal. Adapun Tujuan, Sasaran serta indikatornys dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	B	BB	BB	A	A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem		1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6	6,2	6,4	6,7	7
			2. Tingkat Inflasi (%)	3,7	4,2	4	4	4
		1. .Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	44,17	44,67	50,87	51,83	52,79
		2. Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (%)	31,21	31,71	32,21	32,71	33,21

Pengukuran indikator kinerja sasaran dilakukan dengan pendekatan pengukuran setiap indikator, sebagai berikut:

1. Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022, adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien Aspek penilaian meliputi;

Tabel 4.3 Aspek penilaian indikator Capaian SAKIP

Komponen	Bobot	Sub Komponen
Perencanaan Kinerja	35%	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
Pengukuran Kinerja	20%	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran,Implementasi Pengukuran
Pelaporan Kinerja	15%	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
Evaluasi Internal	10%	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
Pencapaian Kinerja	20%	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya

2. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air dan hutan. Pengukuran IKLH dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKLH Provinsi} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$

Keterangan:

IKLH Provinsi = Indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi

IPA = Indeks pencemaran air

IPU = Indeks pencemaran udara

ITH = Indeks tutupan hutan

3. Indikator Rasio Cakupan Tutupan Hutan adalah Perbandingan Luas Tanaman Hutan ditambah dengan Luas Hutan Rakyat dibagi Luas Provinsi Banten. Pengukuran Rasio Cakupan Tutupan Hutan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Tutupan Hutan} = \frac{LTH + LHR}{\text{Luas Provinsi}} \times 100\%$$

Ketetangan :

LTH = Luas Tanaman Hutan

LHR = Luas Hutan Rakyat

Data: BPS/Banten Dalam Angka

Keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan harus senantiasa terjaga dengan baik dan berkelanjutan, serta dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

5.1 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga dimaknai sebagai rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi/lembaga dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama (*ultimate goals*) dari organisasi/lembaga dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, 1989). Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan kedepan. Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.

Adapun Strategi yang relevan dengan Kebijakan dalam pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Banten serta berkaitan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat
2. Meningkatkan pengendalian pengawasan Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung
4. Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menetapkan beberapa *Strategi* yang sesuai dan relevan terhadap kebijakan dan program dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yakni;

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat;
4. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan hal yang terkait dengan pembangunan daerah, Arah kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai arah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak pada masyarakat luas (Woll, 1966). Lebih jauh disebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai suatu lembaga yang mempengaruhi sebuah kehidupan masyarakat. Lebih rinci menurut Henz dan Kenneth (1973) bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Penyusunan suatu kebijakan pemerintah (kebijakan publik) yang kompleks tidaklah mudah, banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan/pembentukannya Arah Kebijakan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Banten terkait strategi terkait diatas adalah :

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan.
2. Peningkatan Kualitas Air dan Udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
3. Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
4. Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tentunya mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022, akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dan pembangunan Provinsi Banten secara umum.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan serta indikatornya, agar dalam pelaksanaan dapat terukur dengan baik. Program yang disusun dalam Renstra ini, disesuaikan dengan bidang urusan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Secara lengkap strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan pada Renstra Tahun 2017-2022 sebagaimana tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022**

Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAKUL KARIMAH

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	1.Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	2.Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	1. Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan

	3. Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat	1. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten
		2. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan	2. Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 terdiri atas 5 (lima) program utama yakni; 1) Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 2) Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 3) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 4) Program Pengendalian Das dan konservasi hutan dan 5) Program tata kelola pemerintahan.

Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dimaksudkan untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan, Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketaatan para pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup, Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dimaksudkan untuk merencanakan serta penatagunaan Hutan di Provinsi Banten serta peningkatan pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan dan Program Pengendalian Das dan konservasi hutan dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi sumberdaya alam, ekosistem dan keekaragaman hayati, khususnya kawasan hutan. Sedang program tata kelola pemerintahan, dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin *good governance*.

Mengacu pada kelima program tersebut, disusun kegiatan dan sub kegiatan. Total kegiatan DLHK adalah 32 kegiatan ditambah dengan 2 kegiatan DAK (DAK Bidang Lingkungan Hidup dan DAK Bidang Kehutanan), adapun rinciannya terdiri dari; 5 kegiatan untuk program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 3 kegiatan untuk program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 5 Kegiatan untuk Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, 9 Kegiatan untuk Program Pengendalian Das dan konservasi hutan dan 10 Kegiatan untuk Program Tata Kelola Pemerintahan. Rincian Program, Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (output) disajikan sebagai berikut::

Tabel 6.1 Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu
		2. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten
		3. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
		4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	1 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
			2 Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna
			3 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna
			4 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna
			5 Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
			6 Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna
			7 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna
2	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air 2 Indeks Kualitas Udara	1 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan
			2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
			3 Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP
		3. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	1 Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan 2 Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Jumlah parameter akreditasi/Survailan dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025 Tahun 2017 Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
3	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	1 Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP
			2 Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP
			3 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
4	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	1 Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan
			2 Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan
			3 Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
		2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai SOP
		3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP
5	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) 2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	1 Pengelolaan DAS	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan pedoma teknis

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
			2 Konservasi SDA dan Ekosistem	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari
			3 Penyuluhan Kehutanan	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan, dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi
		3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	1 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
			2 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP
		4. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	1 Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target
		5. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	1 Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target
		6. Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	1 Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar

NO	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
			2 Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan atau capaian yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Kinerja (*performance*) merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Kinerja dapat digambarkan secara kuantitas maupun kualitas sesuatu yang dihasilkan atau dicapai dari kegiatan atau program.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus senantiasa selaras dengan tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, serta relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu yakni tahun 2017-2022.

6.3 Kelompok Sasaran

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ditujukan untuk kelompok sasaran:

1. Kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan dan merusak hutan.
2. Kelompok masyarakat/stakeholders yang berperan aktif dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Masyarakat Provinsi Banten secara umum.

6.4 Pendanaan Indikatif

Sumber pendanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2017-2022, berasal dari dana APBD dan APBN. Pendaan menjadi sangat penting guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud.

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	3 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1205.01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	2,5 Skala	2,50		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Meningkatnya Pelayanan Rakyat	1 Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter) 1 Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter) x 100 %
					2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
					3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administratif perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
					4 Persentase lewajudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
					5 Persentase lewajudnya pemenuhan anggaran dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			1205.120501.00.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asat	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 dok	17,00	47.564.000,00	17,00	64.000.000,00	8,00	64.000.000,00	8,00	77.250.000,00	8,00	77.250.000,00	35,00	330.064.000,00	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asat yang akurat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang akurat
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)	2 dok	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk semester 1 dan 2	
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 dok	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00			
			1205.120501.00.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	1 Dokumen	3,00	167.300.000,00	3,00	270.000.000,00	3,00	450.000.000,00	3,00	618.000.000,00	3,00	618.000.000,00	15,00	2.123.300.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Program Kegiatan
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	9,00		9,00		10,00		10,00		10,00		45,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan	
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	
					4 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	3 Dokumen	0,00		0,00		5,00		4,00		4,00		13,00		Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	
					5 Penyusunan Renstra DLHK	1 Dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		Jumlah Dokumen Renstra DLHK	
			1205.120501.00.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 paket	1,00	224.300.000,00	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	374.300.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rensra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00	2.119.315.000,00	12,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3.119.315.000,00		
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Seluruh	12 bulan	12,00	5.738.080.000,00	12,00	6.052.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11.790.535.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak Tetap	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Fasilitas Administrasi Kepegawaian	173 aparatur	173,00	130.000.000,00	173,00	113.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	529.000.000,00	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten	
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	173 aparatur	173,00		173,00		0,00		0,00		0,00		0,00			Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang efektif dan efisien
					3 Fasilitas Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00		0,00		15,00		15,00		15,00		15,00			Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur
					4 Peningkatan Kompetensi Aparatur	0 dokumen	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
			1205.120501.00.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 bulan	12,00	1.486.788.100,00	12,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.686.788.100,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.008	Peningkatan Pengelolaan Keasraipan dan Pelayanan Perpusakaan	1 Pengelolaan Keasraipan Dinas	0 bulan	12,00	43.650.000,00	12,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	12,00	226.650.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Keasraipan dan Pelayanan Perpusakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	
					2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas	0 bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Keasraipan dan Pelayanan Perpusakaan
					3 Pengelolaan Keasraipan dan Perpustakaan OPD	0 Bulan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
			1205.120501.00.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	0 Tersedianya Data Pembangunan Sektoral	3 dok	3,00	236.450.000,00	3,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	416.450.000,00		
					1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					3 Pengelolaan PPID	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					4 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.010	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 paket	1,00	27.000.000,00	1,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	927.000.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.01.011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	390.000.000,00	12,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	890.000.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium	0 Unit	52,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52,00			
			1205.120501.00.01.012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	459.300.000,00	12,00	354.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	813.600.000,00		
					1 Operasional Perkantoran	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.013	Rapel Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	125.860.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	145.860.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.014	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	1 paket	1,00	322.750.000,00	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	372.750.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	0 Paket	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			1205.120501.00.01.015	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	250.075.000,00	12,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	370.075.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.01.016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	287.512.000,00	12,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	487.512.000,00		
					1 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHDUPHDN	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Operasional kantor Tidak tetap	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					8 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.017	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	90.000.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	110.000.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.018	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 paket	1,00	350.000.000,00	1,00	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	457.700.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.019	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 bulan	12,00	200.000.000,00	12,00	110.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	310.100.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 bulan	12,00	297.400.000,00	12,00	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	757.400.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.01.021	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	12,00	43.900.000,00	12,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	96.900.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.022	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 paket	1,00	200.000.000,00	1,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	270.000.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.023	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 bulan	12,00	140.000.000,00	12,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	270.000.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran padaBPHW-PSC	0 bulan	12,00	314.200.000,00	12,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	539.200.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak Tetap	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.025	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	12,00	100.000.000,00	12,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	145.000.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.026	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Taman Hutan Raya Banten	1 paket	1,00	41.450.000,00	1,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	176.450.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.01.027	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	12 bulan	12,00	180.000.000,00	12,00	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	335.000.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 bulan	12,00	247.365.000,00	12,00	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	365.365.000,00			
					1 Operasional kantor Tidak Tetap	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					7 Penyediaan SDM	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.029	Rapel Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	12 bulan	12,00	84.460.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	104.460.000,00			
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00	0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.040	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8.064.620.000,00	7,00	7.943.060.000,00	7,00	7.943.060.000,00	7,00	23.950.740.000,00	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah Kegiatan penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Berkehangapan dan Berdaya Guna	
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
					4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah kegiatan Perjalanan dinas ke dalam dan keluar daerah	
			1205.120501.00.01.047	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Lingkungan	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.759.495.000,00	5,00	927.000.000,00	5,00	927.000.000,00	5,00	3.613.495.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah Kegiatan Penyediaan barang dan jasa Perkantoran pada UPTD Lab Lingkungan
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor pada UPTD Lab Lingkungan	
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	
					4 Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumah kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.01.045	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	839.000.000,00	6,00	827.000.000,00	6,00	827.000.000,00	6,00	2.469.000.000,00	Tertekannya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Terlaksananya penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
					2. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	
					3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	
					4. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	
			1205.120501.00.01.049	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.769.650.000,00	11,00	827.000.000,00	11,00	827.000.000,00	11,00	2.623.650.000,00	Tertekannya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
					2. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	
					4. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	
			1205.120501.00.01.050	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.008.735.000,00	6,00	827.000.000,00	6,00	827.000.000,00	6,00	2.952.735.000,00	Tertekannya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
					2. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	
					3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	
					4. Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	
			1205.120501.00.01.051	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	470.000.000,00	6,00	827.000.000,00	6,00	827.000.000,00	6,00	2.324.000.000,00	Tertekannya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
					2. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	
					3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	
					4. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga hutan dan fungsi hutan, menyediakan hutan ulu sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1205.15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203 Kelompok	52,00		60,00		0,00		0,00		0,00		112,00		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan pelayanan laboratorium lingkungan	
					2. Indeks Kualitas Air	31 Nilai	51,50		52,00		52,50		53,00		53,50				Akar ((C/L1)m2 + (C/L1(R2)2	
					3. Indeks Kualitas Udara	55.6 Nilai	59,00		59,10		66,60		66,60		70,60		70,60		((IPU_NO2+ (IPU_SO2)/2	
					4. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	0 %	0,00		0,00		16,90		17,60		19,00		19,00		(% IK Peningkatan Kompetensi+ % IK Pelayanan+ % IK Saprta+ % IK Barapa+ % IK Riskor)(Total % IK) x 100	
			1205.120501.00.15.001	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota	0 Dokumen	1,00	1.212.092.800,00	0,00	503.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	1,00	3.215.092.800,00	Tertaksennya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi	
					2. Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan		
					3. Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (SIKUAL)	0 Dokumen	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					4. Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5. Pemantauan Kualitas Air Laut	0 Lokasi	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6. Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri	0 Peserta	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					7. Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	0 Dokumen	6,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8. pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	0 Lokasi	0,00		17,00		0,00		0,00		0,00		17,00			
					9. pemantauan kualitas udara ambien	22 Lokasi	22,00		22,00		0,00		0,00		0,00		22,00			
					10. penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	0 Dokumen	3,00		1,00		1,00		1,00		1,00		7,00	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan		
					11. Pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	40 Industri	40,00		120,00		0,00		0,00		0,00		160,00			
					12. pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	0 Dokumen	6,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Jumlah Dokumen pemantauan kualitas air dan kerusakan situ/danau		
					13. pemantauan kualitas udara ambien	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	Jumlah Dokumen pemantauan kualitas udara ambien		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.15.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Penetapan Kebijakan dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah	0 Dokumen	1,00	748.000.000,00	0,00	1.154.000.000,00	0,00	1.180.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1,00	6.280.000.000,00	Tertakutangnya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah B3 dan limbah B3 sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah dan limbah B3	
					2. Fasilitas kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, koordinasi, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3. pembinaan teknis pengelolaan limbah B3	0 Peserta	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4. Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5. Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemantauan Limbah B3	0 Industri	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					6. Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (Industri, sayurkes dan hotel)	0 Penghasil Limbah B3	75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00			
					7. Pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	0 Penghasil Limbah B3	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8. Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	0 Dokumen	0,00		1,00		1,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	
					9. Pengelolaan sampah	2 Lembaga	1,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
					10. Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	40 Industri	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					11. Pengelolaan sampah	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan pembinaan dan pengelolaan sampah	
					12. Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan industri pengelola limbah B3 yang diawasi dan dievaluasi. 1 dokumen per tahun	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.15.003	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1 Penyusunan profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang pasca tambang	0 Dokumen	1,00	1.239.000.000,00	0,00	480.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	666.132.500,00	0,00	666.132.500,00	1,00	3.591.265.000,00	Terselenggaranya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi lahan dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi berbasis geospasial, dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP	
					2 Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang pasca tambang	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00				1,00			
					3 Sosialisasi terpadu kampung iklim	0 Kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Kegiatan Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Studi kelayakan pembentukan kawasan mangrove center	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Rapat koordinasi program pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	0 Dokumen	8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					8 Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					9 Pengembangan Mangrove provinsi Banten	0 Dokumen	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00			Jumlah Dokumen Pengembangan mangrove provinsi Banten
					10 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	0 Dok	0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					11 Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	0 Lokasi	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					12 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (kampung iklim)	16 Kampung	32,00		16,00		0,00		0,00		0,00		48,00			
					13 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	1 Laporan	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					14 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservasi dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari
					15 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kampung kampung iklim dari laporan pemantauan pengawasan Bahan Beracun Organik (BBO)
					16 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.13.004	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	0 Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP	100 %	100,00	530.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	860.000.000,00		
					1 Tata Kerja Sekretariat Semu Penilai Andal	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					2 Penetapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSOM Provinsi Banten	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Niwastifa Tantra)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan dan kinerja pengelolaan lingkungan	0 dok	0,00		7,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					10 Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	130 orang	0,00		130,00		0,00		0,00		0,00		130,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.15.005	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	0 Tertanganinya penanganan kasus - kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP	100 %	100,00	450.640.000,00	100,00	325.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	813.640.000,00		
					1 Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha Kegiatan di Provinsi Banten	0 Usaha/ Kegiatan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					2 Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					3 Peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	0 Industri	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00			
					6 Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 kasus/%	20,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					7 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200 Industri	165,00		100,00		0,00		0,00		0,00		210,00			
					8 Pengawasan dan pendataan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	0 Industri	165,00		44,00		0,00		0,00		0,00		105,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.15.006	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	0 meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai SOP	100 %	100,00	248.310.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	768.310.000,00		
					1 Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	0 Sekolah	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					2 Berekam Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional dan Mandiri	0 Orang	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					3 Verifikasi dan penilaian Green School	0 Sekolah	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					4 Pemantauan Adipura	0 Kab/Kota	7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					5 Pemberdayaan masyarakat hukum adat di Provinsi Banten	0 Kelompok	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Pembinaan Saka Wana Bhakti	0 satuan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Pembinaan Saka Kalpataru	0 satuan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	188 Sekolah	25,00		25,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					9 Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	7 Kota	7,00		7,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					10 Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	3 Kelompok/ Saka	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
			1205.120501.00.15.007	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	1 Bimbingan Teknis K3 (Keselamatan Keselamatan Kerja)	0 org	25,00	301.310.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	25,00	1.576.310.000,00	Prosentase peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025 Tahun 2017	
					2 Pelatihan Berbayar	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					3 Bimbingan Teknis ISO 17025	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					4 Bimbingan Teknis Parameter BOD	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					5 Uji Profesional	0 org	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Akreditasi Audit eksternal	0 Dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Bimbingan Teknis Parameter COD	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					8 Bimbingan Teknis Parameter Pestisida	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					9 Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					10 Akreditasi Surveilans	0 parameter	0,00		25,00		30,00		35,00		40,00		40,00		Jumlah Parameter Akreditasi Surveilans	
					11 Jaminan mutu laboratorium lingkungan	0 org	0,00		150,00		0,00		0,00		0,00		150,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Bub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1205.120501.00.15.008	Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	1. Rapel Teknik Analisa dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran	0 1 kali	1,00	579.823.100,00	0,00	882.900.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	1,00	2.262.723.100,00	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu	
					2. Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumen Laboratorium	0 jenis	34,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,00			
					3. Pengolahan Limbah Laboratorium	0 bulan	12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4. Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	0 sample	144,00		174,00		174,00		234,00		234,00		234,00		Jumlah Pengambilan sampel pengujian dan Analisa Sampel Internal	
					5. Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal	50 Industri	50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					6. Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal	0 Sample	0,00		0,00		25,00		50,00		50,00		50,00		Jumlah Pengambilan Sampel dalam pelayanan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan eksternal	
			1205.120501.00.15.014	DAK Lingkungan Hidup	0. Meningkatnya ketersediaan pengadaan sarana dan prasarana lab Lingkungan Hidup sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017	0 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00		
					1. Pengadaan sarana prasarana lab lingkungan	0 paket	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			
Merjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga hutan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawal keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1205.16	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Penertiban ketetapan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	0 %	0,00		0,00		95,00		95,00		100,00		100,00		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketetapan terhadap Peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha yang diperkasi / jumlah pelaku usaha yang melanggar Jumlah yang melanggar x 100 %
					2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203 Kelompok	0,00		0,00		65,00		75,00		75,00		222,00		Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga Masyarakat Hukum Adat	
			1205.120501.00.16.001	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	1. Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	300.000.000,00	8,00	300.000.000,00	8,00	300.000.000,00	24,00	950.000.000,00	Tersusunnya perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup sesuai SOP	Jumlah Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan
					2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dan disetujui	
					3. Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan pemberian izin lingkungan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen penilaian dokumen lingkungan dan pemberian izin lingkungan	
			1205.120501.00.16.002	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	1. Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	400.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	3,00	1.000.000.000,00	Terlaksananya penanganan kasus - kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketetapan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kesehatan
					2. Pengawasan dan pengendalian terhadap ketetapan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketetapan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	
			1205.120501.00.16.003	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	1. Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	400.000.000,00	25,00	331.767.500,00	25,00	331.767.500,00	75,00	1.063.535.000,00	meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai SOP	Jumlah Lembaga Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dibentuk
					2. Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	0 Lembaga	0,00		0,00		7,00		7,00		7,00		7,00		Jumlah lembaga Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibentuk dan dinilai	
					3. Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	5 Lembaga	0,00		0,00		2,00		5,00		5,00		5,00		Jumlah Lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1. Peningkatan Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	35 %	10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					2. Luas Lahan kritis yang terakumulasi	69466 Ha	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00			
			2004.120501.00.15.001	Perencanaan dan penatagunaan hutan	0. Terwujudnya perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan	100 %	100,00	290.000.000,00	100,00	415.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	705.000.000,00		
					1. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					2. Penyusunan Statistik Kehutanan	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3. Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4. Pemanfaatan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5. Fasilitas dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	0 Dokumen	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					6. Perencanaan hutan	2 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					7. Pemanfaatan kawasan hutan	6 KPH	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			2004.120501.00.15.002	Pemanfaatan hutan dan penatgunaan hasil hutan	0. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan	100 %	100,00	339.020.000,00	100,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	799.020.000,00		
					1. Peningkatan Kapasitas Kelompok PMU	0 Kelompok	21,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21,00			
					2. Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Unit - unit Manajemen Hutan Rakyat (PMU)	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara manual dan online	0 Industri	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					4. Bimbingan Teknis Pembinaan Pelupasan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Hutan Kehutanan (WASGANGSDAN GANIS PHPL)	0 Industri	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00			
					5. Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	15 Kelompok	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6. Penatausahaan hasil hutan	150 Industri	180,00		180,00		0,00		0,00		0,00		180,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.15.003	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	0 Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	100 %	100,00	507.840.500,00	100,00	606.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.114.090.500,00		
					1 Pameran Indogreen Forestry Expo	1 Komoditas	8,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8,00			
					2 Pameran Banten Expo	1 Komoditas	6,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6,00			
					3 Pelatihan Pengolahan Gura Aren Menjadi Gula Semul	0 Orang	80,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	80,00			
					4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	0 Orang	40,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	40,00			
					5 Pelatihan Budidaya Lebah Madu	0 Orang	20,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	20,00			
					6 Pengembangan aneka usaha kehutanan	36 Komoditas	0,00		3,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3,00			
					7 Pengembangan kawasan bambu terpadu	0 Dok	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00			
					8 Promosi aneka usaha kehutanan	2 Event	0,00		3,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3,00			
			2004.120501.00.15.004	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Terlaksananya pengelolaan DAS	100 %	100,00	764.100.000,00	100,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.384.100.000,00		
					1 perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	3 dok	2,00		2,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4,00			
					2 Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	0 Ha	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.000,00			
					3 Rehabilitasi wilayah Daerah aliran Sungai (DAS)	0 DAS	1,00		1,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2,00			
					4 Penghijauan lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3000 batang	3.000,00		3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00			
					5 Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Tahapan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)	0 dok	1,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00			
					6 Pembinaan Forum DAS	3 forum	3,00		6,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120901.00.15.003	Konservasi SDA dan Ekosistem	0 Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari	100 %	100,00	319.015.500,00	100,00	373.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	693.015.500,00		
					1 Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata Alam di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	0 angkatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pembentukan Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satewa Liar di Provinsi Banten	0 unit	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 angkatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Sosialisasi Mitigasi Bencana di Sektor Kawasan Hutan	0 angkatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					5 Pemulihan kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi	0 unit	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Pengendalian Penangkaran tumbuhan dan satwa liar	50 org	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					7 Penanganan daerah penyangga kawasan konservasi	10 Kelompok	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					8 Pemberdayaan Lembaga konservasi	0 lembaga	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					9 Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem satwa	0 dok	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					10 Perencanaan dan pembentukan taman kehutanan	0 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					11 Perencanaan pembentukan lembaga konservasi Ex Situ	0 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.15.006	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan dan Kelembagaan Kehutanan.	100 %	100,00	454.000.000,00	100,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	904.000.000,00		
					1 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	0 Orang	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					2 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	0 KTH	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					3 Lomba Wana Lestari	0 Event	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan	0 KTH	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00			
					5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	0 orang	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					6 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	35 orang	0,00		36,00		0,00		0,00		0,00		36,00			
					7 Peningkatan peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	34 Kelompok	0,00		36,00		0,00		0,00		0,00		36,00			
					8 Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	0 orang	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					9 Pengembangan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	34 Kelompok	0,00		43,00		0,00		0,00		0,00		43,00			
10 Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	1 dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00								
			2004.120501.00.15.007	Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	100 %	100,00	620.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	620.700.000,00		
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)	0 Unit	8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					3 Binaf Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		1.250,00		0,00		0,00		0,00		1.250,00			
					5 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	0 Kelompok	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	32 Industri	0,00		32,00		0,00		0,00		0,00		32,00			
					7 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	0 Peragkar/ Pengedar	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			2004.120501.00.13.008	Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Serang dan Cilegon	100 %	100,00	532.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	532.800.000,00		
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00			
					2 Penghijauan Lingkungan (MPTG)	0 Batang	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00			
					3 Pembuatan Kebun Bibit Daga (KBD)	0 Unit	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00			
					4 Simlek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00			
					5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		730,00		0,00		0,00		0,00		0,00	730,00			
					6 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	5 Kelompok	0,00		9,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9,00			
					7 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	0,00		81,00		0,00		0,00		0,00		0,00	81,00			
					8 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan sasar liar yang tidak dilindungi	5 Penagkar/ Pengedar	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00			
			2004.120501.00.13.009	Pengelolaan Hutan wilayah Lebak	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak	100 %	100,00	826.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	826.000.000,00		
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00			
					2 Pembuatan Kebun Bibit Daga (KBD)	0 Unit	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00			
					3 Simlek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00			
					4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		1.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.950,00			
					5 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Kelompok	0,00		21,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21,00			
					6 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan sasar liar yang tidak dilindungi	20 Industri	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00			
			2004.120501.00.13.010	Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang	100 %	100,00	376.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	376.000.000,00		
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00			
					2 Penghijauan Lingkungan (MPTG)	0 Batang	7.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.000,00			
					3 Pembuatan Sumur Resapan	0 Unit	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00			
					4 Simlek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00			
					5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00			
					6 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	0,00		82,00		0,00		0,00		0,00		0,00	82,00			
					7 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan sasar liar yang tidak dilindungi	0 Penagkar/ Pengedar	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.15.011	Pengembangan Pembibitan Tanaman Hutan	0 Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar	0 %	100,00	466.000.000,00	100,00	503.750.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	969.750.000,00		
					1 Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS	145000 batang	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		1.000.000,00			
					2 Penelusuran sumber benih unggul	0 Lokasi	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					3 Bimbingan teknis pengelolaan perbibitan tanaman hutan dan MPTS	0 orang	80,00		80,00		40,00		60,00		60,00		330,00			
					4 Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan endemik Banten	0 Jenis	5,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					5 Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul	0 Unit	3,00		3,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					6 Monitoring dan Evaluasi penyalur bibit tanaman kehutanan dan MPTS	0 Kab/ Kota	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
			2004.120501.00.15.012	Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan	0 Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit Benih Tanaman Kehutanan	100 %	100,00	82.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82.150.000,00		
					1 Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan	0 Orang	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					2 Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan	0 Unit	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					3 Pembinaan pengada, pengedar bibit/bibit tanaman hutan (orang)	11 Orang/ Pengelola	26,00		30,00		0,00		0,00		0,00		26,00			
					4 Pengawasan benih tanaman hutan	0 benih	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					5 Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Batang	500,00		10.500,00		0,00		0,00		0,00		11.000,00			
			2004.120501.00.15.013	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	100 %	100,00	320.000.000,00	100,00	271.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	591.000.000,00		
					1 Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	1505,9 Ha	1.505,90		1.505,90		0,00		0,00		0,00		1.505,90			
					2 Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	200 Hektar	32,00		32,00		0,00		0,00		0,00		32,00			
					3 Penyediaan koleksi species lokal/ endemik/ langka/ terancam punah	0 Species	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.15.014	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0 Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RDP	100 %	100,00	211.966.000,00	100,00	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	472.966.000,00		
					1 Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna	0 dokumen	2,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2,00			
					2 Penataan Batas Lapang	0 blok	1,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00			
					3 Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi	0 dokumen	1,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00			
					4 Peningkatan Pengelolaan Objek Wisata dan Peranginan	0 kegiatan	1,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00			
					5 Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar	0 kegiatan	2,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2,00			
					6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat	0 kegiatan	1,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00			
					7 Rintisan dan Peningkatan Kolaborasi Kerjasama Kegiatan	0 kegiatan	1,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00			
					8 Peningkatan Kunjungan TAHURA Banten	25000 orang	0,00		39.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	39.500,00			
					9 Sarana dan Prasarana Fasilitas Pemanfaatan Wisata	2 unit	0,00		2,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2,00			
			2004.120501.00.15.015	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)	0 Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan	100 %	100,00	2.312.000.000,00	100,00	1.407.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.545.000,00		
					1 pengembangan hutan rakyat	0 ha	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00	600,00			
					2 penghijauan lingkungan (MPTS)	0 batang	10.500,00		10.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	21.000,00			
					3 pengembangan komoditas unggulan tanaman kehutanan	0 ha	6,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6,00			
					4 Rehabilitasi Lahan Secara Sipil Teknis	0 unit	6,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6,00			
			2004.120501.00.15.016	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	0 Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan bibit Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160.000.000,00		
					1 Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang)	0 Orang/ Pengelola	0,00		30,00	0,00		0,00		0,00		0,00	30,00			
					2 Pengawasan benih tanaman hutan	0 lap	0,00		5,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5,00			
					3 Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Batang	0,00		10.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10.500,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.15.017	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Labak dan Tangerang	0 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Labak dan Tangerang sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	250.500.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	250.500.000,00		
					1 Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 Dokumen	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0 pelaku usaha	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					3 Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan	0 Industri	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					4 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 Penangkar	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					5 Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 Orang	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					6 Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0 Orang	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
			2004.120501.00.15.018	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	225.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	225.000.000,00		
					1 Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 Dokumen	0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					2 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0 pelaku usaha	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			2004.120501.00.15.019	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Labak dan Tangerang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Labak dan Tangerang sesuai target	0 %	0,00	0,00	100,00	1.154.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.154.400.000,00		
					1 Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Sosial	0 Unit	0,00		15,00		0,00		0,00		0,00		15,00			
					2 Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan	0 Kelompok	0,00		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
					3 Monitoring dan Evaluasi Perubahan	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.15.020	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai Target	0 %	0,00	0,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.300.000.000,00		
					1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar	0,00		23,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00			
					2 Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	3 Kelompok	0,00		2,00		6,00		6,00		11,00		25,00			
					3 Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	1 Dokumen	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00			
			2004.120501.00.15.021	Pengelolaan DAS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.00.15.022	Penyuluhan Kehutanan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Merjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga lutan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1 Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	0 %	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Meningkatnya fungsi lahan dan hutan	(25% x realisasi pemanfaatan kawasan)+(50% x realisasi hasil hutan kayu)+(25% x Realisasi HHBK) / (baseline pemanfaatan kawasan + baseline hasil hutan kayu + baseline HHBK) x 100 %
					2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Kelompok	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Ket. Pemberdayaan, Ket. Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, ket. Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)
					3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Kelompok	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Ket. Pemberdayaan, Ket. Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, ket. Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)
			2004.120501.00.16.001	Perencanaan dan penatagunaan hutan	1 Perencanaan hutan	2 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300.000.000,00	4,00	400.000.000,00	4,00	400.000.000,00	11,00	1.100.000.000,00	Terwujudnya perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan	Jumlah dokumen perencanaan hutan (Dok)
					2 Pemantapan kawasan hutan	6 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Kawasan Hutan (dok)	
			2004.120501.00.16.002	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	1 Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	3,00	1.100.000.000,00	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan	Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri
					2 Penatausahaan hasil hutan	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	
			2004.120501.00.16.003	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	1 Pengembangan dan Promosi aneka usaha kehutanan	0 Komoditas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300.000.000,00	3,00	441.152.000,00	3,00	441.152.000,00	3,00	1.182.304.000,00	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	Jumlah komoditas usaha kehutanan
					2 Pengembangan kawasan bambu terpadu	0 Komoditas	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Komoditas Pengembangan kawasan bambu terpadu	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.16.004	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200.000.000,00	3,00	200.000.000,00	3,00	200.000.000,00	9,00	760.000.000,00	Tertekannya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi
					2. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	
					3. Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	
					4. Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	
			2004.120501.00.16.005	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200.000.000,00	3,00	200.000.000,00	3,00	200.000.000,00	9,00	760.000.000,00	Tertekannya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi
					2. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	
					3. Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	
					4. Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	
Merjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga hutan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1. Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.17	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan DAS)	0 %	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00	Meningkatnya Pendendalian DAS Konservasi Hutan dan luas lahan kritis yang terahabitasi serta Peran serta masyarakat dalam pelestarian, pengelolaan dan konservasi hutan	(Jml Realisasi DAS yang ditangani + Jml Realisasi KEE yang ditangani) / (Jumlah Target DAS + Jumlah Target KEE) x 100 %	
					2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan	0 Kelompok	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat		
					3. Tersedianya benih unggul yang berkualitas bagi masyarakat	0 Batang	0,00		0,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		540.000,00	Jumlah bibit yang terdistribusi		
					4. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	0 %	0,00		0,00		12,50		12,50		12,50		37,50	Kontribusi Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi + Kontribusi Kegiatan Pengembangan dan Pemertanahan X 100 %		
					5. Luas Lahan kritis yang terahabitasi wilayah Lebak dan Tangerang	0 Ha	0,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00	Jml Kebutuhan Biot Hutan Rakyat Murni = 600 bgt/ha Jml Kebutuhan Biot Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 bgt/ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 bgt) ha		
					6. Luas Lahan kritis yang terahabitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Ha	0,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00	Jml Kebutuhan Biot Hutan Rakyat Murni = 600 bgt/ha Jml Kebutuhan Biot Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 bgt/ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 bgt) ha		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.17.002	Konservasi SDA dan Ekosistem	1. Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	450.000.000,00	1,00	450.000.000,00	3,00	1.200.000.000,00	Terbinanya daerah penyangga sumberdaya alam hayati dan ekologi di kawasan konservasi yang terkait	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar
					2. Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		8,00		Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	
					3. Perencanaan Pengolahan data dan Informasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan pengolahan kebakaran hutan dan lahan	
					4. Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	
			2004.120501.00.17.004	Pengembangan Pembinaan Tanaman Hutan	1. Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif	0 Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	850.000.000,00	160.000,00	800.000.000,00	160.000,00	800.000.000,00	160.000,00	2.250.000.000,00	Terdapatnya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar	Jumlah bibit tanaman hutan dan MPTS
					2. Pengembangan Tanaman Hutan dan Produktif	0 Batang	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Jumlah tanaman hutan yang dikembangkan	
			2004.120501.00.17.005	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1. Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,90	250.000.000,00	1.595,90	450.000.000,00	1.595,90	450.000.000,00	1.595,90	1.150.000.000,00	Tertakutnya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	Luas Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA
					2. Rehabilitasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	0 Hektar (Ha)	0,00		0,00		12,50		12,50		12,50		37,50		Luasan rehabilitasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati	
			2004.120501.00.17.006	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1. Pengembangan Kawasan TAHURA Banten	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300.000.000,00	2,00	550.000.000,00	2,00	550.000.000,00	6,00	1.400.000.000,00	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RP-RP	Pengembangan kawasan lahura
					2. Pemanfaatan Kawasan TAHURA Banten	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten	
			2004.120501.00.17.007	Sertifikasi dan Protokol Peredaran Benih Tanaman Hutan	1. Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	3,00	1.300.000.000,00	Tertakutnya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SKPD	Jumlah peserta pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan
					2. Pengawasan benih tanaman hutan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Laporan Pengawasan benih tanaman hutan	
					3. Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	
					4. Pemeliharaan Aliboreum/ kebun koleksi	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Laporan Aliboreum/ kebun koleksi	
			2004.120501.00.17.008	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.275.000.000,00	2.500,00	1.546.778.000,00	2.500,00	1.546.778.000,00	7.500,00	4.368.556.000,00	Tertakutnya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat
			2004.120501.00.17.009	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.275.000.000,00	2.500,00	1.700.000.000,00	2.500,00	1.700.000.000,00	7.500,00	4.675.000.000,00	Tertakutnya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon sesuai Target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat
			2004.120501.00.17.010	Pengelolaan DAS	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monv RHL	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	400.000.000,00	3,00	550.000.000,00	3,00	550.000.000,00	8,00	1.500.000.000,00	Tertakutnya pengelolaan DAS terpadu	Dokumen Perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan dan Monv RHL
					2. Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Laporan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.17.011	Penyuluhan Kehutanan	1 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	0 kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300.000.000,00	2,00	450.000.000,00	2,00	450.000.000,00	2,00	1.200.000.000,00	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi	Jumlah Kelompok peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan (PNS dan Swadaya)
					2 Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	0 kelompok	0,00		0,00		50,00		60,00		70,00		70,00		Jumlah Kelompok Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	
					3 Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	0 kelompok	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		jumlah kelompok Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus senantiasa selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Dalam penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, melakukan penyesuaian Program, tolok ukur kegiatan dan target kinerja.

Indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten disusun secara sistematis dan terkait satu sama lain dengan misi, tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Indikator kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, sangat terkait dengan misi ke-1 dan misi ke-5 dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	Fokus Administrasi Pemerintahan								
3001	Administrasi Pemerintahan								
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	CC	B	BB	BB	A	A	A
2	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1205	Lingkungan Hidup								
2	Emisi Rumah Kaca	Persen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43,67	44,17	44,67	50,87	51,83	52,79	52,79
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
2004	Kehutanan								
2	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Persen	30,60	31,21	31,71	32,21	32,71	33,21	33,21

Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Tata Kelola Pemerintahan								
1	Nilai IKM (Satuan: Skala 1-4)	Skala	2,50	2,8	3,0	0	0	0	3,0
1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	0	0	0	100	100	100	100
2	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0	0	0	100	100	100	100
3	Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	0	0	0	100	100	100	100
4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	0	0	0	100	100	100	100
II	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan								

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Air (nilai)	Nilai	51	51,5	52	52,5	53	53,5	53,5
2	Indeks Kualitas Udara (nilai)	Nilai	58,8	59	59,2	66,8	68,8	70,8	70,8
3	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%		0	0	16,9	17,6	19	19
3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga	203	52	60	0	0	0	112
III	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup								
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga	203	0	0	68	76	78	222
2	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	-	0	0	98	98	100	100
IV	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan								
1	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi	Ha	69.466	5.000	5.000	-	-	-	10.000
2	Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	%	38	10	10	0	0	0	48

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan								
1	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	%	0	0	0	10	10	10	30
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	0	0	0	3	3	3	9
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	0	0	0	3	3	3	9
VI	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan								
1	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	%	0	0	0	20	20	20	60
2	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Klpk	0	0	0	10	10	10	30
3	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	%	0	0	0	12,5	12,5	12,5	37,5
4	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon	ha	0	0	0	2.500	2.500	2.500	7.500

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	ha	0	0	0	2.500	2.500	2.500	7.500
6	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	btg	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada hasil perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang merupakan rangkaian rencana tindak dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2017-2022.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan dengan 4 (empat) tahapan yakni; 1) Tahap Persiapan Penyusunan; 2) Tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; 3) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra dan 4) Tahap Penetapan Perubahan Renstra.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka diperoleh isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah (OPD) yakni; 1) Kualitas lingkungan hidup , 2) SDM dan Infrastruktur, 3) Konflik kawasan hutan, 4) Keanekaragaman hayati, 5) Masyarakat Hukum Adat (MHA), 6) Akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta 7) Nilai ekonomi kawasan hutan. Selanjutnya Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2017-2022 sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni : **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”**. dengan 2 (dua) misi yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni; (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) (2) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran yang terdiri atas; Tujuan (1).

Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, data serta penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran dengan sasarannya adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dan Tujuan (2). Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem dengan sasarannya antara lain : (1) Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon, (2) Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas, (3) Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal

Selanjutnya ditetapkan program dan kegiatan yang terdiri atas; 1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; 2) Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 3) Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 4) Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan 5) Program Tata Kelola Pemerintahan. Program-program tersebut diukur dengan indikator kinerja program (*outcome*) yang meliputi ; 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam satuan nilai/indeks; 2) Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam satuan nilai/indeks; 3) Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan 4) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 5) Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup 6) Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (9) Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS), (10) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan (11) Peningkatan fungsi UPTD TAHURA, (12) Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon, (13) Luas Lahan

kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang, (14) Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (15) Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%), (16) Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, (17) Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, (18) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

Demikian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang dilakukan atas dasar adanya Perubahan RPJMD Pemerintah Banten tahun 2017-2022.

SATKER : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQL KARIMAH
MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
MISI 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

LAMPIRAN 1
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS REVISI RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket					
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi																													
1	Tujuan RPJMD : Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berkasiskan Potensi Ekonomi Lokal					Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				%	5,26	6		6,2		6,4		6,7		7		7		SEKRETARIS DAERAH					
						Tingkat Inflasi (%)				%	2,94	3,7		4,2		4		4		4		4							
		1. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Strategi RPJMD : Mewujudkann Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	Strategi Renstra : 1. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Arah Kebijakan RPJMD : Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berkas Basis Ramah Lingkungan	Meningkatnya pembangunan rendah karbon	Emisi Rumah Kaca (%)					%	0	0		0		100		100		100		100		ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN			
Tujuan Rentra : Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragama n hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	2.Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Strategi RPJMD : 1. Meningkatkan pengendalian pengawasan Lingkungan Hidup	Arah Kebijakan RPJMD : 1. Peningkatan Kualitas Air dan Udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Nilai	43,67	44,17		44,67		50,87		51,83		52,79		52,79		52,79		Kepala DLHK				
						Strategi Renstra : 1. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Arah Kebijakan Renstra : 1. Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	I	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan				5.415.175,9	4.199.900,0		2.680.000,0		3.436.132,5		3.436.132,5		19.167.340,9							
											1 Indeks Kualitas Air	Nilai	51	51,5		52		52,5		53		53,5		53,5					
			2 Indeks Kualitas Udara	Nilai		58,8	59		59,2		66,8		68,8		70,8		70,8												
			3 Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	%		-	-		-		16,9		17,6		19		19												
			4 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Lembaga		203	52		60		0		0		0		112												
			1 Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan		%/dok	100	100	1.212.092,8	100	503.000,0	4	400.000	4	550.000	4	550.000	12	3.215.093										
			Sub Kegiatan Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota		Dokumen Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota	dok	0	1		0		0		0		1												

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket				
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri	Dokumen Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri	dok	0	1		0		0		0		0		1								
							Sub Kegiatan Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 sungai)	Tersusunnya Dokumen Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 sungai)	Dokumen Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 sungai)	dok	0	5		0		0		0		0		5								
							Sub Kegiatan Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai	Tersusunnya Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai	Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai	dok	0	1		0		0		0		0		1								
							Sub Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Laut	Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut	lokasi	0	2		0		0		0		0		2								
							Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri	Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri	Peserta Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri	peserta	0	2		0		0		0		0		2								
							Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	tersusunnya Dokumen kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	Dokumen kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	dok	0	0		1		-		-		0		1								
							Sub Kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	Terlaksananya Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan sesuai tata laksana pengendalian pencemaran	Laporan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	indstr/Dok	40	40		120		0		0		0		120								
							Sub Kegiatan pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan Kerusakan situ/danau sesuai Baku Mutu Air dan kriteria kerusakan situ/danau	Dokumen pemantauauan kualitas air dan kerusakan situ/danau	Lokasi/ Dok	0	0		17		2		2		2		6								
							Sub Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien	Terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien sesuai baku mutu udara ambien	Dokumen pemantauan kualitas udara ambien	lokasi/Dok	22	22		22		1		1		1		3								
							Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan tatalaksana pengendalian pencemaran air	dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	dok	0	3		1		1		1		1		7								
							2 Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3		%/Dok	100%	100%	746.000	100%	1.154.000	3	1.180.000	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	11	6.080.000							
							Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah	Tersusunnya dokumen Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah	dokumen Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah	dok	0	1		0		0		0		0		1								
							Sub Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Tersusunnya dokumen Fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	dokumen Fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	dok	-	1		0		0		0		0		1								
							Sub Kegiatan pembinaan teknis pengelolaan limbah B3	Terlaksananya pembinaan teknis pengelolaan limbah B3	jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan limbah B3	peserta	0	40		0		0		0		0		40								

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatn	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							<u>Sub Kegiatan</u> Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	Tersusnya dokumen Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	dokumen Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	dok	0	1		0		0		0		0		1		Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3		
							<u>Sub Kegiatan</u> Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan LimbahB3	terlaksananya Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan LimbahB3	jumlah industr yang dievaluasi	ind	-	25		0		0		0		0		25				
							<u>Sub Kegiatan</u> Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (Insdutri, fasyankes dan hotel)	Terlaksananya evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (Insdutri, fasyankes dan hotel)	jumlah industr yang dievaluasi	penghasil limbah B3	0	75		0		0		0		0		75				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	tersusunnya dokumen pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	dokumen pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	penghasil limbah B3	0	1		0		0		0		0		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	tersusunnya dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3 sesuai pedoman pengelolaan limbah B3 dan persampahan	dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	dok	-	0		1		1		2		2		6				
							<u>Sub Kegiatan</u> pengelolaan sampah	terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah B3 dan persampahan	Laporan pembinaan dan pengelolaan sampah	Dok/ lembaga/ Dok	2	1		8		1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3 Sesuai dengan PP 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3	Laporan industri pengelola limbah B3 yang dipantau dan -dievaluasi	indstr/Dok	40	0		100		1		1		1		3				
							3 Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan proklim, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP		%/Dok	100	100	1.239.000	100	480.000	6	500.000	6	686.133	6	686.133	18	3.591.265			
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	Tersusunnya dokumen profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	Tersusunnya dokumen profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	Dok	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	Dokumen Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	dok	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Sosialisasi terpadu kampung iklim	Terlaksananntnya Sosialisasi terpadu kampung iklim	Sosialisasi terpadu kampung iklim	keg	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	Terlaksananya Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	dok	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Studi kelayakan pembentukan kawasan mangrove center	Tersusunnya Dokumen Studi kelayakan pembentukan kawasan mangrove center	Dokumen Studi kelayakan pembentukan kawasan mangrove center	dok	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Rapat koordinasi program pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	terlaksanananya Rapat koordinasi program pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	Rapat koordinasi program pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	dok	-	1		-		-		-		-		1				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	tersusunnya dokumen Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	dokumen Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	Dok	-	8		-		-		-		-		8		Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup		
							Sub Kegiatan Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	tersusunnya dokumen n data dan informasi keanekaragaman hayati	dokumen data dan informasi keanekaragaman hayati	dok	-	1		1		-		-		-		2				
							Sub Kegiatan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	Tersusunnya dokumen Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati tepat waktu	Dokumen Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	dok	0	0		8		0		0		0		8				
							Sub Kegiatan Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari sesuai SOP	Lokasi Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	lokasi	0	0		10		0		0		0		10				
							Sub Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservasi pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari sesuai SOP	Laporan Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservas dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	dok	0	0		0		2		2		2		6				
							Sub Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Terlaksanannya Pembinaan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai pedoman	Laporan Pembinaan adaptasi ,mitigasi perubahan iklim di Kampung iklim dan laporan pemantauan pengawasan bahan perusak ozon (BPO)	Kp/dok	16	32		16		2		2		2		6				
							Sub Kegiatan Pengembangan mangrove provinsi Banten	Tersusunnya Dokumen Pengembangan mangrove provinsi Banten yang terperinci	Dokumen Pengembangan mangrove provinsi Banten	dok	0	0		1		1		1		1		4				
							Sub Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	Tersusunnya Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah sesuai pedoman	Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	lap/Dok	1	1		1		1		1		1		5				
							4 Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter akreditasi/Survailan dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017		%/Paramete r	0	100	301.310	12,4	275.000	30	300.000	35	350.000	40	350.000	40	1.576.310			
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)	Terlaksannaya Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)	Jumlah orang peserta Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)	orang	0	25		0		0		0		0		25				
							Sub Kegiatan Pelatihan Berbayar	terlaksannanya pelatihan Berbayar	peserta pelatihan Berbayar	orang	0	25		0		0		0		-		25				
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis ISO 17025	terlaksananya Bimbingan Teknis ISO 17025	peserta Bimbingan Teknis ISO 17025	orang	0	25		0		0		0		0		25				
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Parameter BOD	Terlaksanya Bimbingan Teknis Parameter BOD	Peserta Bimbingan Teknis Parameter BOD	orang	0	25		0		0		0		-		25				
							Sub Kegiatan Uji Profesiensi	Terlaksannaya Uji Profesional	PesertaTerlaksannaya Uji Profesional	orang	0	20		0		0		0		0		20				
							Sub Kegiatan Akreditasi/Audit eksternal	Tersusunnya dokumen Akreditasi/Audit eksternal	Dokumen Akreditasi/Audit eksternal	dok	0	1		0		0		0		-		1				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket								
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Parameter COD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Parameter COD	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Parameter COD	orang	0	25		0		0		0		0		25										
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Parameter Pestisida	Terlaksananya Bimbingan Teknis Parameter Pestisida	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Parameter Pestisida	orang	0	25		0		0		0		-		25										
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium	Terliaksananaya _Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium	Terliaksananaya jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium	orang	0	25		0		0		0		-		25										
							Sub Kegiatan Akreditasi/Survailan	Terliaksananya _ Akreditasi/Survailan sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017	Jumlah Parameter Akreditasi/Survailan	paramater	0	0		25		30		35		40		40										
							5 Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu		%/Sample	0	100	579.823,1	11,4	682.900,0	199	300.000	284	350.000	284	350.000	284	2.262.723	Seksi Teknis UPTD Lab lingkungan								
							Sub Kegiatan Rapat Teknis Analisa dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran	Terlaksananya Rapat Teknis Analisa dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran	pelaksanaan Rapat Teknis Analisa dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran	Kali	0	1		0		0		0		0		1										
							Sub Kegiatan Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumen Laboratorium	Terlaksananya _Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumen Laboratorium	Jumlah jenis Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumen Laboratorium	jenis	0	34		0		0		0		-		34										
							Sub Kegiatan Pengolahan Limbah Laboratorium	Terlaksannanya Pengolahan Limbah Laboratorium	pelaksanaan Pengolahan Limbah Laboratorium	bulan	0	12		0		0		0		0		12										
							Sub Kegiatan Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	Terlaksananya Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017	Jumlah Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	sample	0	144		174		174		234		234		234										
							Sub Kegiatan Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal	Terlaksananya Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017	Jumlah Pengambilan Sample dalam pelayanan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan eksternal	orang/ industri/ Sample	50	50		50		25		50		50		50										
							6 Kegiatan DAK Bidang Lingkunnan Hidup	Meningktanya ketersediaan pengadaan sarana dan prasarana lab Lingkungan Hidup sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017		Paket	0	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	3	-	SubBag TU UPTD Lab								
							Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Lab Lingkungan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Lab Lingkungan sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017	Pengadaan sarana prsarana lab lingkungan	paket	0	0		0		1		1		1		3	-									
							7 Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP		%	100	100	530.000	100	330.000	0	-	-	-	-	100	860.000										
							Sub Kegiatan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal	Tersusunnya dokumen laporan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal	Tersusunnya dokumen laporan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal	dok	0	1		-		-		-		-		1										
							Sub Kegiatan Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Tersusunnya dokumen Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	dokumen Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	dok	0	1		-		-		-		-		1										
							Sub Kegiatan Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten	Tersusunnya dokumen Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten	dokumen Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten	dok	0	1		0		0		0		0		1						1				
							Sub Kegiatan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tersusunnya dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	dok	0	1		-		-		-		-		1						1				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	Tersusunnya Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	Dokumen Kinerja Pengelola an Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	dok	0	1		-		-		-		-		1		Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup		
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	Tersusunnya dokumen laporan Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	dokumen laporan Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	dok	0	1		0		0		0		-		1				
							Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah	Tersusunnya dokumen Neraca Sumber Daya Alam Daerah	Tersusunnya dokumen Neraca Sumber Daya Alam Daerah	dok	0	1		-		-		-		-		1				
							Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	Tersusunnya Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan yang tervalidasi	Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	dok	8	0		7		0		0		0		7				
							Sub Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya dokumen dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tervalidasi	dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dan divalidasi	dok	2	0		1		0		0		0		1				
							Sub Kegiatan Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	Terlaksananya Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan sesuai kompetensi	jumlah peserta yang mengikuti pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	orang	130	0		130		0		0		0		130				
							8 Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP		%	100	100	458.640	100	355.000	0	-	0	-	0	-	100	813.640	Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum		
							Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten	Terlksananya Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten	kegiatan pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten	Pelaku usaha/keg.	0	40		0		0		0		0		40				
							Sub Kegiatan Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	Terlaksannanya Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	Jumlah peserta Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	orang	0	40		0		0		0		0		40				
							Sub Kegiatan Peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	terlaksananya Peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	Jumlah peserta peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	orang	0	40		0		0		0		0		40				
							Sub Kegiatan Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	Terlaksananya Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	dok	0	1		0		0		0		0		1				
							Sub Kegiatan Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	Terlaksananya Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	jumlah industri yang dipantau	ind	0	80		0		0		0		0		80				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket	
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							<u>Sub Kegiatan</u> Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Terlaksananya Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Kasus/%	100	20		100		0		0		0		100					
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah industri yang diawasi	ind	200	165		100		0		0		0		310					
							<u>Sub Kegiatan</u> Penanganan kasus- kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan Sesuai SOP	penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus	0	0		0		0		0		0		60					
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan Sesuai SOP	jumlah industri yang diawasi dalam pegelolaan lingkunan hidup	indstr	0	165		44		0		0		0		100					
							<u>9 Kegiatan</u> Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP		%	100	100	348.310	100	420.000			-		-		-	100	768.310			
							<u>Sub Kegiatan</u> Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	terlaksananya Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	Jumlah sekolah yang terverifikasi dan dinilai	Sekolah	0	25		0		0		0		0		25	64.780				
							<u>Sub Kegiatan</u> Binte Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional dan Mandiri	Terlaksananya Binte Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional dan Mandiri	jumlah peserta Binte Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional dan Mandiri	orang	0	25		0		0		0		0		25	51.000				
							<u>Sub Kegiatan</u> Verifikasi dan penilaian Green School	Terlaksananya Verifikasi dan penilaian Green School	jumlah sekolah terverifikasi dan penilaian Green School	Sekolah	0	25		0		0		0		0		25	16.500				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemantauan Adipura	Terlaksanannya Pemantauan Adipura	Jumlah Kab/kota Pemantauan Adipura	Kab/Kota	0	7		0		0		0		0		-	7	42.000			
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemberdayaan masyrakat hukum adat di Provinsi Banten	Terlaksannaya Pemberdayaan masyrakat hukum adat di Provinsi Banten	Jumlah kelompok Pemberdayaan masyrakat hukum adat di Provinsi Banten	kelompok	0	2		0		0		0		-		2	49.570				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pembinaan Saka Wana Bhakti	Terlaksananya Pembinaan Saka Wana Bhakti	jumlah satuan Pembinaan Saka Wana Bhakti	satuan	0	1		0		0		0		0		1	90.960				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pembinaan Saka Kalpataru	Terlaksananya Pembinaan Saka Kalpataru	Jumlah satuan Pembinaan Saka Kalpataru	satuan	0	1		0		0		0		-		1	33.500				
							<u>Sub Kegiatan</u> Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	terlaksananya Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Sesuai SOP	Jumlah Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dibina	Sekolah	188	25		25		0		0		0			219.035				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							<u>Sub Kegiatan</u> Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten Sesuai SOP	Jumlah kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibina dan dinilai	kota	7	7		7		0		0		0		38.950				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	terlaksanannya Pembinaan pada pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat sesuai pedoman	kelompok pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	kelompok	5	4		5		0		0		0		162.015				
							II Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LingkunganHidup					-		-		1.150.000		931.767,5		931.767,5		3.013.535	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas			
								Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan	1 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok/Le mbaga	203	0		0		68		76		78		222				
									2 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	%	-	0		0		98		98		100		100				
							1 <u>Kegiatan</u> Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP		Dok	100	0	-	0	-	7	350.000	10	300.000	10	300.000	27	950.000	Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidu		
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	Tersusunnya Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan yang tervalidasi	Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	dok	8	0	0	0		5		8		8		21				
							<u>Sub Kegiatan</u> Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya dokumen dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tervalidasi	dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dan divalidasi	dok	2			0		1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	Terlaksananya Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan sesuai kompetensi	Dokumen penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	Dok	130			0		1		1		1		3				
							2 <u>Kegiatan</u> Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP		%/Dok	100	0	-	0	-	2	400.000	2	300.000	2	300.000	6	1.000.000	Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum		
							<u>Sub Kegiatan</u> Penanganan kasus- kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	terlaksananya Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan Sesuai SOP	Laporan penanganan kasus- kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus/Dok	0			0		1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan Sesuai SOP	Laporan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Dok	0			0		1		1		1		3				
							3 <u>Kegiatan</u> Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP		Lembaga	100	0	-	0	-	34	400.000,00	37	331.768	37	331.768	87	1.063.535	Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan		
							<u>Sub Kegiatan</u> Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	terlaksananya Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Sesuai SOP	Jumlah Lembaga/Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dibina	Sekolah/Le mbaga	188					25		25		25		75				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket				
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							<u>Sub Kegiatan</u> Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten Sesuai SOP	lembaga/Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibina dan dinilai	kota/Lemba ga	7					7		7		7		7		Hidup				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	terlaksanannya Pembinaan pada pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat sesuai pedoman	jumlah Lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	Kelompok/L embaga	5					2		5		5		5						
		3. Meningkatkan Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	<u>Strategi RPJMD :</u> 1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung 2. Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai	<u>Arah Kebijakan RPJMD :</u> 1. Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan 2. Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai	Meningkatnya pengelolaan, pengendalian dan konservasi hutan	2. Rasio Cakupan Tutupan Hutan				%	30,6	31,21		31,71		32,21		32,71		33,21		33,21		Kepala DLHK				
							III <u>Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan</u>											0		0		0		17.150.137,00	Kabid. Pengelolaan DAS, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang, Kepala BPPTK			
								<u>Meningkatnya luas lahan yang terehabilitasi</u>	<u>Luas Lahan kritis yang terehabilitasi</u>		Ha	69.466	5000		5000		0		0		0		10.000					
								<u>Meningkatnya fungsi hutan dan kawasan lindung</u>	<u>Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat</u>		%	38	10		10		0		0		0		48			Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kepala Balai TAHURA Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang		
			<u>Strategi Rensira :</u> 1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat 2.Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan	<u>Arah Kebijakan Renstra :</u> 1. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten 2.Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan			1 <u>Kegiatan</u> Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan		%	100	100	290.000	100	415.000	0	-	0	-	0	-	100	705.000	Sekisi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan				
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Tersusunnya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Dokumen Rencana Kehutanan Tin	dok	1	1	100.000	0		0		0		0		1	100.000					
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Statistik Kehutanan	Tersusunnya data statistik kehutanan	Dokumen statistik kehutanan	dok	1	1	7.500	0		0		0		0		1	7.500					
							<u>Sub Kegiatan</u> Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten	Terlaksananya kajian kawasan lindung di provinsi banten	Dokumen kajian kawasan lindung di provinsi banten	dok	0	1	50.000	0		0		0		0		1	50.000					
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca sektor kehutanan	Dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca sektor kehutanan	dok	1	1	22.500	0		0		0		0		1	22.500					
							<u>Sub Kegiatan</u> Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	Terlaksananya fasilitasi dan inventarisasi penyelesaian	dokumen fasilitasi dan inventarisasi penyelesaian	dok	0	5	59.280	0		0		0		0		5	59.280					

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							<u>Sub Kegiatan</u> Perencanaan hutan	Terusunnya perencanaan hutan sesuai dengan peraturan perencanaan hutan	Terdapatnya dokumen perencanaan hutan (Dok)	dok	2	1	50.720	6	276.750	0	-	0	-	0	7	327.470	Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan			
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemantapan kawasan hutan	Terlaksananya pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan	Pemantapan Kawasan Hutan (KPH)	KPH	6	0	0	6	138.250	0	-	0	-	0	6	138.250				
							2 <u>Kegiatan</u> Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan		%	100%	100%	339.020	100%	450.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%		789.020		
							<u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok FMU	Kelompok FMU Provinsi Banten	Kelompok	0	21	0	0	0	0	0	21								
							<u>Sub Kegiatan</u> Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Unit-unit Manajemen Hutan Rakyat (FMU)	Terlaksananya inventarisasi potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu pada unit - unit manajemen hutan rakyat (FMU)	Dokumen Inventarisasi potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu pada unit - unit manajemen hutan rakyat (FMU)	dok	0	1	0	0	0	0	0	1								
							<u>Sub Kegiatan</u> Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara manual dan online	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan dan pembuatan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) secara manual dan online	industri pengolahan kayu	Industri	0	50	0	0	0	0	0	50								
							<u>Sub Kegiatan</u> Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Iuran Kehutanan (WASGANISDAN GANIS PHPL)	Terlaksananya bimbingan teknis pembinaan petugas penatausahaan hasil hutan (PUHH) dan iuran kehutanan (wasganis dan ganis phpl)	industri pengolahan kayu	Industri	0	90	0	0	0	0	0	90								
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	Terlaksananya pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri sesuai dengan standar dan pedoman	Terwujudnya kelompok usaha hutan rakyat berbasis industri	Kelompok	15	0	20	0	0	-	0	-	20							
							<u>Sub Kegiatan</u> Penatausahaan hasil hutan	Terlaksananya penatausahaan hasil hutan sesuai dengan standar dan pedoman	Tertibnya Penatausahaan industri hasil hutan	Industri	180	180	180	0	0	-	0	-	180							
							3 <u>Kegiatan</u> Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan	%	100	100	507.840,5	100	606.250,0	0	-	0	-	0	100	1.114.090,5	Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan			
							<u>Sub Kegiatan</u> Pameran Indogreen Forestry Expo	Terlaksananya pameran indogreen forestry expo	komoditas hasil hutan bukan kayu	komoditas	1	6	0	0	0	0	6									
							<u>Sub Kegiatan</u> Pameran Banten Expo	Terlaksananya pameran banten expo	komoditas hasil hutan bukan kayu	komoditas	1,00	6	0	0	0	0	6,0									
							<u>Sub Kegiatan</u> Pelatihan Pengolahan Gula Aren Menjadi Gula Semut	Terlaksananya pelatihan pengolahan gula aren menjadi gula semut	jumlah peserta pelatihan pengolahan gula aren menjadi gula semut	orang	0	80	0	0	0	0	80									
							<u>Sub Kegiatan</u> Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	Terlaksananya pelatihan budidaya jamur tiram	jumlah peserta pelatihan budidaya jamur tiram	orang	0	40	0	0	0	0	40									
							<u>Sub Kegiatan</u> Pelatihan Budidaya Lebah Madu	Terlaksananya pelatihan budidaya lebah madu	jumlah peserta pelatihan budidaya lebah madu	orang	-	20	0	0	0	0	20,0									
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan aneka usaha kehutanan	Terlaksananya pengembangan aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	jumlah komoditas usaha kehutanan	Komoditas	0	0	3	0	-	0	-	3,0								

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket									
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							Sub Kegiatan Pengembangan kawasan bambu terpadu	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan Pengembangan kawasan bambu yang terpadu	dokumen pengembangan kawasan bambu terpadu	dok	0	0		1		0	-	0	-	0	-	1,0											
							Sub Kegiatan Promosi aneka usaha kehutanan	Terlaksananya promosi aneka usaha kehutanan tepat sasaran	kegiatan promosi aneka usaha kehutanan	Event	2	0		3		0	-	0	-	0	-	3,0											
							4 Kegiatan Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya pengelolaan DAS		%	100%	100%	784.100	100%	600.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.384.100	Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan									
							Sub Kegiatan perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Terlaksananya perencanaan pengelolaan DAS dan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial	dokumen perencanaan pengelolaan das dan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial	dok	3	2		2		0		0		0		4											
							Sub Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	Terehabilitasinya hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	ha	-	1.000		1.000		0		0		0		2.000											
							Sub Kegiatan Rehabilitasi wilayah Daerah aliran Sungai (DAS)	Terehabilitasinya wilayah daerah aliran sungai (DAS)	jumlah DAS yang terehabilitasi	DAS	0	1		1		0		0		0		2											
							Sub Kegiatan Penghijauan lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya Penghijauan lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah batang pohon penghijauan lingkungan mendukung ruang terbuka hijau (RTH)	batang	3000	3000		3000		0		0		0		6.000											
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL)	Terususannya Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan RTn-RHL	Dokumen rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) dan Rtn-RHL	Dokumen	0	1		0		0		0		0		1											
							Sub Kegiatan Pembinaan Forum DAS	Terlaksananya Pembinaan Forum DAS	Jumlah peserta pembinaan forum DAS	Forum	5	5		6		0		0		0		6											
							5 Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari		%	100%	100%	318.015,5	100%	375.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	693.016									Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	
							Sub Kegiatan Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata Alam di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata Alam di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	Jumlah peserta pembinaan masyarakat teknis wisata alam di daerah penyangga kawasan konservasi	angkatan	0	2		0		0		0		0		2											
							Sub Kegiatan Pembentukan Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satwa Liar di Provinsi Banten	Terbentuknya Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satwa Liar di Provinsi Banten	jumlah konservasi dan terbinain tumbuhan satwa liar di provinsi banten	unit	0	1		0		0		0		0		1											
							Sub Kegiatan Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	jumlah peserta evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan	angkatan	0	1		0		0		0		0		1											
							Sub Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana di Sekitar Kawasan Hutan	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana di Sekitar Kawasan Hutan	jumlah peserta sosialisasi mitigasi bencana di sekitar kawasan hutan	angkatan	0	2		0		0		0		0		2											
							Sub Kegiatan Pemulihan kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi	Terpulihkannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi	jumlah kawasan konservasi (luas kawasan hutan) yang terdegradasi	unit	0	1		1		0		0		0		2											
							Sub Kegiatan Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar	Terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar sebanyak 50 orang	jumlah penangkar tumbuhan dan satwa liar	Org	50	0		50		0		0		0		50											

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket											
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD										
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
							<u>Sub Kegiatan</u> Penanganan daerah penyangga kawasan konservasi	Terbinanya masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi sebanyak 22 kelompok	jumlah kelompok masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi	kelompok	10,00	4		6		0		0		0		10													
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemberdayaan lembaga konservasi	Terbinanya lembaga konservasi sebanyak 7 lembaga	jumlah lembaga konservasi yang	lembaga	0	0		1		0		0		0		0					1								
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem	Terlaksananya Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem esensial di 8 kab/kota	Dokumen data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem esensial	dokumen	0	1		1		0		0		0		0					2								
							<u>Sub Kegiatan</u> Perencanaan dan pembentukan taman kehati banten	Tersusunnya Perencanaan dan pembentukan taman kehati banten sebanyak 1 unit	dokumen perencanaan dan pembentuka taman kehati banten	dok	0	0		1		0		0		0		0					1								
							<u>Sub Kegiatan</u> Perencanaan pembentukan lembaga konservasi Ex Situ	Tersusunnya Perencanaan pembentukan lembaga konservasi Ex Situ sebanyak 5 dokumen	Dokumen Perencanaan pembentukan lembaga konservasi Ex Situ	dok	0	0		1		0		0		0		0					1								
							<u>Sub Kegiatan</u> Perencanaan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Tersusunya dokumen perencanaan kebakaran hutan dan lahan sesuai SOP	Dokumen Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	dok	0	0		0		0		0		0		0					-								
							6	<u>Kegiatan</u> Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan.		%	100	100	454.000	100	450.000	0		-	0		-	0		-	100	904.000				Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat				
							<u>Sub Kegiatan</u> Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	orang	0	100		0		0		0		0		100													
							<u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan	KTH	0	10		0		0		0		0		10													
							<u>Sub Kegiatan</u> Lomba Wana Lestari	Terlaksananya Lomba Wana Lestari	Jumlah event Lomba Wana Lestari	event	0	1		0		0		0		0		1													
							<u>Sub Kegiatan</u> Pelatihan Dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan	Terlaksananya Pelatihan Dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Peserta Pelatihan Dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan	KTH	0	5		0		0		0		0		5													
							<u>Sub Kegiatan</u> Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	orang	0	50		0		0		0		0		50													
							<u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan Peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	Terlaksananya Peningkatan Peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	Jumlah peserta Peningkatan Peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	kelompok	34	0		56		0		0		0		56													
<u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	Terlaksananya Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	Jumlah peserta Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	orang	0	0		100		0		0		0		100																				
<u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	Jumlah peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	Orang	35	0		56		0		0		0		56																				
<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	Terlaksananya Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	Jumlah peserta Pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	kelompok	34	0		43		0		0		0		43																				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	Tersusunnya data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	Dokumen data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	dok	1	0		1		0		0		0		1				
							7 <u>Kegiatan</u> Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang		%	100	100	620.700	100	-	0	-	0	-	0	-	100	620.700			
							Sub Kegiatan Hutan Rakyat Pengkayaan	Terlaksananya Hutan Rakyat Pengkayaan	Luas Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50		0		0		0		0		50				
							Sub Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Desa	Terlaksananya Pembuatan Kebun Bibit Desa	Jumlah Pembuatan Kebun Bibit Desa	unit	0	8		0		0		0		0		8				
							Sub Kegiatan Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan	Terlaksananya Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	jumlah perusahaan Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	40		0		0		0		0		40				
							Sub KegiatanRehabilitasi Hutan dan Lahan	Terehabilitasinya Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0		1250		0		0		0		1250		Kepala Seksi Wilayah I Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon		
							Sub KegiatanPemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Jumlah kelompok Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	kelompok	0	0		20		0		0		0		20				
							Sub Kegiatan Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Jumlah Industri Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	industri	32	0		32		0		0		0		32				
							Sub Kegiatan Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Jumlah Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/Pengedar	0	0		5		0		0		0		5				
							8 <u>Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai SOP		%	0	0	0	100%	225.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	225.000			
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Tersusunnya Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan sesuai SOP	Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	dok	0	0		25		0		0		0		25				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu sesuai SOP	Jumlah pelaku usaha yang diawasi dan dikendalikan dalam Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	pelaku usaha	0	0		1		0		-		0		40				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan sesuai SOP	Jumlah industri kehutanan yang diawasi dan dikendalikan	industri	0	0		0		0		-		0		40		Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon		
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sesuai SOP	Jumlah penangkar yang diawasi dan dikendalikan Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	penangkar	0	0		1		0		0		0		30				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai SOP	Jumlah Peserta Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	Orang	0	0		0		0		-		0		120				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai SOP	Jumlah peserta Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	orang	0	0		0		0		-		0		120				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sesuai SOP	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	dok	0	0		0		0		-		0		3				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatn	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							9 Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Serang dan Cilegon		%	100	100	532.800	100	0	0	-	0	0	0	0	100	532.800	Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon		
							Sub Kegiatan Hutan Rakyat Pengkayaan	Terlaksananya Hutan Rakyat Pengkayaan	Luas Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50		0		0		0	0	0		50				
							Sub Kegiatan Penghijauan Lingkungan (MPTS)	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan (MPTS)	Jumlah Batang Penghijauan Lingkungan (MPTS)	batang	0	1000		0		0		0	0	0		1.000				
							Sub KegiatanPembuatan Kebun Bibit Desa	Terlaksananya Pembuatan Kebun Bibit Desa	Jumlah unit Pembuatan Kebun Bibit Desa	unit	0	5		0		0		0	0	0		5				
							Sub Kegiatan Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	Terlaksananya Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	Jumlah perusahaan Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	80		0		0		0	0	0		80				
							Sub Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terehabilitasinya Hutan dan Lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0		750		0		0	0	0		750				
							Sub Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Jumlah Kelompok Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	kelompok	5	-		9		0		0	0	0		9				
							Sub Kegiatan Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	Terlaksananya Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	Jumlah industri Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	60	0		81		0		0	0	0		81				
							Sub Kegiatan Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Terlaksananya Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Jumlah Penangkar Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/Pengedar	5	0		10		0		0	0	0		10				
							10 Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target		%	0%	0%	0	100%	1.300.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.300.000	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon		
							Sub Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sesuai Target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Unit KBD	0	0		23		0	-	0	-	0	-	23				
							Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan sesuai Target	Jumlah kelompok Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	Unit	5	0		2		-	-	-	-	-	-	2				
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan sesuai SOP	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	dok	1	0		1		0	-	0	-	0	-	1				
							11 Kegiatan Pengelolaan Hutan wilayah Lebak	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak		%	100	100	826.000	100	-	0	-	0	-	0	-	100	826.000	Kepala Seksi Wilayah I Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang		
							Sub Kegiatan Hutan Rakyat Pengkayaan	Terlaksananya Hutan Rakyat Pengkayaan	Luas Hutan Rakyat Pengkayaan	ha	0	50		-		-		-		-		50				
							Sub Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Desa	Terlaksananya Pembuatan Kebun Bibit Desa	Jumlah unit Pembuatan Kebun Bibit Desa	unit	0	10		0		0		0		-		10				
							Sub Kegiatan Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	Terlaksananya Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	Jumlah peserta Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	perusahaan	0	40		0		0		0		-		40				
							Sub Kegiatan \Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	0	0		1950		0		0		-		1.950				
							Sub Kegiatan Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	Terlaksananya Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	Jumlah industri Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu	industri	0	0		21		0		0		-		21				
							Sub Kegiatan Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Terlaksanannya Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Jumlah Penangkar Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Penangkar/Pengedar	20	0		20		0		0		-		20				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							12 <u>Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP		%	0%	0%	0	100%	280.600	0%	-	0%	-	0%	-	100%	280.600	Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang		
							<u>Sub Kegiatan</u> Peryusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Tersusunnya Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan sesuai SOP	Dokumen perencanaan dan rancangan teknis kegiatan	dok	0	0	2	0	-	0	-	0	2							
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu sesuai SOP	Jumlah pelaku usaha yang diawasi dan dikendalikan dalam Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	pelaku usaha	0	0	50	0	-	0	-	0	40							
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan	Terlaksanannya Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan sesuai SOP	Jumlah industri kehutanan yang diawasi dan dikendalikan	industri	0	0	50	0	-	0	-	0	40							
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sesuai SOP	Jumlah penangkar yang diawasi dan dikendalikan Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	penangkar	0	0	50	0	-	0	-	0	40							
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan sesuai SOP	Jumlah Peserta Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	Orang	0	0	50	0	-	0	-	0	50							
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Dalkarhutla sesuai SOP	Jumlah Peserta Pengawasan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	orang	0	0	50	0	-	0	-	0	50							
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sesuai SOP	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	dok	0	0	0	0	-	0	-	0	3							
							13 <u>Kegiatan</u> <u>Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang</u>	<u>Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang</u>		%	100	100	376.000	100	-	0	-	0	-	0	-	100	376.000	Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang		
							<u>Sub Kegiatan</u> <u>Hutan Rakyat Pengkayaan</u>	<u>Terlaksananya Hutan Rakyat Pengkayaan</u>	<u>Jumlah luas Hutan Rakyat Pengkayaan</u>	ha	0	50	0	0	0	0	50									
							<u>Sub Kegiatan</u> <u>Penghijauan Lingkungan (MPTS)</u>	<u>Terlaksananya Penghijauan Lingkungan (MPTS)</u>	<u>Jumlah Batang pohon Penghijauan Lingkungan (MPTS)</u>	batang	0	7000	0	0	0	0	7.000									
							<u>Sub Kegiatan</u> <u>Pembuatan Sumur Resapan</u>	<u>Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan</u>	<u>Jumlah unit Pembuatan Sumur Resapan</u>	unit	0	25	0	0	0	0	25									
							<u>Sub Kegiatan</u> <u>Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu</u>	<u>Terlaksananya Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu</u>	<u>Jumlah perusahaan Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu</u>	perusahaan	0	40	0	0	0	0	40									
							<u>Sub Kegiatan</u> <u>Rehabilitasi Hutan dan Lahan</u>	<u>Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan</u>	<u>Jumlah luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan</u>	ha	0	0	50	0	0	0	50									
							<u>Sub Kegiatan</u> <u>Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu</u>	<u>Terlaksananya Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu</u>	<u>Jumlah Industri Pengawasan peredaran dan pembinaan pengujian hasil hutan kayu</u>	industri	60	0	82	0	0	0	82									
<u>Sub Kegiatan</u> <u>Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi</u>	<u>Terlaksananya Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi</u>	<u>Jumlah Penangkar Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi</u>	Penangkar/ Pengedar	0	0	20	0	0	0	20																

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							14 <u>Kegiatan</u> Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target		100%	0%	0	0	100	1.154.400	0	-	0	-	0	-	100	1.154.400	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang		
							Sub Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sesuai target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Unit	0	0		16		0	-	0	-	0	-	7.500				
							Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan sesuai target	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan	kelompok	0	0		4		0	-	0	-	0	-	4				
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan sesuai SOP	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	Dokumen	0	0		1		0	-	0	-	0	-	1				
							15 <u>Kegiatan</u> Pengembangan Pemb enihan Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar		%	0	100%	466.000	100%	503.750	0%	-	100%	-	100%	-	100%	969.750	Seksi Perbenihan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS	Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS sesuai standar	Jumlah bibit tanaman hutan dan MPTS	batang	145.000	200.000		200.000		-	-	-	-	-	-	400.000				
							<u>Sub Kegiatan</u> Penelusuran sumber benih unggul	Terlaksananya Penelusuran sumber benih unggul sesuai SOP	Lokasi Penelusuran sumber benih unggul	lokasi	0	1		1		0	-	0	-	0	-	1				
							Sub KegiatanBimbingan teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan dan MPTS	Terlaksananya Bimbingan teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan dan MPTS sesuai SOP	Jumlah peserta Bimbingan teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan dan MPTS	Orang	0	80		80		0	-	0	-	0	-	160				
							Sub Kegiatan Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan endemik Banten	Terlaksananya Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan endemik Banten sesuai SOP	Jumlaj jenis Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan endemik Banten	Jenis	0	0		1		0	-	0	-	0	-	1				
							Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul sesuai standar	Jumlah Unit Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul	unit	0	3		3		0	-	0	-	0	-	1				
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi penyalur bibit tanaman kehutanan dan MPTS	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penyalur bibit tanaman kehutanan dan MPTS sesuai SOP	Lokasi kab/kota Monitoring dan Evaluasi penyalur bibit tanaman kehutanan dan MPTS	Kab/Kota	0	8 Kab/Kota		8 Kab/Kota		0	-	0	-	0	-	8 Kab/Kota				
							16 <u>Kegiatannya</u> Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan		%	100	100	82.150	100	-	0	-	0	-	0	-	100	82.150	Seksi Teknis Proteksi tanaman Pengawasan Peredaran Benih Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan		
								1 Pembinaan Pengoda Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Org/Pengel ola	11	26		30	-	0		0		0		56					
								2 Pengawasan Benih Tanaman Hutan	benih/jenis	-	4		5	-	0		0		0		5					
								3 Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Hutan dan MPTS	batang	-	500		10.500	-	0		0		0		11.000					
								4 Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan	orang		4		5		0		0		0		5					
								5 Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan	unit			2		2		0		0		0		2				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							17 <u>Kegiatan</u> Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	%	0	0	-	100	160.000	0	-	0	-	0	-	100	160.000	Seksi Sertifikasi UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		
							Sub Kegiatan pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	Terbinanya pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang) sesuai SOP	Jumlah peserta pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang)	Org/Pengelola	0	0		30		0	-	0	-	0	-	30				
							Sub Kegiatan Pengawasan benih tanaman hutan (laporan)	Terlaksananya Pengawasan benih tanaman hutan (laporan) sesuai SOP	Laporan Pengawasan benih tanaman hutan	jenis	-	0		5		0	-	0	-	0	-	36				
							Sub Kegiatan Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	Terlaksananya Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS (batang) sesuai SOP	Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS (batang)	batang	0	-		10.500		0	-	0	-	0	-	10.500				
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Alboreteum/ kebun koleksi	Terpeliharanya Alboreteum/ kebun koleksi (laporan) sesuai SOP	Laporan Alboreteum/ kebun koleksi (laporan)	lap	0	0		0		0	-	0	-	0	-	12				
							<u>Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan</u>			orang		0		5		0		0		0		5				
							<u>Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan</u>			unit		0		2		0		0		0		2				
							18 <u>Kegiatan</u> Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya		%	100	100	320.000	100	271.000	0	-	0	-	0	-	100	591.000	Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten		
							<u>Sub Kegiatan</u> Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	Terlaksananya Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	Ha	1.595,9	1.595,9		1.595,9		0	-	0	-	0	-	1.595,9				
							Sub Kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	Terlaksananya Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati sesuai target	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati	Ha	200	32		32		0	-	0	-	0	-	64				
							Sub Kegiatan Penyediaan koleksi species lokal/endemik/langka /terancam punah	Terlaksananya Penyediaan koleksi species lokal/endemik/langka/terancam punah sesuai dengan RPJP	Jumlah Species Penyediaan koleksi species lokal/endemik/langka/terancam punah	Species	0	5		5		0	-	0	-	0	-	5				
							19 <u>Kegiatan</u> Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP			100%	100%	211.966	100%	261.000	0%	-	0%	-	0%	-	100%	472.966	Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten		
							<u>Sub Kegiatan</u> Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna	Terlaksananya Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna	Dokumen Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna	dok	-	2		-		-		-		-		2				
							<u>Sub Kegiatan</u> Penataan Batas Lapang	Tertatanya Batas Lapang	Jumlah blok Batas Lapang	blok	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi	Terlaksananya Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi	Dokumen Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi	dok	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan Pengelolaan Objek Wisata dan Pengunjung	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Objek Wisata dan Pengunjung	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Objek Wisata dan Pengunjung	kegiatan	-	1		-		-		-		-		1				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar	Terlaksananya Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar	kegiatan	-	2		-		-		-		-		2				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	kegiatan	-	1		-		-		-		-		1				
							Sub Kegiatan Peningkatan Kunjungan TAHURA Banten	Terlaksananya Peningkatan Kunjungan TAHURA Banten sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan tahura banten	Jumlah pengunjung TAHURA Banten	Orang	26.000	-		39.500			-		-		0		39.500			
							Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pemanfaatan Wisata	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Fasilitas Pemanfaatan Wisata sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan tahura banten	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Fasilitas Pemanfaatan Wisata	Unit	2	-		2			-		-		0		2			
						20	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan)	Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan		%	100	100	2.312.000	100	1.407.545	0	-	0	-	0	-	100	3.969.545	- Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK Wil Lebak dan Tangerang,		
							Sub kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Terlaksannaya pengembangan hutan rakyat sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan	1 pengembangan hutan rakyat	ha	-	300		300		-		-		-		600		- Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan- Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masvarakat CDLHK Wil		
							Sub Kegiatan Perlindungan dan rehabilitasi kawasan taman hutan raya banten	Terlaksananya rehabilitasi kawasan Tahura sesuai dengan RPJP	2 Rehabilitasi kawasan Tahura	Ha	-	-		-		-		-		-		-		- Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten		
									2 penghijauan lingkungan (MPTS)	batang	-	10.500		10.500		-		-		-		-		21.000		
									3 pengembangan komoditas unggulan tanaman kehutanan	ha	-	6		-		-		-		-		-		6		
									4 Rehabilitasi Lahan Secara Sipil Teknis	unit	-	-		6		-		-		-		-		6		
							IV Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						0		0		1.300.000		1.801.152		1.801.152		4.902.304			
									Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	%	0	0		0		10		10		10		30		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		
									Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Klpk	-	0		0		3		3		3		9		CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon		
									Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Klpk	-	0		0		3		3		3		9		CDLHK Wilayah Lebak Tangerang		
						1	Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan		Dok	100	0	-	0		-	4	300.000	5	400.000	5	400.000	14	1.100.000		
							Sub Kegiatan Perencanaan hutan	Terusunnya perencanaan hutan sesuai dengan peraturan perencanaan hutan	Terdapatnya dokumen perencanaan hutan (Dok)	dok		2					3		4		4		11	Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan		
							Sub Kegiatan Pemantapan kawasan hutan	Terlaksananya pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan	Dokumen Laporan Pemantapan Kawasan Hutan (dok)	Dok		6					1		1		1		3			
						2	Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan		Dok		0	-	0		-	2	300.000	2	400.000	2	400.000	6	1.100.000		
							Sub Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berkbasis Industri	Terlaksananya pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri sesuai dengan standar dan pedoman	Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri	Dok		15					1		1		1		3	Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan		

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							<u>Sub Kegiatan</u> Penatausahaan hasil hutan	Terlaksananya penatausahaan hasil hutan sesuai dengan standar dan pedoman	Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	DOK	180					1		1		1		3				
							3 <u>Kegiatan</u> Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan	Komoditas	100	0	-	0	-	4	300.000	4	441.152,0	4	441.152,0	4	1.182.304			
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan dan Promosi aneka usaha kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	jumlah kemoditas usaha kehutanan	Komoditas	0	0	0	0	-	3		3		3		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan kawasan bambu terpadu	Terlaksananya Pengembangan kawasan bambu yang terpadu	Pengembanga kawasan bambu terpadu	Komoditas	0	0	0	0	-	1		1		1		1				
							4 <u>Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai SOP		Dok	0	0	0	0	0	8	200.000	8	280.000	8	280.000	24	760.000			
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sesuai SOP	Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Dok	0	0		0		3		3		3		9				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sesuai SOP	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	dok	0	0		0		1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Tersusunnya Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan sesuai SOP	Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	dok	0	0		0		2		2		2		6				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	Dok	0	0		0		2		2		2		6				
							5 <u>Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP		Dok	0	0	0	0	0	8	200.000	8	280.000	8	280.000	24	760.000			
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi sesuai SOP	Jumlah Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	Dok	0	0		0		3		3		3		9				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting sesuai SOP	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	dok	0	0		0		1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	Tersusunnya Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	dok	0	0		0		2		2		2		6				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai SOP	Jumah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	Dok	0	0		0		2		2		2		6				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatn	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							V Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan						-		-		5.050.000		6.996.778		6.996.778		19.043.556			
							Meningkatnya Pendendalian DAS,Konservasi Hutan dan luas lahan kritis yang terehabilitasi serta Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Peningkatnya Pendendalian DAS,Konservasi Hutan dan luas lahan kritis yang terehabilitasi serta Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	%	-	-		-		20		20		20		60		Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE			
						Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan		Klpk	-	-		-		10		10		10		30						
						Peningkatan fungsi UPTD TAHURA		%	-	-		-		12,5		12,5		12,5		37,5		Kepala UPTD Pengelolaan TAHURA Banten				
						Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah pandeglang Serang cilegon		ha	0	0		0		2.500		2.500		2.500		7.500		CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon				
						Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang		ha	-	0		0		2.500		2.500		2.500		7.500		CDLHK Wilayah Lebak Tangerang				
						Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat		btg	-	0		0		180.000		180.000		180.000		540.000		Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan				
							1 Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan pedoma teknis		Dok	-	-	-	-	-	4	400.000	5	550.000	5	550.000	14	1.500.000	Seksi Pengelolaan DAS		
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan lahan serta laporan monev RHL secara jelas dan terperinci		Dokumen	0	0	-	0		2		3		3		8				
							Sub Kegiatan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	Terlaksananya Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS sesuai SOP		Dok	0	0	-	0		2		2		2		6				
							2 Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari		Dok		-	-	-	-	7	300.000	7	450.000	7	450.000	21	1.200.000	Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		
							Sub Kegiatan Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar	Terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar		Dok		0	0	0	-	1		1		1		3				
							Sub Kegiatan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	Terbinanya masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi dan lembaga konservasi		Dok		0	-	0	-	2		2		2		6				
							Sub Kegiatan Perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	Tersusunnya Dokumen perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial		dokumen	0	0	-	0	-	2		2		2		6				
							Sub Kegiatan Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex- situ		dokumen	0	0	-	0	-	2		2		2		6				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							3 <u>Kegiatan</u> Penyuluhan Kehutanan	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi		Kelompok	0	0	0	0	0	54	300.000	64	450.000	74	450.000	78	1.200.000	Seksi Penyuluhan Kehutanan		
							<u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan sesuai kompetensi	Jumlah Kelompok peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan (PNS dan Swadaya)	Kelompok	0	0		0		2		2		2		2				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Terlaksananya Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah Kelompok Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	kelompok	0	0		0		50		60		70		70				
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial yang berkompeten	jumlah kelompok Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok	0	0		0		2		2		2		6				
							4 <u>Kegiatan</u> Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target		Ha	0	0	0	0	-	2500	1.275.000	2500	1.700.000	2.500	1.700.000	7.500	4.675.000	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon		
							<u>Sub Kegiatan</u> Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sesuai Target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	ha	0	0		0	-	2500		2500		2.500		7.500				
							5 <u>Kegiatan</u> Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target		ha	0	0	0	0	-	2500	1.275.000	2500	1.546.778	2.500	1.546.778	7.500	4.368.556	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang		
							<u>Sub Kegiatan</u> Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sesuai target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	ha	0	0		0	-	2500		2500		2.500		7.500				
							6 <u>Kegiatan</u> Pengembangan Pemb enihan Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar		batang	0	0	-	0	-	180.100	650.000	180.100	800.000	180.100	800.000	540.300	2.250.000	Seksi Perbenihan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		
							<u>Sub Kegiatan</u> Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif	Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS sesuai standar	Jumlah bibit tanaman hutan dan MPTS	batang		-	-	-	-	180.000		180.000		180.000		540.000				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan Tanaman Hutan dan Produktif	Tersedinya Pengembangan Benih Tanaman Hutan dan MPTS	Jumlah tanaan hutan yang dikembangkan	batang		-	-	-	-	100		100		100		300				
							7 <u>Kegiatan</u> Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP		dokumen	0	0	-	-	-	4	300.000	4	500.000	4	500.000	12	1.300.000	Seksi Sertifikasi UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan		
							<u>Sub Kegiatan</u> pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	Terbinanya pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang) sesuai SOP	Jumlah peserta pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang)	dokumen	0	0		0	-	1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengawasan benih tanaman hutan (laporan)	Terlaksananya Pengawasan benih tanaman hutan (laporan) sesuai SOP	Laporan Pengawasan benih tanaman hutan (laporan)	dokumen	-	0		0	-	1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	Terlaksananya Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS (batang) sesuai SOP	Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS (batang)	dokumen	0	-		0	-	1		1		1		3				
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemeliharaan Alboreteum/ kebun koleksi	Terpeliharanya Alboreteum/ kebun koleksi (laporan) sesuai SOP	Laporan Alboreteum/ kebun koleksi (laporan)	dokumen	0	0		0	-	1		1		1		3				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket			
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							8 <u>Kegiatan</u> Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan TAHURA	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya		Ha		0	-	0	-	1.595,9	250.000	1.595,9	450.000	1.595,9	450.000	1.595,9	1.150.000	Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten			
							<u>Sub Kegiatan</u> Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	Terlaksananya Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	Luas Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	Ha		-	-	-	1.595,9		1.595,9		1.595,9		1.595,9						
							Sub Kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman	Terlaksananya Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati sesuai target	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati	Ha		0		0	-	12,5		12,5		12,5		37,50					
							9 <u>Kegiatan</u> Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan TAHURA	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP	Pengembangan kawasan tahura	dokumen		-	-	-	-	4	300.000	4	550.000	4	550.000	12	1.400.000	Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten			
								<u>Sub Kegiatan</u> Pengembangan Kawasan TAHURA Banten		Terlaksananya pengembangan kawasan tahura	dokumen		-	-	-	-	2		2		2		6				
								<u>Sub Kegiatan</u> Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten		Terlaksananya pemanfaatan kawasan tahura	Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten	dokumen		-	-	-	-	2		2		2			6		
							10 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan)	Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan		ha	100	0	-	0	-	ha	-	ha		ha		ha	-	- Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK Wil Lebak dan Tangerang, - Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan- Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK Wil Pandeglang, Serang, dan Cilegon - Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten			
								Sub kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Terlaksannaya pengembangan hutan rakyat sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan	1 pengembangan hutan rakyat	ha	-	-	-	-		100		100		100		300		-		
								Sub Kegiatan Perlindungan dan rehabilitasi kawasan taman hutan raya banten	Terlaksananya rehabilitasi kawasan Tahura sesuai dengan RPJP	2 Rehabilitasi kawasan Tahura	Ha	-	-		-		-		32		32		64		-		
							Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)																				
II	Tujuan RPJMD : Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Strategi RPJMD : 1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Arah Kebijakan RPJMD : 1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan.		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat				Nilai	2,8	3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		3.5		SEKRETARIS DAERAH			
						Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM			
						Capaian Indeks Reformasi Birokrasi				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A					

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket										
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD													
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target				Rp. (,000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
	Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran		Strategi Renstra : 1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	Arah Kebijakan Renstra : 1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	3. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten				Nilai	CC	B		BB		BB		A		A		A		Kepala DLHK											
							VI. Program Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran												14.344.602,1		11.874.555		14.641.500,0		13.427.810,0		13.427.810,0		67.716.277,1					
									1 <i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala 1-4)</i>	%		2,5	2,8																			Sekretaris DLHK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala UPTD Tahura Banten, Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala CDK Wilayah PSC, Kepala CDK Wilayah LT			
									2 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%		0	0				0			100			100			100			100		100		Sekretaris		
									3 Capaian Kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%		0	0				0			100			100			100			100		100		Sekretaris		
									4 Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi admisnitrasi perangkat daerah	%		0	0				0			100			100			100			100		100		Sekretaris DLHK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala UPTD Tahura Banten, Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala CDLHK Wilayah PSC, Kepala CDLHK Wilayah LT		
									5 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%		0	0				0			100			100			100			100		100		Sekretaris		
									1 <i>Kegiatan :</i> Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel		dok	22	22		47.564	22		64.000	13		64.000	13		77.250,00	13		77.250,00	83	330.064,00	Sub bag Keu DLHK				
									<i>Sub Kegiatan:</i> Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan yang akuntable	Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun Anggaran (1 dok), Laporan SPIP (1 dok),penyusunan laporan keuangan semester I (1 dok), penyusunan laporan realisasi semster dan prognosis 6 bln (1 dok), penyusunan dokumen SPP, SPM,SP2D dan SPJ kegiatan (4 dok)	dok	17	17		17		8		8		8		58											
<i>Sub Kegiatan :</i> Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Tersusunnya Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) yang akuntabel	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk semester 1 dan 2	dok	2	2		2		2		2		2		10																				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak yang akuntabel	Dokumen Pelaporan pajak PPh Ps 21 DLHK prov Banten TA.N (1 dok), Pelaporan pajak PPn, PPh Ps 22 dan PPh ps 23 Keg.DLHK Prov Banten TA.N (1 dok), Pelaporan SPT Pajak tahunan DLHK TA.N (1 dok)	dok	3	3		3		3		3		3		15				
							2 Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Tersedianya Data Pembangunan Sektoral		dok	3	5	236.450	5	180.000	0	-	0	-	0	-	10	416.450,00	Sub Bag PEP		
						1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah			dok	1	1		1		0		0		0		2					
						2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah			dok	0	1		1		0		0		0		2					
						3 Pengelolaan PPID			dok	1	1		1		0		0		0		2					
						4 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat			dok	1	0		1		0		0		0		1					
						5 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial			dok	0	1		1		0		0		0		2					
							3 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu		dok	17	16	167.200	16	270.000	22	450.000	21	618.000,00	22	618.000,00	97	2.123.200,00	Sub Bag PEP		
							Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Program Kegiatan tepat waktu	Penyusunan LKIP DLHK (1 dok), penyusunan LKPJ DLHK (1 dok), Penyusunan LPPD DLHK (1 dok)	dok	3	3		3		3		3		3		15				
							Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan tepat waktu	Penyusunan Renja Tahun N dan N+1 (2 dok), fasilitasi penyusunan RKAP dan DPPA Tahun N (2 dok), Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA Tahun N+1 (2 dok), Penyusunan Perkin dan IKU DLHK N dan N+1 (2 dok), forum Renja (1 dok), dan penyusunan RUP (1 dok)	dok	9	9		9		10		10		10		48				
							Sub Kegiatan : Penyusunan Renstra DLHK	Tersusunnya Dokumen Renstra DLHK yang terukur DLHK	Penyusunan Dokumen Renstra dan Forum Renstra DLHK (1 dok)	dok	1	0		0		0		0		1		1				
							Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pengendalian tepat waktu	Penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kegiatan	dok	4	4		4		4		4		4		20				
							Sub Kegiatan : Penyediaan data dan informasi Pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	1. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah (1 dok), 2. Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah, (1 dok) 3.Pengelolaan website PD (1 tahun), 4.Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik (1 dok) 5. pengelolaan PPID (12 bln) 6.Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (1 dok)	dok	3	0		0		5		4		4		13				
							4 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor		paket	1	1	224.300	1	150.000	0	0	0	0	0	2	374.300,00	Sub Bag Umpeg DLHK			
									1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	1	1		1		0		0		0		2				
							5 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor		bulan	0	12	2.119.315	12	1.000.000	0	0	0	-	0	-	12	3.119.315,00	Sub Bag Umpeg DLHK		
									1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	0	12		12		0		0		0		12				
									2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	0	12		12		0		0		0		12				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							6 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan		bulan	12	12	5.738.080	12	6.052.455	0	0	0	0	0	0	12	11.790.535,00	Sub Bag Umpeg DLHK		
							1 Operasional kantor Tidak tetap			bulan	12	12		12		0		0		0						
							2 Penyediaan Barang Habis Pakai			bulan	12	12		12		0		0		0						
							3 Penyediaan Bahan Cetak			bulan	12	12		12		0		0		0						
							4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor			bulan	12	12		12		0		0		0						
							5 Penyediaan Promosi dan Publikasi			bulan	12	12		12		0		0		0						
							6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor			bulan	12	12		12		0		0		0						
							7 Penyediaan BBM			bulan	12	12		12		0		0		0						
							7 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		bulan	12	12	1.486.768,1	12	200.000,0	0	0	0	0	0	0	12	1.686.768,10	Sub Bag Umpeg DLHK		
								1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		bulan	12	12		12		0		0		0		12				
								2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		bulan	12	12		12		0		0		0		12				
							8 Kegiatan Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna		keg	12 bln	0	0	0	0	12	8.064.620	12	7.943.060,00	12	7.943.060,00	12	23.950.740,00	Sub Bag Umpeg DLHK		
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna	1.Operasional kantor tidak tetap (TKS, Supir, Pramubakti, Satpam dll), 2. Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3.Penyediaan barang habis pakai (ATK untuk 1 dinas), 4.Penyediaan bahan cetak (kebutuhan cetak surat/Amplop dan cetak lainnya), 5. Penyediaan makan dan minum kantor (keb. makan dan minum untuk kegiatan Rutin dinas),6. Penyediaan operasional jasa kantor (telp,Listrik, internet dan PHBI/PHBN,PHBD dll), 7. Penyediaan BBM	keg	12 bln	0		0		7		7		7		7				
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang efektif, efisien dan berdaya guna	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	keg	1	0		0		1		1		1		1				
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang efektif, efisien	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	keg	0	0		0		3		3		3		3				
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksannya Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang efektif, efisien dan berdaya guna	Perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	keg	12 bn	0		0		1		1		1		1				
							9 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur		Aparatur	173	173	130.000	173	113.000	0	0	0	0	0	0	173	243.000,00			
							Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten			Dok	0	0	0	0	0	18	80.000,00	18	103.000,00	18	103.000,00	18	286.000,00			

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian			aparatur	173	173		173		0		0		0		0		Sub Bag Umpeg DLHK		
							Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian yang efektif dan efisien	Fasilitasi kenaikan pangkat dan golongan PNS (1 dok), Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS (1dok), Pemutakhiran data kepegawaian dan Kompetensi pegawai (1 dok), evaluasi SKP (12 dok)	dok	0	0		0		15		15		15		15					
							Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Aparatur			aparatur	173	173		173		0		0		0		0				
							Terlaksananya dokumen peningkatan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien	Fasilitasi kursus, Pelatihan, Bimtek	Dok	0	0		0		3		3		3		3					
						10	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		bulan	12	12	43.650	12	30.000	0	0	0	0	0	12	73.650,00				
								1 Pengelolaan Kearsipan Dinas	bulan	0	12		12		0		0		0		0		0			
								2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas	bulan	0	12		12		0		0		0		0		0			
							Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelnacaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	bulan	12	0	0	0	0	12	50.000	12	51.500,00	12	51.500,00	12	12	153.000,00			
							Sub Kegiatan : Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan perpustakaan OPD sesuai SOP	Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD	bulan	12	0		0		12		12		12		12				
						11	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan		paket	0	1	27.000	1	900.000	0	0	0	0	0	2	927.000,00	SubBag TU pada UPT Lab Lingkungan			
								1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	0	1		1		0		0		0		2					
						12	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan		bulan	12	12	390.000	12	500.000	0	0	0	0	2	890.000,00					
								1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	12	12		12		0		0		0		12					
								2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	12	12		12		0		0		0		12					
								3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/ Laboratorium	unit	0	52		0		0		0		0		52					
						13	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan		bulan	12	12	459.300	12	354.300	0	0	0	0	12	813.600,00					
								1 Operasional Perkantoran	bulan	12	12		12		0		0		0		12					
								2 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	12	12		12		0		0		0		12					

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
									3 <i>Penyediaan Bahan Cetak</i>	bulan	12	12		12		0		0		0		12				
									4 <i>Penyediaan Makan dan Minum Kantor</i>	bulan	12	12		12		0		0		0		12				
									5 <i>Penyediaan Promosi dan Publikasi</i>	bulan	12	12		12		0		0		0		12				
									6 <i>Penyediaan BBM</i>	bulan	12	12		12		0		0		0		12				
									7 <i>Penyediaan Operasional Jasa Perkantoran</i>	bulan	12	12		12		0		0		0		12				
							14 <i>Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan</i>	Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan		bulan	12	12	125.860	12	20.000	0	0	0	0	12	145.860,00					
									1 <i>Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</i>	bulan	12	12		12		0		0		0	12					
									2 <i>Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah</i>	bulan	12	12		12		0		0		0	12					
							15 <i>Kegiatan</i> Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna		keg	0	0	0	0	0	10	1.759.495	10	927.000,00	10	927.000,00	10	3.613.495,00	SubBag TU UPTD Lab Lingkungan		
									<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Lingkungan		keg	0	0		0		5		5		5	5				
									<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		keg	0	0		0		1		1		1	1				
									<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		keg	0	0		0		3		3		3	3				
									<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan		keg	0	0		0		1		1		1	1				
							16 <i>Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan</i>	<i>paket</i>	1	1	322.750	1	50.000	0	0	0	0	2	372.750,00					
1 <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>	<i>paket</i>	0	1		1					0	-	0	-	0	2											
			2 <i>Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor</i>	<i>paket</i>	0	1		0		0		0	1													
17 <i>Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan</i>	<i>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan</i>		bulan	12	12	250.075	12	120.000	0	0	0	0	12	370.075,00												

[illegible]

[illegible]

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatn	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket									
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							<i>28 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang/ CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang</i>		bulan	0	12	297.400	12	460.000	0	0	0	0	0	0	12	757.400,00	Kasubag TU pada BPHW LT									
									<i>1 Operasional Kantor Tidak Tetap</i>	bulan	0	12		12																			
									<i>2 Penyediaan Barang Habis Pakai</i>	bulan	0	12		12																			
									<i>3 Penyediaan Bahan Cetak</i>	bulan	0	12		12																			
									<i>4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor</i>	bulan	0	12		12																			
									<i>5 Penyediaan Promosi dan Publikasi</i>	bulan	0	12		12																			
									<i>6 Penyediaan Operasional Jasa Perkantoran</i>	bulan	0	12		12																			
									<i>7 Penyediaan BBM</i>	bulan	0	12		12																			
									<i>29 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang/CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang</i>		bulan	12	12	43.900	12	55.000	0	0	0	0	0	0	12	98.900,00								
									<i>1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</i>	bulan	12	12		12																			
									<i>2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah</i>	bulan	12	12		12																			
														<i>30 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna</i>		keg	0	0	0	0	0	11,00	835.000,00	11,00	927.000,00	11,00	927.000,00	11,00	2.689.000,00	Sub Bag TU CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang		
										<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang yang efektif, efisien dan berdaya guna</i>	<i>1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourcing), 3.Penyediaan barang habis pakai, 4.Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6.Penyediaan BBM</i>	keg	0	0		0		6		6		6		6								
										<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang yang efektif, efisien dan berdaya guna</i>	<i>Pengadaan Prasaranadan sarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	keg	0	0		0		1		1		1		1								
										<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang yang efektif, efisien</i>	<i>1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK</i>	keg	0	0		0		3		3		3		3								
			<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	<i>Terlaksannya Koordinasi dan Konsutasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang yang efektif, efisien dan berdaya guna</i>	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang</i>	keg	0	0		0		1		1		1		1															
							<i>31 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten /UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten</i>	paket	1	1	41.450	1	135.000	0	0	0	0	0	0	2	176.450,00										

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket		
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
									1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	paket	1	1		1										Sub Bag TU pada Balai Pengelolaan Tahura Banten		
							32 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai/ UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	bulan	12	12	180.000	12	155.000		0	0	0	0	0	12	335.000,00			
									1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	bulan	12	12		12								12				
									2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	bulan	12	12		12								12				
							33 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai/ UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten		bulan	0	12	247.368	12	138.000	0	0	0	0	0	0	12	385.368,00			
									1 Operasional Kantor Tidak Tetap	bulan	12	12		12												
									2 Penyediaan Barang Habis Pakai	bulan	12	12		12												
									3 Penyediaan Bahan Cetak	bulan	12	12		12												
									4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	bulan	12	12		12												
									5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	bulan	12	12		12												
									6 Penyediaan Operasional Jasa Perkantoran	bulan	12	12		12												
									7 Penyediaan BBM	bulan	12	12		12												
							34 Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai/ UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten		bulan	12	12	84.460	12	20.000	0	0	0	0	0	0	12	104.460,00			
									1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	bulan	12	12		12												
									2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	bulan	12	12		12												
							35 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna		keg	0	0	0	0	0	11,00	470.000,00	11,00	927.000,00	11,00	927.000,00	11,00	2.324.000,00			
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang efektif, efisien dan berdaya guna	1. Operasional kantor tdk tetatp, 2.Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman (outsourching), 3.Penyediaan barang habis pakai, 4.Penyediaan makan dan minum kantor, 5. Penyediaan operasional jasa kantor, 6.Penyediaan BBM	keg	0					6		6		6		6				

NO	TUJUAN	Sasaran Daerah/ Sasaran Strategis/ Sasaran Renstra	Strategi RPJMD/Strategi Renstra	Arah Kebijakan RPJMD/Arahkebijakan Renstra	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output F1)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	Ket			
												Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
												Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)	Target	Rp. (,000)				Target	Rp. (,000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							<u>Sub Kegiatan</u> Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Tersedianya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang efektif, efisien dan berdaya guna	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	keg	0					1		1		1		1		Sub Bag TU UPTD TAHURA			
							<u>Sub Kegiatan</u> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang efektif, efisien	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/kantor, 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	keg	0					3		3		3		3					
							<u>Sub Kegiatan</u> Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerahpada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksannya Koordinasi dan Konsutasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang efektif, efisien dan berdaya guna	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	keg	0					1		1		1		1					
JUMLAH PAGU TOTAL														28.200.370		24.534.000		24.821.500		26.593.640		26.593.640		130.743.150			

file: matrik perubahan renstra dlhk 2017-2022 juni 2019 versi 1 print



PROVINSI BANTEN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	3 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1205.01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	2.5 Skala	2,80		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter)/(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun) x 100 %		
					2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00	
					3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00	
					4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00	
					5 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00				100,00	
			1205.120501.00.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 dok	17,00	47.564.000,00	17,00	64.000.000,00	8,00	64.000.000,00	8,00	77.250.000,00	8,00	77.250.000,00	58,00	330.064.000,00	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang akuntabel		
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 dok	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00			Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk semester 1 dan 2		
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 dok	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00			Jumlah Dokumen Laporan Pajak yang akuntabel		
			1205.120501.00.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 Dokumen	3,00	167.200.000,00	3,00	270.000.000,00	3,00	450.000.000,00	3,00	618.000.000,00	3,00	618.000.000,00	15,00	2.123.200.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Program Kegiatan		
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	9,00		9,00		10,00		10,00		10,00		48,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan		
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian		
					4 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	3 Dokumen	0,00		0,00		5,00		4,00		4,00		13,00			jumlah dokumen data dan informasi pembangunan		
					5 Penyusunan Renstra DLHK	1 Dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00			Jumlah Dokumen Renstra DLHK		
			1205.120501.00.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 paket	1,00	224.300.000,00	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	374.300.000,00					
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00	2.119.315.000,00	12,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3.119.315.000,00		
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan	12 bulan	12,00	5.738.080.000,00	12,00	6.052.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11.790.535.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	173 aparatur	173,00	130.000.000,00	173,00	113.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	529.000.000,00	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten	
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	173 aparatur	173,00		173,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
					3 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00		0,00		15,00		15,00		15,00		15,00		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang efektif dan efisien	
					4 Peningkatan Kompetensi Aparatur	0 dokumen	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur	
			1205.120501.00.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 bulan	12,00	1.486.768.100,00	12,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.686.768.100,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	1 Pengelolaan Kearsipan Dinas	0 bulan	12,00	43.650.000,00	12,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	12,00	226.650.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
					2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas	0 bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD	0 Bulan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
			1205.120501.00.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	0 Tersedianya Data Pembangunan Sektoral	3 dok	5,00	236.450.000,00	5,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	416.450.000,00		
					1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					3 Pengelolaan PPID	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					4 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.010	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 paket	1,00	27.000.000,00	1,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	927.000.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	390.000.000,00	12,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	890.000.000,00		
			1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium		0 Unit	52,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52,00				
			1205.120501.00.01.012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	459.300.000,00	12,00	354.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	813.600.000,00		
			1 Operasional Perkantoran		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Penyediaan Barang Habis Pakai		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			3 Penyediaan Bahan Cetak		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			6 Penyediaan BBM		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.013	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	125.860.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	145.860.000,00		
			1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.014	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	1 paket	1,00	322.750.000,00	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	372.750.000,00		
			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00				
			2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor		0 Paket	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
			1205.120501.00.01.015	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	250.075.000,00	12,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	370.075.000,00		
			1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	287.512.000,00	12,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	487.512.000,00		
					1 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Operasional kantor tidak tetap	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					8 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.017	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	90.000.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	110.000.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.018	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 paket	1,00	350.000.000,00	1,00	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	457.700.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.019	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 bulan	12,00	200.000.000,00	12,00	110.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	310.100.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 bulan	12,00	297.400.000,00	12,00	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	757.400.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.021	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	12,00	43.900.000,00	12,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	98.900.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.022	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 paket	1,00	200.000.000,00	1,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	270.000.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.023	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 bulan	12,00	140.000.000,00	12,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	270.000.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran padaBPHW-PSC	0 bulan	12,00	314.200.000,00	12,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	539.200.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.025	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	12,00	100.000.000,00	12,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	145.000.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.026	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	1 paket	1,00	41.450.000,00	1,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	176.450.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.027	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	12 bulan	12,00	180.000.000,00	12,00	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	335.000.000,00		
			1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 bulan	12,00	247.368.000,00	12,00	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	385.368.000,00		
			1 Operasional kantor Tidak Tetap		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Penyediaan Barang Habis Pakai		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			3 Penyediaan Bahan Cetak		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			7 Penyediaan BBM		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.029	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	12 bulan	12,00	84.460.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	104.460.000,00		
			1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.046	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8.064.620.000,00	7,00	7.943.060.000,00	7,00	7.943.060.000,00	7,00	23.950.740.000,00	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah Kegiatan penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
			2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		1 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
			3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		
			4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		jumlah kegiatan Perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah		
			1205.120501.00.01.047	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Lingkungan	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.759.495.000,00	5,00	927.000.000,00	5,00	927.000.000,00	5,00	3.613.495.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah Kegiatan Penyediaan barang dan jasa Perkantoran pada UPTD Lab Lingkungan
			2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor pada UPTD Lab Lingkungan		
			3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		
			4 Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan		0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumah kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.01.048	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	835.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	2.689.000.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	terlaksananya penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			jumlah kegiatan Pengadaan Prasarana dan sarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
					4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
			1205.120501.00.01.049	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.769.650.000,00	11,00	927.000.000,00	11,00	927.000.000,00	11,00	3.623.650.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah kegiatan Pengadaaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
					4 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
			1205.120501.00.01.050	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.098.735.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	2.952.735.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantorpada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan sarana prasarana kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perenihan Tanaman Hutan
					4 Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
			1205.120501.00.01.051	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	470.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	2.324.000.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
					4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerahpada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1205.15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203 Kelompok	52,00		60,00		0,00		0,00		0,00		112,00		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan pelayanan laboratorium Lingkungan	
					2 Indeks Kualitas Air	51 Nilai	51,50		52,00		52,50		53,00		53,50		53,50			Akar {(Ci/Lij)m2 + (Ci/Lij)R2/2}
					3 Indeks Kualitas Udara	58.8 Nilai	59,00		59,20		66,80		68,80		70,80		70,80			(IPU_NO2+ IPU_SO2)/2
					4 Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	0 %	0,00		0,00		16,90		17,60		19,00		19,00			(% IK Peningkatan Kompete+% IK Pelayanan+% IK Sapras+% IK Barjas+% IK Rakor)/(Total % IK) x 100
			1205.120501.00.15.001	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	1 Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota	0 Dokumen	1,00	1.212.092.800,00	0,00	503.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	1,00	3.215.092.800,00	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi	
					2 Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan	
					3 Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 sungai)	0 Dokumen	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					4 Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Pemantauan Kualitas Air Laut	0 Lokasi	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri	0 Peserta	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					7 Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	0 Lokasi	0,00		17,00		0,00		0,00		0,00		17,00			
					9 pemantauan kualitas udara ambien	22 Lokasi	22,00		22,00		0,00		0,00		0,00		22,00			
					10 penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	0 Dokumen	3,00		1,00		1,00		1,00		1,00		7,00			Jumlah dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan
					11 Pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	40 industri	40,00		120,00		0,00		0,00		0,00		160,00			
					12 pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen pematauauan kualitas air dan kerusakan situ/danau
					13 pemantauan kualitas udara ambien	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen pemantauan kualitas udara ambien

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.15.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1 Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah	0 Dokumen	1,00	746.000.000,00	0,00	1.154.000.000,00	0,00	1.180.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1,00	6.080.000.000,00	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3	
					2 Fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 pembinaan teknis pengelolaan limbah B3	0 Peserta	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan Limbah B3	0 Industri	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					6 Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (Insdutri, fasyankes dan hotel)	0 Penghasil Limbah B3	75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00			
					7 Pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	0 Penghasil Limbah B3	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	0 Dokumen	0,00		1,00		1,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	
					9 Pengelolaan sampah	2 Lembaga	1,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
					10 Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	40 Industri	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					11 Pengelolaan sampah	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan pembinaan dan pengelolaan sampah	
					12 Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan industri pengelola limbah B3 yang dipantau dan dievaluasi, 1 dokumen per tahun	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.15.003	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1 Penyusunan profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	0 Dokumen	1,00	1.239.000.000,00	0,00	480.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	686.132.500,00	0,00	686.132.500,00	1,00	3.591.265.000,00	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP	
					2 Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Sosialisasi terpadu kampung iklim	0 Kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Kegiatan Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Studi kelayakan pembentukan kawasan mangrove center	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Rapat koordinasi program pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	0 Dokumen	8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					8 Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					9 Pengembangan Mangrove provinsi Banten	0 Dokumen	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00			Jumlah Dokumen Pengembangan mangrove provinsi Banten
					10 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	0 Dok	0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					11 Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	0 Lokasi	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					12 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (kampung iklim)	16 Kampung	32,00		16,00		0,00		0,00		0,00		48,00			
					13 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	1 Laporan	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					14 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservasi dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari
					15 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kampung iklim danlaporan pemantauan pengawasan Bahan Perusak Ozon (BPO)
					16 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.15.004	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	0 Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP	100 %	100,00	530.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	860.000.000,00		
					1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					2 Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	8 dok	0,00		7,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					10 Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	130 orang	0,00		130,00		0,00		0,00		0,00		130,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.15.005	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	0 Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP	100 %	100,00	458.640.000,00	100,00	355.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	813.640.000,00		
					1 Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten	0 Usaha/ Kegiatan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					2 Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					3 Peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	0 Industri	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00			
					6 Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 kasus/%	20,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					7 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200 Industri	165,00		100,00		0,00		0,00		0,00		310,00			
					9 Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	0 Industri	165,00		44,00		0,00		0,00		0,00		105,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			1205.120501.00.15.006	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	0 meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP	100 %	100,00	348.310.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	768.310.000,00			
					1 Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	0 Sekolah	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					2 BinteK Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional dan Mandiri	0 Orang	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					3 Verifikasi dan penilaian Green School	0 Sekolah	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					4 Pemantauan Adipura	0 Kab/Kota	7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7,00				
					5 Pemberdayaan masyrakat hukum adat di Provinsi Banten	0 Kelompok	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00				
					6 Pembinaan Saka Wana Bhakti	0 satuan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					7 Pembinaan Saka Kalpataru	0 satuan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					8 Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	188 Sekolah	25,00		25,00		0,00		0,00		0,00		50,00				
					9 Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	7 Kota	7,00		7,00		0,00		0,00		0,00		7,00				
					10 Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	5 Kelompok/ Saka	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00				
			1205.120501.00.15.007	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	1 Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)	0 org	25,00	301.310.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	25,00	1.576.310.000,00	Prosentase peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO/IEC 17025 Tahun 2017		
					2 Pelatihan Berbayar	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					3 Bimbingan Teknis ISO 17025	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					4 Bimbingan Teknis Parameter BOD	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					5 Uji Profesional	0 org	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00				
					6 Akreditasi/Audit eksternal	0 Dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					7 Bimbingan Teknis Parameter COD	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					8 Bimbingan Teknis Parameter Pestisida	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					9 Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					10 Akreditasi/Survailan	0 parameter	0,00		25,00		30,00		35,00		40,00		40,00				Jumlah Parameter Akreditasi/Survailan
					11 Jaminan mutu laboratorium lingkungan	0 org	0,00		150,00		0,00		0,00		0,00		150,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			1205.120501.00.15.008	Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	1 Rapat Teknis Analisa dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran	0 1 kali	1,00	579.823.100,00	0,00	682.900.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	1,00	2.262.723.100,00	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu		
					2 Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumen Laboratorium	0 jenis	34,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,00				
					3 Pengolahan Limbah Laboratorium	0 bulan	12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
					4 Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	0 sample	144,00		174,00		174,00		234,00		234,00		234,00		234,00		Jumlah Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal
					5 Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal	50 industri	50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		100,00				
					6 Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal	0 Sample	0,00		0,00		25,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Jumlah Pengambilan Sample dalam pelayanan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan eksternal
			1205.120501.00.15.014	DAK Lingkungan Hidup	0 Meningkatnya ketersediaan pengadaan sarana dan prasarana lab Lingkungan Hidup sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017	0 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00			
					1 Pengadaan sarana prsarana lab lingkungan	0 paket	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00				
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1205.16	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	0 %	0,00		0,00		98,00		98,00		100,00		100,00		MMeningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha yang diperiksa / jumlah pelaku usaha yang melanggar Jumlah yang melanggar x 100 %	
					2 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203 Kelompok	0,00		0,00		68,00		76,00		78,00		222,00			Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat	
			1205.120501.00.16.001	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	1 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	350.000.000,00	8,00	300.000.000,00	8,00	300.000.000,00	21,00	950.000.000,00	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP	Jumlah Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	
					2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dan divalidasi	
					3 Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	
			1205.120501.00.16.002	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	1 Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	400.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	3,00	1.000.000.000,00	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	
					2 Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	
			1205.120501.00.16.003	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	1 Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	400.000.000,00	25,00	331.767.500,00	25,00	331.767.500,00	75,00	1.063.535.000,00	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP	Jumlah Lembaga/Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dibina	
					2 Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	0 Lembaga	0,00		0,00		7,00		7,00		7,00		7,00			Jumlah lembaga/Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibina dan dinilai	
					3 Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	5 Lembaga	0,00		0,00		2,00		5,00		5,00		5,00			jumlah Lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	38 %	10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					2 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi	69466 Ha	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00			
			2004.120501.00.15.001	Perencanaan dan penatagunaan hutan	0 Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan	100 %	100,00	290.000.000,00	100,00	415.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	705.000.000,00		
					1 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					2 Penyusunan Statistik Kehutanan	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	0 Dokumen	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					6 Perencanaan hutan	2 Dokumen	1,00		6,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					7 Pemantapan kawasan hutan	6 KPH	0,00		6,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			2004.120501.00.15.002	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	0 Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan	100 %	100,00	339.020.000,00	100,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	789.020.000,00		
					1 Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU	0 Kelompok	21,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21,00			
					2 Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Unit - unit Manajemen Hutan Rakyat (FMU)	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara manual dan online	0 Industri	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					4 Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Iuran Kehutanan (WASGANISDAN GANIS PHPL)	0 Industri	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00			
					5 Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	15 Kelompok	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Penatausahaan hasil hutan	180 Industri	180,00		180,00		0,00		0,00		0,00		180,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.003	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	0 Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	100 %	100,00	507.840.500,00	100,00	606.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.114.090.500,00		
					1 Pameran Indogreen Forestry Expo	1 Komoditas	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00			
					2 Pameran Banten Expo	1 Komoditas	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00			
					3 Pelatihan Pengolahan Gura Aren Menjadi Gula Semut	0 Orang	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00			
					4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					5 Pelatihan Budidaya Lebah Madu	0 Orang	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Pengembangan aneka usaha kehutanan	36 Komoditas	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00			
					7 Pengembangan kawasan bambu terpadu	0 Dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Promosi aneka usaha kehutanan	2 Event	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00			
			2004.120501.00.15.004	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Terlaksananya pengelolaan DAS	100 %	100,00	784.100.000,00	100,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.384.100.000,00		
					1 perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	3 dok	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
					2 Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	0 Ha	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00			
					3 Rehabilitasi wilayah Daerah aliran Sungai (DAS)	0 DAS	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					4 Penghijauan lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3000 batang	3.000,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00			
					5 Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Pembinaan Forum DAS	5 forum	5,00		6,00		0,00		0,00		0,00		6,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.15.005	Konservasi SDA dan Ekosistem	0 Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari	100 %	100,00	318.015.500,00	100,00	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	693.015.500,00		
					1 Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata Alam di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	0 angkatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pembentukan Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satwa Liar di Provinsi Banten	0 unit	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 angkatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Sosialisasi Mitigasi Bencana di Sekitar Kawasan Hutan	0 angkatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					5 Pemulihan kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi	0 unit	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Pengendalian Penangkar tumbuhan dan satwa liar'	50 org	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					7 Penanganan daerah penyangga kawasan konservasi	10 Kelompok	4,00		6,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					8 Pemberdayaan Lembaga konservasi	0 lembaga	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					9 Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem esensial	0 dok	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					10 Perencanaan dan pembentukan taman kehati banten	0 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					11 Perencanaan pembentukan lembaga konservasi Ex Situ	0 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.006	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan.	100 %	100,00	454.000.000,00	100,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	904.000.000,00		
					1 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	0 Orang	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					2 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	0 KTH	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					3 Lomba Wana Lestari	0 Event	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan	0 KTH	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	0 orang	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					6 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	35 orang	0,00		56,00		0,00		0,00		0,00		56,00			
					7 Peningkatan peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	34 Kelompok	0,00		56,00		0,00		0,00		0,00		56,00			
					8 Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	0 orang	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					9 Pengembangan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	34 Kelompok	0,00		43,00		0,00		0,00		0,00		43,00			
					10 Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	1 dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			2004.120501.00.15.007	Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	100 %	100,00	620.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	620.700.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)	0 Unit	8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					3 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		1.250,00		0,00		0,00		0,00		1.250,00			
					5 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	0 Kelompok	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	32 Industri	0,00		32,00		0,00		0,00		0,00		32,00			
					7 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	0 Penagkar/ Pengedar	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.008	Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Serang dan Cilegon	100 %	100,00	532.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	532.800.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	0 Batang	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00			
					3 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)	0 Unit	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					4 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00			
					5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		750,00		0,00		0,00		0,00		750,00			
					6 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	5 Kelompok	0,00		9,00		0,00		0,00		0,00		9,00			
					7 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	0,00		81,00		0,00		0,00		0,00		81,00			
					8 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	5 Penagkar/ Pengedar	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
			2004.120501.00.15.009	Pengelolaan Hutan wilayah Lebak	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak	100 %	100,00	826.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	826.000.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)	0 Unit	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					3 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		1.950,00		0,00		0,00		0,00		1.950,00			
					5 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Kelompok	0,00		21,00		0,00		0,00		0,00		21,00			
					6 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	20 Industri	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
			2004.120501.00.15.010	Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang	100 %	100,00	376.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	376.000.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	0 Batang	7.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.000,00			
					3 Pembuatan Sumur Resapan	0 Unit	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					4 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					6 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	0,00		82,00		0,00		0,00		0,00		82,00			
					7 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	0 Penagkar/ Pengedar	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.15.011	Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	0 Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar	0 %	100,00	466.000.000,00	100,00	503.750.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	969.750.000,00		
					1 Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS	145000 batang	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		1.000.000,00			
					2 Penelusuran sumber benih unggul	0 Lokasi	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					3 Bimbingan teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan dan MPTS	0 orang	80,00		80,00		40,00		60,00		60,00		330,00			
					4 Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan endemik Banten	0 Jenis	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					5 Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul	0 Unit	3,00		3,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					6 Monitoring dan Evaluasi penyalur bibit tanaman kehutanan dan MPTS	0 Kab/ Kota	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00			
			2004.120501.00.15.012	Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan	0 Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	100 %	100,00	82.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82.150.000,00		
					1 Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan	0 Orang	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					2 Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan	0 Unit	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					3 Pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang)	11 Orang/ Pengelola	26,00		30,00		0,00		0,00		0,00		56,00			
					4 Pengawasan benih tanaman hutan	0 benih	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					5 Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Batang	500,00		10.500,00		0,00		0,00		0,00		11.000,00			
			2004.120501.00.15.013	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	100 %	100,00	320.000.000,00	100,00	271.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	591.000.000,00		
					1 Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	1595.9 Ha	1.595,90		1.595,90		0,00		0,00		0,00		1.595,90			
					2 Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	200 Hektar	32,00		32,00		0,00		0,00		0,00		32,00			
					3 Penyediaan koleksi species lokal/ endemik/ langka/ terancam punah	0 Species	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
			2004.120501.00.15.014	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP	100 %	100,00	211.966.000,00	100,00	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	472.966.000,00			
					1	Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna	0 dokumen	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00				
					2	Penataan Batas Lapang	0 blok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					3	Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi	0 dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					4	Peningkatan Pengelolaan Objek Wisata dan Pengunjung	0 kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					5	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar	0 kegiatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00				
					6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	0 kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					7	Rintisan dan Peningkatan Kolaborasi/Kerjasama Kegiatan	0 kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					8	Peningkatan Kunjungan TAHURA Banten	26000 orang	0,00		39.500,00		0,00		0,00		0,00		39.500,00				
					9	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pemanfaatan Wisata	2 unit	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00				
			2004.120501.00.15.015	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)	0	Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan	100 %	100,00	2.312.000.000,00	100,00	1.407.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.545.000,00			
					1	pengembangan hutan rakyat	0 ha	300,00		300,00		0,00		0,00		0,00		600,00				
					2	penghijauan lingkungan (MPTS)	0 batang	10.500,00		10.500,00		0,00		0,00		0,00		21.000,00				
					3	pengembangan komoditas unggulan tanaman kehutanan	0 ha	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00				
					4	Rehabilitasi Lahan Secara Sipil Teknis	0 unit	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00				
			2004.120501.00.15.016	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	0	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160.000.000,00			
					1	Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang)	0 Orang/ Pengelola	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00				
					2	Pengawasan benih tanaman hutan	0 lap	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00				
					3	Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Batang	0,00		10.500,00		0,00		0,00		0,00		10.500,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			2004.120501.00.15.017	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	280.600.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	280.600.000,00		
					1	Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 Dokumen	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0 pelaku usaha	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					3	Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan	0 Industri	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					4	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 Penangkar	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					5	Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 Orang	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					6	Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0 Orang	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
			2004.120501.00.15.018	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	225.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	225.000.000,00		
					1	Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 Dokumen	0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					2	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0 pelaku usaha	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			2004.120501.00.15.019	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target	0 %	0,00	0,00	100,00	1.154.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.154.400.000,00		
					1	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Unit	0,00		16,00		0,00		0,00		0,00		16,00			
					2	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan	0 Kelompok	0,00		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
					3	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.020	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target	0 %	0,00	0,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.300.000.000,00		
					1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar	0,00		23,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00			
					2 Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	5 Kelompok	0,00		2,00		6,00		8,00		11,00		25,00			
					3 Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	1 Dokumen	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00			
			2004.120501.00.15.021	Pengelolaan DAS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.00.15.022	Penyuluhan Kehutanan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1 Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	0 %	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Meningkatnya fungsi lahan dan hutan	(25% x realisasi pemanfaatan kasawan)+(50% x realisasi hasil hutan kayu)+(25% x Realisasi HHBK) / (baseline pemanfaatan kawasan + baseline hasil hutan kayu + baseline HHBK) x 100 %
					2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Kelompok	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasn dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)
					3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Kelompok	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasn dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)
			2004.120501.00.16.001	Perencanaan dan penatagunaan hutan	1 Perencanaan hutan	2 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300.000.000,00	4,00	400.000.000,00	4,00	400.000.000,00	11,00	1.100.000.000,00	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan	Jumlah dokumen perencanaan hutan (Dok)
					2 Pemantapan kawasan hutan	6 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Kawasan Hutan (dok)	
			2004.120501.00.16.002	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	1 Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	3,00	1.100.000.000,00	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan	Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri
					2 Penatausahaan hasil hutan	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	
			2004.120501.00.16.003	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	1 Pengembangan dan Promosi aneka usaha kehutanan	0 Komoditas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300.000.000,00	3,00	441.152.000,00	3,00	441.152.000,00	3,00	1.182.304.000,00	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	jumlah kemeditas usaha kehutanan
					2 Pengembangan kawasan bambu terpadu	0 Komoditas	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Komoditas Pengembang kawasan bambu terpadu	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.16.004	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200.000.000,00	3,00	280.000.000,00	3,00	280.000.000,00	9,00	760.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi
					2 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	
					3 Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	
					4 Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	
			2004.120501.00.16.005	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200.000.000,00	3,00	280.000.000,00	3,00	280.000.000,00	9,00	760.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi
					2 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	
					3 Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	
					4 Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.17	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	0 %	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Meningkatnya Pendendalian DAS,Konservasi Hutan dan luas lahan kritis yang terehabilitasi serta Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	(Jml Realisasi DAS yang ditangani + Jml Realisasi KEE yang ditangani) / (Jumlah Target DAS + Jumlah Target KEE) x 100 %
					2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan	0 Kelompok	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat	
					3 Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	0 Batang	0,00		0,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		540.000,00		Jumlah bibit yang terdistribusi	
					4 Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	0 %	0,00		0,00		12,50		12,50		12,50		37,50		Kontribusi Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi + Kontribusi Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan X 100 %	
					5 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	0 Ha	0,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00		Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	
					6 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Ha	0,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00		Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.17.002	Konservasi SDA dan Ekosistem	1 Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	450.000.000,00	1,00	450.000.000,00	3,00	1.200.000.000,00	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar
					2 Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi		
					3 Perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
					4 Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ		
			2004.120501.00.17.004	Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	1 Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif	0 Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	650.000.000,00	180.000,00	800.000.000,00	180.000,00	800.000.000,00	180.000,00	2.250.000.000,00	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar	Jumlah bibit tanaman hutan dan MPTS
					2 Pengembangan Tanaman Hutan dan Produktif	0 Batang	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Jumlah tanaman hutan yang dikembangkan		
			2004.120501.00.17.005	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1 Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,90	250.000.000,00	1.595,90	450.000.000,00	1.595,90	450.000.000,00	1.595,90	1.150.000.000,00	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	Luas Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA
					2 Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	0 Hektar (Ha)	0,00		0,00		12,50		12,50		12,50		37,50	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati		
			2004.120501.00.17.006	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1 Pengembangan Kawasan TAHURA Banten	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300.000.000,00	2,00	550.000.000,00	2,00	550.000.000,00	6,00	1.400.000.000,00	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP	Pengembangan kawasan tahura
					2 Pemanfaatan Kawasan TAHURA Banten	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten		
			2004.120501.00.17.007	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	1 Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	3,00	1.300.000.000,00	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Jumlah peserta pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan
					2 Pengawasan benih tanaman hutan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	Laporan Pengawasan benih tanaman hutan		
					3 Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS		
					4 Pemeliharaan Alboreteum/ kebun koleksi	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	Laporan Alboreteum/ kebun koleksi		
			2004.120501.00.17.008	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.275.000.000,00	2.500,00	1.546.778.000,00	2.500,00	1.546.778.000,00	7.500,00	4.368.556.000,00	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
			2004.120501.00.17.009	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.275.000.000,00	2.500,00	1.700.000.000,00	2.500,00	1.700.000.000,00	7.500,00	4.675.000.000,00	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
			2004.120501.00.17.010	Pengelolaan DAS	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	400.000.000,00	3,00	550.000.000,00	3,00	550.000.000,00	8,00	1.500.000.000,00	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu	Dokumen Perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan dan Monev RHL
					2 Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Laporan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.17.011	Penyuluhan Kehutanan	1 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	0 kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300.000.000,00	2,00	450.000.000,00	2,00	450.000.000,00	2,00	1.200.000.000,00	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi	Jumlah Kelompok peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan (dan Swadaya)
				2 Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	0 kelompok	0,00		0,00		50,00		60,00		70,00		70,00	Jumlah Kelompok Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)			
				3 Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	0 kelompok	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	jumlah kelompok Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial			

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES

Lampiran 3. Definisi Operasional, Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance

Tujuan Daerah :

- Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah:

- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis EsselonII						Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD	ASPEK PENILAIAN				
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN	
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi	
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya	
					TOTAL	100		
	Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III)							
	Program : Tata Kelola Pemerintahan							
1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan parameter penilaian Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}}{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}} \times 100$				Sekretaris

Lampiran 3. Definisi Operasional, Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance

Tujuan Daerah :

- Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah:

- Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		1. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	$\frac{\Sigma \text{Pegawai yang mendapat sertifikat kompetensi pada tahun } n}{\Sigma \text{Jumlah Pegawai yang dilatih pada tahun } n} \times 100$	Sekretaris
		2. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah laporan yang telah sesuai dengan Standar Akuntasni Pemerintah Formulasi Perhitungan: $\frac{\Sigma \text{Laporan yang sesuai SAP}}{\Sigma \text{Laporan}} \times 100$	Sekretaris
		3. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Capaian Dukungan Sarana Prasarana Prasarana Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	$\frac{\Sigma \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran}}{\Sigma \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia}} \times 100$ Sarana Administrasi Perkantoran: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran 4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran	Sekretaris DLHK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala UPTD Tahura Banten, Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala CDK Wilayah PSC, Kepala CDK Wilayah LT

Lampiran 3. Definisi Operasional, Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
Tujuan Daerah : - Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal					
Sasaran Daerah: - Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas - Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal					
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis EsselonII			
1	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air dan hutan.	$IKLH \text{ Provinsi} = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Keterangan : IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan Keterangan : IPA = IKA IPU = IKU	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Meningkatnya pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	2. Rasio Cakupan Tutupan Hutan	Perbandingan Luas Tanaman Hutan ditambah dengan Luas Hutan Rakyat dibagi Luas Provinsi Banten	$Rasio \text{ Tutupan Hutan} = \frac{LTH + LHR}{Luas \text{ Provinsi}} \times 100\%$ Ketetapan : LTH = Luas Tanaman Hutan LHR = Luas Hutan Rakyat Catatan : 1. Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS/Banten dalam angka	

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
Tujuan Daerah : - Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal					
Sasaran Daerah: - Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas - Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal					
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
NO	Sasaran	Indikator Kinerja program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III)				
	Program : Pengendalian Pencemaran Lingkungan				
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan pelayanan laboratorium Lingkungan	1. Indeks Kualitas Air (nilai)	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat (kondisi) kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_M^2 + (C_i / L_{ij})_R^2}{2}}$ IPj = indeks pencemaran bagi peruntukan j, Ci = konsentrasi parameter kualitas air i, Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j, M = maksimum, R = rerata.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
		2. Indeks Kualitas Udara (nilai)	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat sifat unsur pembentuknya dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IPU = \frac{IPU_{NO2} + IPU_{SO2}}{2}$ IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2 = Indeks Pencemar NO2 IPSO2 = Indeks Pencemar SO2	
		3. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	Pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan	$IK = \frac{\% IK \text{ Peningkatan Kompete} + \% IK \text{ Pelayanan} + \% IK \text{ Sapras} + \% IK \text{ Barjas} + \% IK \text{ Rakor}}{\text{Total \% IK}} \times 100$	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
	Program : Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LingkunganHidup				
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat ket: kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan kajian dampak dan kapasitas lingkungan hidup serta pengaduan penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi																	
Tujuan Daerah : - Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal																	
Sasaran Daerah: - Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas - Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal																	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																	
NO	Sasaran	Indikator Kinerja program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab												
		2. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	$\text{Ketaatan} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} - \text{jumlah pelaku usaha yang melanggar}}{\text{Jumlah yang melanggar}} \times 100 \%$													
	Program : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan																
3	Meningkatnya fungsi lahan dan hutan	1. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	Pemanfaatan hutan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa ingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.	Perhitungan = $\frac{(25\% \times \text{realisasi pemanfaatan kawasan}) + (50\% \times \text{realisasi hasil hutan kayu}) + (25\% \times \text{realisasi HHBK})}{(\text{baseline pemanfaatan kawasan} + \text{baseline hasil hutan kayu} + \text{baseline HHBK})} \times 100 \%$ <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pemanfaatan</th><th>Baseline</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemanfaatan Kawasan</td><td>Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hasil Hutan Kayu</td><td>Produksi kayu saat ini: 415.000 M³/Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M³/Tahun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)</td><td>Pengembangan komoditas HHBK : Saat ini - Madu - Aren - Jamur Tiram - Bambu</td></tr></table>	No	Jenis Pemanfaatan	Baseline	1.	Pemanfaatan Kawasan	Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha	2.	Hasil Hutan Kayu	Produksi kayu saat ini: 415.000 M³/Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M³/Tahun	3.	Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	Pengembangan komoditas HHBK : Saat ini - Madu - Aren - Jamur Tiram - Bambu	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
No	Jenis Pemanfaatan	Baseline															
1.	Pemanfaatan Kawasan	Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha															
2.	Hasil Hutan Kayu	Produksi kayu saat ini: 415.000 M³/Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M³/Tahun															
3.	Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	Pengembangan komoditas HHBK : Saat ini - Madu - Aren - Jamur Tiram - Bambu															
		2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan yang memanfaatkan hasil hutan sebanyak 3 kelompok pertahun	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyrakat yang berperan dalam pengawsan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon												

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
Tujuan Daerah : - Meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan berbasis potensi ekonomi lokal					
Sasaran Daerah: - Meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas - Meningkatkan Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal					
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
NO	Sasaran	Indikator Kinerja program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan yang memanfaatkan hasil hutan sebanyak 3 kelompok pertahun	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun Peningkatan Peran serta masyarakat = $\frac{\text{Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyrakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)}}{\text{Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun}}$	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang
	Program : Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan				
4	Meningkatnya pengendalian DAS, Konservasi Hutan dan Luas lahan kritis yang terehabilitasi serta peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan, dan konservasi hutan	1. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	Persentase DAS dan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) yang di tangani setiap tahun.	$\frac{\sum \text{Realisasi DAS yang ditangani} + \sum \text{Realisasi KEE yang ditangani}}{\sum \text{Target DAS} + \sum \text{Target KEE}} \times 100$	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE
		2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat	
		3. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	prosentase kegiatan Pengelolaan Tahura Banten	Rumus Peningkatan Fungsi UPTD TAHURA = $\frac{\text{Kontribusi Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi} + \text{Kontribusi Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100$	Kepala UPTD Pengelolaan TAHURA Banten
		4. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya	Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
		5. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya	Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang

Misi 5: Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi					
Tujuan Daerah : - Meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal					
Sasaran Daerah: - Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas - Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal					
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
NO	Sasaran	Indikator Kinerja program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		6. Tersedianya benih/bibit unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	Jumlah bibit yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	Jumlah bibit yang terdistribusi	Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB																												
					2018	2019	2020	2021	2022																															
1	2	3	4	5	6					7	8	9																												
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Indikator Kinerja Sasaran IKU (esselon II) Meningkatnya pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70	75	80	85	85	Untuk mendorong Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD	ASPEK PENILAIAN <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>KOMPONEN</th><th>BOBOT</th><th>SUB KOMPONEN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>35</td><td>Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>20</td><td>Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td><td>Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>10</td><td>Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pencapaian Kinerja</td><td>20</td><td>Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL</td><td>100</td><td></td></tr> </tbody> </table>		KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN	1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja	2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja	4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi	5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya		TOTAL	100		Kepala Dinas
	KOMPONEN	BOBOT	SUB KOMPONEN																																					
1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja																																					
2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran																																					
3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja																																					
4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi																																					
5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya																																					
	TOTAL	100																																						
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	2 Indeks kualitas Lingkungan Hidup	44,17	44,67	50,87	51,83	52,79	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air dan hutan.	$IKLH \text{ Provinsi} = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Keterangan : IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan Keterangan : IPA = IKA IPU = IKU	Kepala Dinas																													
		Meningkatnya pengelolaan dan konservasi hutan	3 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	31,21	31,71	32,21	32,71	33,21	Perbandingan Luas Tanaman Hutan ditambah dengan Luas Hutan Rakyat dibagi Luas Provinsi Banten	$\text{Rasio Tutupan Hutan} = \frac{LTH + LHR}{\text{Luas Provinsi}} \times 100\%$ Keterangan : LTH = Luas Tanaman Hutan LHR = Luas Hutan Rakyat Catatan : 1. Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS Banten dalam angka _____ 1. Luas Provinsi Banten menggunakan sumber data dari BPS/Banten dalam angka _____	Kepala Dinas																													

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB																									
					2018	2019	2020	2021	2022																												
1	2	3	4	5	6					7	8	9																									
		LINGKUNGAN HIDUP	Indikator Kinerja Program (eselon III)																																		
			Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (satuan Skala (1- 4)	2,8	3	0	0	0	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	IKM = $\frac{\sum \text{dari nilai perasap per unsur}}{\text{total unsur yang terasap}}$ x nilai penimbang IKM Unit Pelayanan x 25 <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kemua Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 - 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kemua Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik	Sekretaris DLHK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala UPTD Tahura Banten, Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala CDK Wilayah PSC, Kepala CDK Wilayah LT
			Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kemua Unit Pelayanan																														
			1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																														
			2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																														
			3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																														
			4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																														
Program Tata Kelola Pemerintahan	2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)	0	0	100	100	100	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan parameter penilaian Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}}{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}} \times 100$	Sekretaris DLHK																												
Program Tata Kelola Pemerintahan	4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	100	100	100	Capaian kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah	$\frac{\sum \text{Pegawai yang mendapat sertifikat kompetensi pada tahun n}}{\sum \text{Jumlah Pegawai yang dilatih pada tahun n}} \times 100$	Sekretaris DLHK																												
Program Tata Kelola Pemerintahan	5 Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	0	0	100	100	100	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui jumlah laporan yang telah sesuai dengan Standar Formulasi Perhitungan $\frac{\sum \text{Laporan yang sesuai SAP}}{\sum \text{Laporan}} \times 100$	Sekretaris DLHK																												
1 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu(dok)	16	16	22	21	22	jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	$\sum \text{Dokumen Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan}$	Kassubag PEP DLHK																												
2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten (Dok)	0	0	18	18	18	jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur	$\sum \text{Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur}$	Sub Bag Umpeg DLHK																												
3 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel (dok)	22	22	13	13	13	jumlah Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	$\sum \text{Dokumen laporan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset}$	Sub bag Keu DLHK																												

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			Program Tata Kelola Pemerintahan	3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	0	0	100	100	100	Capaian Dukungan Sarana Prasarana Prasarana Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	$\frac{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran}}{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia}} \times 100$ Sarana Administrasi Perkantoran: ➢ Penyediaan Jasa Surat Menyurat ➢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran ➢ Penyediaan Jasa Kebersihan ➢ Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan ➢ Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran	Sekretaris DLHK, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala UPTD Tahura Banten, Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, Kepala CDK Wilayah PSC, Kepala CDK Wilayah LT
			1 <u>Kegiatan</u> Peningkatan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelnacaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (bln)	0	0	12	12	12	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Σ pelaksanaan Pengelolaan Kerasipan dan Pelayanan Perpustakaan	Sub Bag Umpeg DLHK
			2 <u>Kegiatan</u> Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas dan berdaya guna (keg)	0	0	12	12	12	Jumlah Kegiatan penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Σ Kegiatan Penyediaan Barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Sub Bag Umpeg DLHK
			3 <u>Kegiatan</u> Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (keg)	0	0	11	11	11	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Lab Lingkungan	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	SubBag TU UPTD Lab Lingkungan
			4 <u>Kegiatan</u> Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (keg)	0	0	11	11	11	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Sub Bag TU UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
			5 <u>Kegiatan</u> Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	0	0	11	11	11	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Sub Bag TU CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
			6 <u>Kegiatan</u> Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	0	0	11	11	11	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Sub Bag TU CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			7 Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (Keg)	0	0	11	11	11	Jumlah Kegiatan Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Σ Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Sub Bag TU UPTD TAHURA
			Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 Indeks Kualitas Air (nilai)	51,5	52	52,5	53	53,5	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat (kondisi) kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$ IPj = indeks pencemaran bagi peruntukan j, Ci = konsentrasi parameter kualitas air i, Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j, M = maksimum, R = rerata.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
			Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	2 Indeks Kualitas Udara (nilai)	59	59,2	66,8	68,8	70,8	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat sifat unsur pembentuknya dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$IPU = \frac{IPU_{NO2} + IPU_{SO2}}{2}$ IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2 = Indeks Pencemar NO2 IPSO2 = Indeks Pencemar SO2 IPSO2 = Indeks Pencemar SO2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
			1 Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan (%)	100	100	0	0	0	Terlaksananya Seluruh kegiatan dari 4 Sub Kegiatan	$\frac{\sum \text{Realisasi Sub Kegiatan}}{\sum \text{Keseluruhan sub kegiatan}} \times 100 \%$	

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			1 Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan (dok)	0	0	4	4	4	Jumlah Dokumen pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Σ Dokumen Kegiatan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
			2 Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 (%)	100%	100%	0	0	0	Terlaksananya Seluruh kegiatan dari 3 Sub Kegiatan	$\frac{\Sigma \text{Realisasi Sub Kegiatan}}{\Sigma \text{Keseluruhan sub kegiatan}} \times 100 \%$	
			2 Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3 (dok)	0	0	3	4	4	Jumlah dokumen Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3	Σ Dokumen Kegiatan pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan LB3
			3 Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah (%)	100%	100%	0	0	0	Terlaksananya Seluruh kegiatan dari 5 Sub Kegiatan	$\frac{\Sigma \text{Realisasi Sub Kegiatan}}{\Sigma \text{Keseluruhan sub kegiatan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
			3 Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah (Dok)	0	0	6	6	6	Jumlah Dokumen pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah	Σ Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	3 Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	0	0	16,9	17,6	19	Pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan	$IK = \frac{\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan} + \% IK \text{ Sapras} + \% IK \text{ Barjas} + \% IK \text{ Rakor}}{\text{Total } \% IK} \times 100$	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
			1 Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Prosentase peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan (%)	100	12,4	-	-	-	Terlaksananya Seluruh kegiatan dari 2 Sub Kegiatan	$\frac{\sum \text{Realisasi Sub Kegiatan}}{\sum \text{Keseluruhan sub kegiatan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Mutu UPTD Lab lingkungan
			1 Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	Jumlah parameter akreditasi/Surveilan dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017 (parameter)	0	0	30	35	40	Jumlah parameter akreditasi/Surveilan dalam peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan	$\sum \text{Parameter Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan}$	
			2 Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara (%)	100	11,4	0	0	0	Terlaksananya Seluruh kegiatan dari 2 Sub Kegiatan	$\frac{\sum \text{Realisasi Sub Kegiatan}}{\sum \text{Keseluruhan sub kegiatan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Teknis

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			2 Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu (sampel)	0	0,0	199	284	284	Jumlah sample pemantauan parameter kualitas air dan udara	Σ Sample Kegiatan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	UPTD Lab lingkungan
			3 Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Meningtkanya ketersediaan pengadaan sarana dan prasarana lab Lingkungan Hidup sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017 (pkt)	-	-	-	-	-	Jumlah kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Σ Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup	SubBag TU UPTD Lab
			Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LingkunganHidup	1 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Kelompok/Lembaga)	0	0	68	76	78	Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat <i>ket:</i> <i>kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan kajian dampak dan kapasitas lingkungan hidup serta pengaduan penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan</i>	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
				2 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (%)	0	0	98	98	100	ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Ketaatan = $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang diperiksa} - \text{jumlah pelaku usaha yang melanggar}}{\text{Jumlah yang melanggar}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
			1 Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP .(Dok)	0	0	7	10	10	Jumlah Dokumen perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup	Σ Dokumen Kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB												
					2018	2019	2020	2021	2022															
1	2	3	4	5	6					7	8	9												
		KEHUTANAN	2 Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP (Dok)	0	0	2	2	2	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Σ Dokumen Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum												
			3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP (lembaga)	0	0	34	37	37	Jumlah Lembaga Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Σ Lembaga Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kepala Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup												
			Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1 Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (%)	0	0	10	10	10	Pemanfaatan hutan bagi masyarakat adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.	Perhitungan = $\frac{(25\% \times \text{realisasi pemanfaatan kawasan}) + (50\% \times \text{realisasi hasil hutan kayu}) + (25\% \times \text{realisasi HHBK})}{(\text{baseline pemanfaatan kawasan} + \text{baseline hasil hutan kayu} + \text{baseline HHBK})} \times 100 \%$ <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pemanfaatan</th><th>Baseline</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemanfaatan Kawasan</td><td>Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hasil Hutan Kayu</td><td>Produksi kayu saat ini: 415.000 M³/Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M³/Tahun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)</td><td>Pengembangan komoditas HHBK : Saat ini - Madu - Bambu - Aren - Jamur Tiram</td></tr></table>	No	Jenis Pemanfaatan	Baseline	1.	Pemanfaatan Kawasan	Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha	2.	Hasil Hutan Kayu	Produksi kayu saat ini: 415.000 M³/Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M³/Tahun	3.	Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	Pengembangan komoditas HHBK : Saat ini - Madu - Bambu - Aren - Jamur Tiram	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
			No	Jenis Pemanfaatan	Baseline																			
			1.	Pemanfaatan Kawasan	Saat ini 486 Ha dari luas kawasan hutan 195.000 Ha																			
2.	Hasil Hutan Kayu	Produksi kayu saat ini: 415.000 M³/Tahun dari kebutuhan 1.200.000 M³/Tahun																						
3.	Hasil Hutan Non Kayu (HHBK)	Pengembangan komoditas HHBK : Saat ini - Madu - Bambu - Aren - Jamur Tiram																						
1 Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan (dok)	0	0	4	5	5	Jumlah Dokumen perencanaan dan pemantapan kawasan hutan	Σ Dokumen Kegiatan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan	Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan															
2 Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan (dok)	0	0	2	2	2	jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Σ Dokumen Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan	Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan															

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			3 Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu sesuai pedoman teknis (komoditas)	0	0	4	4	4	Jumlah Komoditas Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Σ Komoditas Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan	Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
			Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (%)	0	0	20	20	20	Persentase DAS dan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) yang di tangani setiap tahun.	Σ Realisasi DAS yang ditangani + Σ Realisasi KEE yang ditangani Σ Target DAS + Σ Target KEE x 100	Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE
			1 Kegiatan Pengelolaan DAS	2 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan (klpk)	0	0	10	10	10	Meningkatnya jumlah kelompok/lembaga yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga Masyarakat Hukum Adat)	
			2 Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu sesuai pedoman teknis (dok)	0	0	4	5	5	Jumlah Dokumen pengelolaan DAS	Σ dokumen Kegiatan Pengelolaan DAS	
				Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestarii (dok)	0	0	7	7	7	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Σ Dokumen Laporan Kegiatan Konservasi SDA dan Ekosistem	Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			3 Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi (kelompok)	0	0	54	64	74	Jumlah Kelompok Penyuluhan Kehutanan	Σ Kelompok Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	Seksi Penyuluhan Kehutanan
			Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha)	0	0	2500	2500	2500	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya	Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Kepala CDK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
			Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk)	0	0	3	3	3	Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan yang memanfaatkan hasil hutan sebanyak 3 kelompok pertahun	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyrakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)	Kepala CDK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
			1 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai SOP (dok)	0	0	8	8	8	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Σ Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9
			2 Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target (Ha)	0	0	2500	2500	2500	Luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Σ luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang dinas LHK Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon
			Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang (Ha)	0	0	2500	2500	2500	Luas lahan kritis yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman (vegetatif) dan kegiatan penunjangnya	Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Kepala CDK Wilayah Lebak dan Tangerang
			Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (klpk)	0	0	3	3	3	Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan yang memanfaatkan hasil hutan sebanyak 3 kelompok pertahun	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun Peningkatan Peran serta masyarakat = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyrakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)	Kepala CDK Wilayah Lebak dan Tangerang
			1 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP (dok)	0	0	8	8	8	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang	Σ Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDH Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
					2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
			2 <u>Kegiatan</u> Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target (ha)	0	0	2500	2500	2.500	Luas Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang	Σ Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	
			Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan										- Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan - Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK Wil Pandeglang, Serang, dan Cilegon , Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDLHK Wil Lebak dan Tangerang, - Seksi Perlindungan dan
			Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan)	Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	-	-	-	-	-	Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial (Ha)	Σ Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan)		
			Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Tersedianya benih/bibit unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (batang)	0	0	180.000	180.000	180.000	Jumlah bibit yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	Jumlah bibit yang terdistribusi	Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	
			1 <u>Kegiatan</u> Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan dan produktif sesuai standar (Batang)	0	0	180.100	180.100	180.100	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan dan produktif	Σ bibit kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	Seksi Perbenihan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	
			2 <u>Kegiatan</u> Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan (dok)	-	-	4	4	4	Tersusunnya laporan Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	Σ dokumen laporan Kegiatan Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Seksi Sertifikasi UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	
			Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (%)	0	0	12,5	12,5	12,5	prosentase kegiatan Pengelolaan Tahura Banten	Rumus Peningkatan Fungsi UPTD TAHURA = <u>Kontribusi Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi</u> + <u>Kontribusi Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan</u> X 100 2 Kegiatan	Kepala UPTD Pengelolaan TAHURA Banten	

[illegible]

NO	OPD	URUSAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II), OUTCOME (ESELON III) DAN OUTPUT (ESELON IV)	TARGET CAPAIAN					DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6					7	8	9



PROVINSI BANTEN
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1.1 Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
5	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	5.1 Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	5.1.1 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas
			5.1.2 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal
			5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES



PROVINSI BANTEN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD

PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

MISI : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
1.1	Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	1.1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.1	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	1.1	Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

MISI : 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
5.1	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	5.1.1	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	5.1	Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	5.1	Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
		5.1.2	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	5.2	Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat	5.2	Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten
				5.3	Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi hutan	5.3	Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan
		5.1.4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	5.4	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	5.4	Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES

MISI : 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5



PROVINSI BANTEN
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	Keterangan
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.1 Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima	3 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	60.0 Nilai	85.0 Nilai	1205.0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup	Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
5.1.1	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	5.1 Mendorong Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	43.67 Nilai	52.79 Nilai	1205.1 5 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 1205.1 6 Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, UPTD Laboratorium Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas,
5.1.2	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	5.2 Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten 5.3 Mendorong Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	30.6 %	33.21 %	2004.1 5 Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan 2004.1 6 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 2004.1 7 Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Kehutanan Kehutanan Kehutanan	Bid Prenc dan Pemnfatan Hutan, Bid Pngelolaan DAS, KSDA dan Eksistm dan Pemberdayaan Masy, BPHW dan BPPTK, Cab Din LHK Wil Lebak dan Tgr, Cab. Din LHK, Pdglng, Srgg, dan Clgn, UPTD Sertifikasi & Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pngelolaan Tahura Bnten Bid Prenc dan Pemnfatan Hutan Bid Pngelolaan DAS, KSDA dan Eksistm dan Pemberdayaan Masy, BPHW dan BPPTK
5.1.4	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	5.4 Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui peningkatan produksi bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim	1 Emisi Rumah Kaca	0.0 %	100.0 %			

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES



PROVINSI BANTEN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
12	20		Lingkungan Hidup				19.759.778.000		16.074.455.000		18.471.500.000		17.795.710.000		17.795.710.000		89.897.153.000	
12	20	01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Indeks Kepuasan 2 Capaian kesesuaian 3 Persentase Sarana 4 Persentase 5 Persentase	2,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2,80 0,00 0,00 0,00 0,00	14.344.602.100	3,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.874.555.000	0,00 100,00 100,00 100,00 100,00	14.641.500.000	0,00 100,00 100,00 100,00 100,00	13.427.810.000	0,00 100,00 100,00 100,00 100,00	13.427.810.000	3,00 100,00 100,00 100,00 100,00		Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT
12	20	15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1 Peningkatan Peran 2 Indeks Kualitas Air 3 Indeks Kualitas Udara 4 Persentase	203,00 51,00 58,80 0,00	52,00 51,50 59,00 0,00	5.415.175.900	60,00 52,00 59,20 0,00	4.199.900.000	0,00 52,50 66,80 16,90	2.680.000.000	0,00 53,00 68,80 17,60	3.436.132.500	0,00 53,50 70,80 19,00	3.436.132.500	112,00 53,50 70,80 19,00	67.716.277.100	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas,Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, UPTD Laboratorium Lingkungan
12	20	16	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 Persentase ketaatan 2 Peningkatan Peran	0,00 203,00	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	98,00 68,00	1.150.000.000	98,00 76,00	931.767.500	100,00 78,00	931.767.500	100,00 222,00	19.167.340.900	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas,
20			Urusan Pilihan															
20	00		Kehutanan				8.440.592.000		8.459.545.000		6.350.000.000		8.797.930.000		8.797.930.000		40.845.997.000	
20	00	15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1 Persentase 2 Luas Lahan kritis yang	38,00 69.466,00	10,00 5.000,00	8.440.592.000	10,00 5.000,00	8.459.545.000	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	0	10,00 10.000,00	3.013.535.000	Bid Prenc dan Pemnfatan Hutan, Bid Pngelolaan DAS, KSDA dan Eksistm dan Pemberdayaan Masy, BPHW dan BPPTK, Cab Din LHK Wil Lebak dan Tgr, Cab. Din LHK, Pdging, Srgg, dan Clgn, UPTD Sertifikasi & Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pngelolaan Tahura Bnten
20	00	16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1 Peningkatan 2 Peningkatan Peran 3 Peningkatan Peran	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0	0,00 0,00 0,00	0	10,00 3,00 3,00	1.300.000.000	10,00 3,00 3,00	1.801.152.000	10,00 3,00 3,00	1.801.152.000	10,00 3,00 3,00	16.900.137.000	Bid Prenc dan Pemnfatan Hutan
20	00	17	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Peningkatan 2 Peningkatan Peran 3 Tersedianya benih 4 Peningkatan fungsi 5 Luas Lahan kritis yang 6 Luas Lahan kritis yang	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	20,00 10,00 180.000,00 12,50 2.500,00 2.500,00	5.050.000.000	20,00 10,00 180.000,00 12,50 2.500,00 2.500,00	6.996.778.000	20,00 10,00 180.000,00 12,50 2.500,00 2.500,00	6.996.778.000	20,00 30,00 540.000,00 37,50 7.500,00 7.500,00	4.902.304.000	Bid Pngelolaan DAS, KSDA dan Eksistm dan Pemberdayaan Masy, BPHW dan BPPTK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES



PROVINSI BANTEN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA SKPD
PERIODE : 2017-2022

SATKER : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan				
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	3 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	1205.01	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	2.5 Skala	2,80		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00		Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter)/(Jml dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun) x 100 %		
					2 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			(Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran)/(Jml Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia) x 100 %
					3 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			(Jml Aparatur yang mendapat sertifikat pada tahun n)/(Jml Aparatur yang mengikuti pelatihan pada tahun n) x 100 %
					4 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			(Jumlah Laporan yang sesuai SAP)/(Jumlah dokumen laporan) x 100 %
					5 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	0 %	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			1205.120501.00.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 dok	17,00	47.564.000,00	17,00	64.000.000,00	8,00	64.000.000,00	8,00	77.250.000,00	8,00	77.250.000,00	58,00	330.064.000,00	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang akuntabel		
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 dok	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00		Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) untuk semester 1 dan 2			
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 dok	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		15,00		Jumlah Dokumen Laporan Pajak yang akuntabel			
			1205.120501.00.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 Dokumen	3,00	167.200.000,00	3,00	270.000.000,00	3,00	450.000.000,00	3,00	618.000.000,00	3,00	618.000.000,00	15,00	2.123.200.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Program Kegiatan		
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	9,00		9,00		10,00		10,00		10,00		48,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan			
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		20,00		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengendalian			
					4 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	3 Dokumen	0,00		0,00		5,00		4,00		4,00		13,00		jumlah dokumen data dan informasi pembangunan			
					5 Penyusunan Renstra DLHK	1 Dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		1,00		Jumlah Dokumen Renstra DLHK			
			1205.120501.00.01.003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 paket	1,00	224.300.000,00	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	374.300.000,00				
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00	2.119.315.000,00	12,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3.119.315.000,00		
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan	12 bulan	12,00	5.738.080.000,00	12,00	6.052.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11.790.535.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.006	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	173 aparatur	173,00	130.000.000,00	173,00	113.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	529.000.000,00	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten	
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	173 aparatur	173,00		173,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
					3 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00		0,00		15,00		15,00		15,00		15,00		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang efektif dan efisien	
					4 Peningkatan Kompetensi Aparatur	0 dokumen	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur	
			1205.120501.00.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	12 bulan	12,00	1.486.768.100,00	12,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.686.768.100,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	1 Pengelolaan Kearsipan Dinas	0 bulan	12,00	43.650.000,00	12,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00	12,00	226.650.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
					2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas	0 bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD	0 Bulan	0,00		0,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
			1205.120501.00.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	0 Tersedianya Data Pembangunan Sektoral	3 dok	5,00	236.450.000,00	5,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	416.450.000,00		
					1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					3 Pengelolaan PPID	1 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					4 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.010	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 paket	1,00	27.000.000,00	1,00	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	927.000.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	390.000.000,00	12,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	890.000.000,00		
			1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium		0 Unit	52,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52,00				
			1205.120501.00.01.012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	459.300.000,00	12,00	354.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	813.600.000,00		
			1 Operasional Perkantoran		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Penyediaan Barang Habis Pakai		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			3 Penyediaan Bahan Cetak		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			6 Penyediaan BBM		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.013	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan	12 bulan	12,00	125.860.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	145.860.000,00		
			1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.014	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	1 paket	1,00	322.750.000,00	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	372.750.000,00		
			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00				
			2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor		0 Paket	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
			1205.120501.00.01.015	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	250.075.000,00	12,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	370.075.000,00		
			1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	287.512.000,00	12,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	487.512.000,00		
					1 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Operasional kantor tidak tetap	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					8 Penyediaan BBM	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.017	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan	12 bulan	12,00	90.000.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	110.000.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.018	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 paket	1,00	350.000.000,00	1,00	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	457.700.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.019	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 bulan	12,00	200.000.000,00	12,00	110.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	310.100.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 bulan	12,00	297.400.000,00	12,00	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	757.400.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.021	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	12 bulan	12,00	43.900.000,00	12,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	98.900.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.022	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 paket	1,00	200.000.000,00	1,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	270.000.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			1205.120501.00.01.023	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada BPHW-PSC	0 bulan	12,00	140.000.000,00	12,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	270.000.000,00		
					1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran padaBPHW-PSC	0 bulan	12,00	314.200.000,00	12,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	539.200.000,00		
					1 Operasional kantor Tidak tetap	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					7 Penyediaan BBM	0 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.025	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	12 bulan	12,00	100.000.000,00	12,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	145.000.000,00		
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00			
			1205.120501.00.01.026	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	1 paket	1,00	41.450.000,00	1,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	176.450.000,00		
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Paket	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.01.027	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	12 bulan	12,00	180.000.000,00	12,00	155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	335.000.000,00		
			1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 bulan	12,00	247.368.000,00	12,00	138.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	385.368.000,00		
			1 Operasional kantor Tidak Tetap		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Penyediaan Barang Habis Pakai		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			3 Penyediaan Bahan Cetak		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			5 Penyediaan Promosi dan Publikasi		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			7 Penyediaan BBM		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.029	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	12 bulan	12,00	84.460.000,00	12,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	104.460.000,00		
			1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		12 Bulan	12,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
			1205.120501.00.01.046	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8.064.620.000,00	7,00	7.943.060.000,00	7,00	7.943.060.000,00	7,00	23.950.740.000,00	Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah Kegiatan penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
			2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		1 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
			3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		
			4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		jumlah kegiatan Perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah		
			1205.120501.00.01.047	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Laboratorium Lingkungan	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.759.495.000,00	5,00	927.000.000,00	5,00	927.000.000,00	5,00	3.613.495.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah Kegiatan Penyediaan barang dan jasa Perkantoran pada UPTD Lab Lingkungan
			2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor pada UPTD Lab Lingkungan		
			3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan		
			4 Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan		0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumah kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.01.048	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	835.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	2.689.000.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	terlaksananya penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			jumlah kegiatan Pengadaan Prasarana dan sarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
					4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Lebak dan Tangerang
			1205.120501.00.01.049	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.769.650.000,00	11,00	927.000.000,00	11,00	927.000.000,00	11,00	3.623.650.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah kegiatan Pengadaaan Sarana Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
					4 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada CDLHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
			1205.120501.00.01.050	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.098.735.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	2.952.735.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantorpada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan sarana prasarana kantor pada UPTD Sertifikasi dan Perenihan Tanaman Hutan
					4 Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			jumlah kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
			1205.120501.00.01.051	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	470.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	927.000.000,00	6,00	2.324.000.000,00	Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna	Jumlah kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
					2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Jumlah kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
					4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerahpada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	0 kegiatan	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1205.15	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203 Kelompok	52,00		60,00		0,00		0,00		0,00		112,00		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan pelayanan laboratorium Lingkungan	
					2 Indeks Kualitas Air	51 Nilai	51,50		52,00		52,50		53,00		53,50		53,50			Akar {(Ci/Lij)m2 + (Ci/Lij)R2/2}
					3 Indeks Kualitas Udara	58.8 Nilai	59,00		59,20		66,80		68,80		70,80		70,80			(IPU_NO2+ IPU_SO2)/2
					4 Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan	0 %	0,00		0,00		16,90		17,60		19,00		19,00			(% IK Peningkatan Kompete+% IK Pelayanan+% IK Sapras+% IK Barjas+% IK Rakor)/(Total % IK) x 100
			1205.120501.00.15.001	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	1 Inventarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di Kab/Kota	0 Dokumen	1,00	1.212.092.800,00	0,00	503.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	1,00	3.215.092.800,00	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan	
					2 Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Penyusunan Status Mutu Air dan Indeks Kualitas Air (5 sungai)	0 Dokumen	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					4 Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air Sungai	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Pemantauan Kualitas Air Laut	0 Lokasi	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri	0 Peserta	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					7 Penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	0 Lokasi	0,00		17,00		0,00		0,00		0,00		17,00			
					9 pemantauan kualitas udara ambien	22 Lokasi	22,00		22,00		0,00		0,00		0,00		22,00			
					10 penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan	0 Dokumen	3,00		1,00		1,00		1,00		1,00		7,00			Jumlah dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan
					11 Pengendalian pencemaran dan kerusakan terhadap pelaku usaha kegiatan	40 industri	40,00		120,00		0,00		0,00		0,00		160,00			
					12 pemantauan kualitas Air dan kerusakan situ/danau	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen pematauauan kualitas air dan kerusakan situ/danau
					13 pemantauan kualitas udara ambien	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen pemantauan kualitas udara ambien

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			1205.120501.00.15.002	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1 Penetapan Kebijakan dan Strategis Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah	0 Dokumen	1,00	746.000.000,00	0,00	1.154.000.000,00	0,00	1.180.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1,00	6.080.000.000,00	Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3	
					2 Fasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 pembinaan teknis pengelolaan limbah B3	0 Peserta	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah, Pemanfaatan Limbah B3	0 Industri	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					6 Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (Insdutri, fasyankes dan hotel)	0 Penghasil Limbah B3	75,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75,00			
					7 Pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah	0 Penghasil Limbah B3	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Penyusunan dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	0 Dokumen	0,00		1,00		1,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah dokumen perencanaan penanganan sampah dan limbah B3	
					9 Pengelolaan sampah	2 Lembaga	1,00		8,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
					10 Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	40 Industri	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					11 Pengelolaan sampah	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan pembinaan dan pengelolaan sampah	
					12 Pemantauan dan Evaluasi pengelola limbah B3	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan industri pengelola limbah B3 yang dipantau dan dievaluasi, 1 dokumen per tahun	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.15.003	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1 Penyusunan profil kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	0 Dokumen	1,00	1.239.000.000,00	0,00	480.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	686.132.500,00	0,00	686.132.500,00	1,00	3.591.265.000,00	Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP	
					2 Pemantauan dan pengawasan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang/pasca tambang	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Sosialisasi terpadu kampung iklim	0 Kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Kegiatan Rapat koordinasi kelompok kerja mangrove daerah (MKKD) Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Studi kelayakan pembentukan kawasan mangrove center	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Rapat koordinasi program pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut wilayah provinsi banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	0 Dokumen	8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					8 Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati	0 Dokumen	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					9 Pengembangan Mangrove provinsi Banten	0 Dokumen	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00			Jumlah Dokumen Pengembangan mangrove provinsi Banten
					10 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati	0 Dok	0,00		8,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					11 Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari	0 Lokasi	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					12 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (kampung iklim)	16 Kampung	32,00		16,00		0,00		0,00		0,00		48,00			
					13 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	1 Laporan	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					14 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Secara Lestari	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan pengawasan Pelaksanaan konservasi dan pengawasan pemanfaatan SDA secara lestari
					15 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00			Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kampung iklim danlaporan pemantauan pengawasan Bahan Perusak Ozon (BPO)
					16 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen Laporan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK Sektor Limbah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			1205.120501.00.15.004	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	0 Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP	100 %	100,00	530.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	860.000.000,00		
					1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					2 Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasita Tantra)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	8 dok	0,00		7,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					10 Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	130 orang	0,00		130,00		0,00		0,00		0,00		130,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			1205.120501.00.15.005	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	0 Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP	100 %	100,00	458.640.000,00	100,00	355.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	813.640.000,00			
					1 Pembinaan Teknis Penataan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten	0 Usaha/ Kegiatan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00				
					2 Rapat koordinasi dan evaluasi program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan se provinsi banten	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00				
					3 Peningkatan kinerja tim penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan provinsi banten	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00				
					4 Rapat evaluasi dan monitoring penanganan kasus - kasus lingkungan hidup dan kehutanan	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					5 Pemantauan implementasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Provinsi Banten	0 Industri	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00				
					6 Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 kasus/%	20,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00				
					7 Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200 Industri	165,00		100,00		0,00		0,00		0,00		310,00				
					9 Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	0 Industri	165,00		44,00		0,00		0,00		0,00		105,00				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			1205.120501.00.15.006	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	0 meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP	100 %	100,00	348.310.000,00	100,00	420.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	768.310.000,00			
					1 Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	0 Sekolah	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					2 BinteK Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional dan Mandiri	0 Orang	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					3 Verifikasi dan penilaian Green School	0 Sekolah	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					4 Pemantauan Adipura	0 Kab/Kota	7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7,00				
					5 Pemberdayaan masyrakat hukum adat di Provinsi Banten	0 Kelompok	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00				
					6 Pembinaan Saka Wana Bhakti	0 satuan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					7 Pembinaan Saka Kalpataru	0 satuan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					8 Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	188 Sekolah	25,00		25,00		0,00		0,00		0,00		50,00				
					9 Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	7 Kota	7,00		7,00		0,00		0,00		0,00		7,00				
					10 Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	5 Kelompok/ Saka	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00				
			1205.120501.00.15.007	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	1 Bimbingan Teknis K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)	0 org	25,00	301.310.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	25,00	1.576.310.000,00	Prosentase peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO/IEC 17025 Tahun 2017		
					2 Pelatihan Berbayar	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					3 Bimbingan Teknis ISO 17025	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					4 Bimbingan Teknis Parameter BOD	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					5 Uji Profesional	0 org	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00				
					6 Akreditasi/Audit eksternal	0 Dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00				
					7 Bimbingan Teknis Parameter COD	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					8 Bimbingan Teknis Parameter Pestisida	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					9 Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Laboratorium	0 org	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00				
					10 Akreditasi/Survailan	0 parameter	0,00		25,00		30,00		35,00		40,00		40,00				
					11 Jaminan mutu laboratorium lingkungan	0 org	0,00		150,00		0,00		0,00		0,00		150,00				Jumlah Parameter Akreditasi/Survailan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			1205.120501.00.15.008	Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	1 Rapat Teknis Analisa dan Pengolahan Data Hasil Pengukuran	0 1 kali	1,00	579.823.100,00	0,00	682.900.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	1,00	2.262.723.100,00	Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu		
					2 Kalibrasi Alat Ukur dan Instrumen Laboratorium	0 jenis	34,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,00				
					3 Pengolahan Limbah Laboratorium	0 bulan	12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,00				
					4 Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal	0 sample	144,00		174,00		174,00		234,00		234,00		234,00		234,00		Jumlah Pengambilan sampel, pengujian dan Analisa Sampel Internal
					5 Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal	50 industri	50,00		50,00		0,00		0,00		0,00		100,00				
					6 Pelayanan Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal	0 Sample	0,00		0,00		25,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Jumlah Pengambilan Sample dalam pelayanan pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan eksternal
			1205.120501.00.15.014	DAK Lingkungan Hidup	0 Meningkatnya ketersediaan pengadaan sarana dan prasarana lab Lingkungan Hidup sesuai dengan ISO 17025.2 Tahun 2017	0 paket	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00			
					1 Pengadaan sarana prsarana lab lingkungan	0 paket	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00				
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1205.16	Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	0 %	0,00		0,00		98,00		98,00		100,00		100,00		MMeningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaku usaha yang diperiksa / jumlah pelaku usaha yang melanggar Jumlah yang melanggar x 100 %	
					2 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	203 Kelompok	0,00		0,00		68,00		76,00		78,00		222,00			Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat	
			1205.120501.00.16.001	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	1 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	350.000.000,00	8,00	300.000.000,00	8,00	300.000.000,00	21,00	950.000.000,00	Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP	Jumlah Dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan	
					2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun dan divalidasi	
					3 Tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan	
			1205.120501.00.16.002	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	1 Penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	400.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	3,00	1.000.000.000,00	Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup Sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan penanganan kasus-kasus akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan	
					2 Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00			Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	
			1205.120501.00.16.003	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	1 Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	400.000.000,00	25,00	331.767.500,00	25,00	331.767.500,00	75,00	1.063.535.000,00	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP	Jumlah Lembaga/Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dibina	
					2 Penilaian Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten	0 Lembaga	0,00		0,00		7,00		7,00		7,00		7,00			Jumlah lembaga/Kota berwawasan lingkungan di Provinsi Banten yang dibina dan dinilai	
					3 Pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	5 Lembaga	0,00		0,00		2,00		5,00		5,00		5,00			jumlah Lembaga pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.15	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1 Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat	38 %	10,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					2 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi	69466 Ha	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00			
			2004.120501.00.15.001	Perencanaan dan penatagunaan hutan	0 Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan	100 %	100,00	290.000.000,00	100,00	415.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	705.000.000,00		
					1 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					2 Penyusunan Statistik Kehutanan	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	1 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	0 Dokumen	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					6 Perencanaan hutan	2 Dokumen	1,00		6,00		0,00		0,00		0,00		7,00			
					7 Pemantapan kawasan hutan	6 KPH	0,00		6,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			2004.120501.00.15.002	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	0 Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan	100 %	100,00	339.020.000,00	100,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	789.020.000,00		
					1 Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU	0 Kelompok	21,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21,00			
					2 Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Unit - unit Manajemen Hutan Rakyat (FMU)	0 Dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara manual dan online	0 Industri	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					4 Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan Iuran Kehutanan (WASGANISDAN GANIS PHPL)	0 Industri	90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90,00			
					5 Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	15 Kelompok	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Penatausahaan hasil hutan	180 Industri	180,00		180,00		0,00		0,00		0,00		180,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.003	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	0 Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	100 %	100,00	507.840.500,00	100,00	606.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.114.090.500,00		
					1 Pameran Indogreen Forestry Expo	1 Komoditas	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00			
					2 Pameran Banten Expo	1 Komoditas	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00			
					3 Pelatihan Pengolahan Gura Aren Menjadi Gula Semut	0 Orang	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00			
					4 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	0 Orang	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					5 Pelatihan Budidaya Lebah Madu	0 Orang	20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Pengembangan aneka usaha kehutanan	36 Komoditas	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00			
					7 Pengembangan kawasan bambu terpadu	0 Dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Promosi aneka usaha kehutanan	2 Event	0,00		3,00		0,00		0,00		0,00		3,00			
			2004.120501.00.15.004	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Terlaksananya pengelolaan DAS	100 %	100,00	784.100.000,00	100,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.384.100.000,00		
					1 perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	3 dok	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
					2 Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon	0 Ha	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00			
					3 Rehabilitasi wilayah Daerah aliran Sungai (DAS)	0 DAS	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					4 Penghijauan lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3000 batang	3.000,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00			
					5 Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)	0 dok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					6 Pembinaan Forum DAS	5 forum	5,00		6,00		0,00		0,00		0,00		6,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.15.005	Konservasi SDA dan Ekosistem	0 Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari	100 %	100,00	318.015.500,00	100,00	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	693.015.500,00		
					1 Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata Alam di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	0 angkatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Pembentukan Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satwa Liar di Provinsi Banten	0 unit	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Evaluasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 angkatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Sosialisasi Mitigasi Bencana di Sekitar Kawasan Hutan	0 angkatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					5 Pemulihan kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi	0 unit	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Pengendalian Penangkar tumbuhan dan satwa liar'	50 org	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					7 Penanganan daerah penyangga kawasan konservasi	10 Kelompok	4,00		6,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					8 Pemberdayaan Lembaga konservasi	0 lembaga	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					9 Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi dan ekosistem esensial	0 dok	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					10 Perencanaan dan pembentukan taman kehati banten	0 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					11 Perencanaan pembentukan lembaga konservasi Ex Situ	0 dok	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.006	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan.	100 %	100,00	454.000.000,00	100,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	904.000.000,00		
					1 Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	0 Orang	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					2 Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	0 KTH	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					3 Lomba Wana Lestari	0 Event	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Lingkungan	0 KTH	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	0 orang	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					6 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	35 orang	0,00		56,00		0,00		0,00		0,00		56,00			
					7 Peningkatan peran serta dan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan	34 Kelompok	0,00		56,00		0,00		0,00		0,00		56,00			
					8 Peningkatan peran serta kader konservasi dan pecinta alam	0 orang	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		100,00			
					9 Pengembangan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan	34 Kelompok	0,00		43,00		0,00		0,00		0,00		43,00			
					10 Penyusunan data dan informasi kelembagaan kelompok tani hutan	1 dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			2004.120501.00.15.007	Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Pandeglang	100 %	100,00	620.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	620.700.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)	0 Unit	8,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00			
					3 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		1.250,00		0,00		0,00		0,00		1.250,00			
					5 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	0 Kelompok	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
					6 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	32 Industri	0,00		32,00		0,00		0,00		0,00		32,00			
					7 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	0 Penagkar/ Pengedar	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.008	Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Serang dan Cilegon	100 %	100,00	532.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	532.800.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	0 Batang	1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00			
					3 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)	0 Unit	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					4 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00			
					5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		750,00		0,00		0,00		0,00		750,00			
					6 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan	5 Kelompok	0,00		9,00		0,00		0,00		0,00		9,00			
					7 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	0,00		81,00		0,00		0,00		0,00		81,00			
					8 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	5 Penagkar/ Pengedar	0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
			2004.120501.00.15.009	Pengelolaan Hutan wilayah Lebak	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Lebak	100 %	100,00	826.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	826.000.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)	0 Unit	10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00			
					3 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					4 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		1.950,00		0,00		0,00		0,00		1.950,00			
					5 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Kelompok	0,00		21,00		0,00		0,00		0,00		21,00			
					6 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	20 Industri	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			
			2004.120501.00.15.010	Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang	0 Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Tangerang	100 %	100,00	376.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	376.000.000,00			
					1 Hutan Rakyat Pengkayaan	0 Hektar	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					2 Penghijauan Lingkungan (MPTS)	0 Batang	7.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.000,00			
					3 Pembuatan Sumur Resapan	0 Unit	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					4 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	0 Perusahaan	40,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40,00			
					5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	0 Hektar	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					6 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu	60 Industri	0,00		82,00		0,00		0,00		0,00		82,00			
					7 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	0 Penagkar/ Pengedar	0,00		20,00		0,00		0,00		0,00		20,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.15.011	Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	0 Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar	0 %	100,00	466.000.000,00	100,00	503.750.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	969.750.000,00		
					1 Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS	145000 batang	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		1.000.000,00			
					2 Penelusuran sumber benih unggul	0 Lokasi	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					3 Bimbingan teknis pengelolaan perbenihan tanaman hutan dan MPTS	0 orang	80,00		80,00		40,00		60,00		60,00		330,00			
					4 Identifikasi dan pengembangan tanaman hutan endemik Banten	0 Jenis	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					5 Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul	0 Unit	3,00		3,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					6 Monitoring dan Evaluasi penyalur bibit tanaman kehutanan dan MPTS	0 Kab/ Kota	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00			
			2004.120501.00.15.012	Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan	0 Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	100 %	100,00	82.150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82.150.000,00		
					1 Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan	0 Orang	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					2 Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan	0 Unit	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					3 Pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang)	11 Orang/ Pengelola	26,00		30,00		0,00		0,00		0,00		56,00			
					4 Pengawasan benih tanaman hutan	0 benih	4,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					5 Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Batang	500,00		10.500,00		0,00		0,00		0,00		11.000,00			
			2004.120501.00.15.013	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0 Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	100 %	100,00	320.000.000,00	100,00	271.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	591.000.000,00		
					1 Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	1595.9 Ha	1.595,90		1.595,90		0,00		0,00		0,00		1.595,90			
					2 Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	200 Hektar	32,00		32,00		0,00		0,00		0,00		32,00			
					3 Penyediaan koleksi species lokal/ endemik/ langka/ terancam punah	0 Species	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.15.014	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	0 Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP	100 %	100,00	211.966.000,00	100,00	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	472.966.000,00		
					1 Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna	0 dokumen	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2 Penataan Batas Lapang	0 blok	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					3 Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi	0 dokumen	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4 Peningkatan Pengelolaan Objek Wisata dan Pengunjung	0 kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					5 Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar	0 kegiatan	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat	0 kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					7 Rintisan dan Peningkatan Kolaborasi/Kerjasama Kegiatan	0 kegiatan	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					8 Peningkatan Kunjungan TAHURA Banten	26000 orang	0,00		39.500,00		0,00		0,00		0,00		39.500,00			
					9 Sarana dan Prasarana Fasilitas Pemanfaatan Wisata	2 unit	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
			2004.120501.00.15.015	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)	0 Terlaksananya rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial sesuai dengan tata cara pelaksanaan kegiatan dan target rehabilitasi hutan dan lahan	100 %	100,00	2.312.000.000,00	100,00	1.407.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.545.000,00		
					1 pengembangan hutan rakyat	0 ha	300,00		300,00		0,00		0,00		0,00		600,00			
					2 penghijauan lingkungan (MPTS)	0 batang	10.500,00		10.500,00		0,00		0,00		0,00		21.000,00			
					3 pengembangan komoditas unggulan tanaman kehutanan	0 ha	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00			
					4 Rehabilitasi Lahan Secara Sipil Teknis	0 unit	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00			
			2004.120501.00.15.016	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	0 Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160.000.000,00		
					1 Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan (orang)	0 Orang/ Pengelola	0,00		30,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
					2 Pengawasan benih tanaman hutan	0 lap	0,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00			
					3 Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Batang	0,00		10.500,00		0,00		0,00		0,00		10.500,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			2004.120501.00.15.017	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	280.600.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	280.600.000,00		
					1	Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 Dokumen	0,00		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
					2	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0 pelaku usaha	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					3	Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan	0 Industri	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					4	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 Penangkar	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					5	Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 Orang	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
					6	Pengawasan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	0 Orang	0,00		50,00		0,00		0,00		0,00		50,00			
			2004.120501.00.15.018	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai SOP	0 %	0,00	0,00	100,00	225.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	225.000.000,00		
					1	Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 Dokumen	0,00		25,00		0,00		0,00		0,00		25,00			
					2	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	0 pelaku usaha	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
					4	Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			
			2004.120501.00.15.019	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	0	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target	0 %	0,00	0,00	100,00	1.154.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.154.400.000,00		
					1	Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Unit	0,00		16,00		0,00		0,00		0,00		16,00			
					2	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan	0 Kelompok	0,00		4,00		0,00		0,00		0,00		4,00			
					3	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	0 Dokumen	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00		1,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			2004.120501.00.15.020	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target	0 %	0,00	0,00	100,00	1.300.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.300.000.000,00		
					1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar	0,00		23,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00			
					2 Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	5 Kelompok	0,00		2,00		6,00		8,00		11,00		25,00			
					3 Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan	1 Dokumen	0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00			
			2004.120501.00.15.021	Pengelolaan DAS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2004.120501.00.15.022	Penyuluhan Kehutanan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1 Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat	0 %	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Meningkatnya fungsi lahan dan hutan	(25% x realisasi pemanfaatan kasawan)+(50% x realisasi hasil hutan kayu)+(25% x Realisasi HHBK) / (baseline pemanfaatan kawasan + baseline hasil hutan kayu + baseline HHBK) x 100 %
					2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	0 Kelompok	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)
					3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Kelompok	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00			Peningkatan rata rata Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu, kel Perlindungan dan hutan pengamanan hutan)
			2004.120501.00.16.001	Perencanaan dan penatagunaan hutan	1 Perencanaan hutan	2 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300.000.000,00	4,00	400.000.000,00	4,00	400.000.000,00	11,00	1.100.000.000,00	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan	Jumlah dokumen perencanaan hutan (Dok)
					2 Pemantapan kawasan hutan	6 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Kawasan Hutan (dok)	
			2004.120501.00.16.002	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	1 Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	3,00	1.100.000.000,00	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan	Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan usaha hutan rakyat berbasis industri
					2 Penatausahaan hasil hutan	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan industri hasil hutan	
			2004.120501.00.16.003	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	1 Pengembangan dan Promosi aneka usaha kehutanan	0 Komoditas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	300.000.000,00	3,00	441.152.000,00	3,00	441.152.000,00	3,00	1.182.304.000,00	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu	jumlah komoditas usaha kehutanan
					2 Pengembangan kawasan bambu terpadu	0 Komoditas	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		1,00		Jumlah Komoditas Pengembang kawasan bambu terpadu	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2004.120501.00.16.004	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200.000.000,00	3,00	280.000.000,00	3,00	280.000.000,00	9,00	760.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi
					2 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	
					3 Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	
					4 Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	
			2004.120501.00.16.005	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	200.000.000,00	3,00	280.000.000,00	3,00	280.000.000,00	9,00	760.000.000,00	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai SOP	Jumlah Dokumen Laporan pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Tumbuhan dan satwa Liar yang Tidak Dilindungi
					2 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	0 dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	
					3 Penyusunan Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Rancangan Teknis Kegiatan	
					4 Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan Hutan	0 dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan dan Pengamanan hutan	
Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	1 Rasio Cakupan Tutupan Hutan	2004.17	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	1 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)	0 %	0,00		0,00		20,00		20,00		20,00		20,00		Meningkatnya Pendendalian DAS,Konservasi Hutan dan luas lahan kritis yang terehabilitasi serta Peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan	(Jml Realisasi DAS yang ditangani + Jml Realisasi KEE yang ditangani) / (Jumlah Target DAS + Jumlah Target KEE) x 100 %
					2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan	0 Kelompok	0,00		0,00		10,00		10,00		10,00		30,00		Jumlah Kelompok atau Lembaga seperti : - Kelompok Masyarakat - LSM - Lembaga - Masyarakat Hukum Adat	
					3 Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat	0 Batang	0,00		0,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		540.000,00		Jumlah bibit yang terdistribusi	
					4 Peningkatan fungsi UPTD TAHURA	0 %	0,00		0,00		12,50		12,50		12,50		37,50		Kontribusi Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi + Kontribusi Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan X 100 %	
					5 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang	0 Ha	0,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00		Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	
					6 Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	0 Ha	0,00		0,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		7.500,00		Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.17.002	Konservasi SDA dan Ekosistem	1 Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	450.000.000,00	1,00	450.000.000,00	3,00	1.200.000.000,00	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian penangkar tumbuhan dan satwa liar
					2 Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Daerah penyangga kawasan konservasi dan Lembaga Konservasi		
					3 Perencanaan Pengolahan data dan Infomasi kebakaran hutan lahan, Kawasan Konservasi dan ekosistem esensial	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Jumlah Dokumen Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan		
					4 Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembentukan Taman Kehati Banten dan Lembaga Konservasi ex-situ		
			2004.120501.00.17.004	Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan	1 Penyediaan bibit tanaman hutan dan produktif	0 Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	650.000.000,00	180.000,00	800.000.000,00	180.000,00	800.000.000,00	180.000,00	2.250.000.000,00	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan sesuai standar	Jumlah bibit tanaman hutan dan MPTS
					2 Pengembangan Tanaman Hutan dan Produktif	0 Batang	0,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Jumlah tanaman hutan yang dikembangkan		
			2004.120501.00.17.005	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1 Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,90	250.000.000,00	1.595,90	450.000.000,00	1.595,90	450.000.000,00	1.595,90	1.150.000.000,00	Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya	Luas Perlindungan dan pengamanan kawasan TAHURA
					2 Reboisasi dan Rehabilitasi lahan serta pengawetan keanekaragaman hayati	0 Hektar (Ha)	0,00		0,00		12,50		12,50		12,50		37,50	Luasan reboisasi dan rehabilitasi serta pengawetan keanekaragaman hayati		
			2004.120501.00.17.006	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1 Pengembangan Kawasan TAHURA Banten	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300.000.000,00	2,00	550.000.000,00	2,00	550.000.000,00	6,00	1.400.000.000,00	Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP	Pengembangan kawasan tahura
					2 Pemanfaatan Kawasan TAHURA Banten	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Pemanfaatan Kawasan Tahura Banten		
			2004.120501.00.17.007	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	1 Pengendalian pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	1,00	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00	3,00	1.300.000.000,00	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP	Jumlah peserta pembinaan pengada, pengedar benih/bibit tanaman hutan
					2 Pengawasan benih tanaman hutan	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	Laporan Pengawasan benih tanaman hutan		
					3 Sertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	Jumlah Batang yang disertifikasi bibit atau benih tanaman hutan dan MPTS		
					4 Pemeliharaan Alboreteum/ kebun koleksi	0 Dokumen	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	Laporan Alboreteum/ kebun koleksi		
			2004.120501.00.17.008	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.275.000.000,00	2.500,00	1.546.778.000,00	2.500,00	1.546.778.000,00	7.500,00	4.368.556.000,00	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
			2004.120501.00.17.009	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	0 Hektar (Ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.275.000.000,00	2.500,00	1.700.000.000,00	2.500,00	1.700.000.000,00	7.500,00	4.675.000.000,00	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon sesuai Target	Luas Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
			2004.120501.00.17.010	Pengelolaan DAS	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Hutan Lahan dan Monev RHL	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	400.000.000,00	3,00	550.000.000,00	3,00	550.000.000,00	8,00	1.500.000.000,00	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu	Dokumen Perencanaan pengelolaan rehabilitasi hutan lahan dan Monev RHL
					2 Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS	0 Dokumen	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00	Laporan Pengembangan kelembagaan dan peningkatan fungsi DAS		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Sasaran Kinerja Program / Kegiatan	Sasaran Kinerja Sub Kegiatan		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			2004.120501.00.17.011	Penyuluhan Kehutanan	1 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan	0 kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300.000.000,00	2,00	450.000.000,00	2,00	450.000.000,00	2,00	1.200.000.000,00	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan,dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi	Jumlah Kelompok peserta Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan (PNS dan Swadaya)
				2 Pengembangan Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)	0 kelompok	0,00		0,00		50,00		60,00		70,00		70,00		Jumlah Kelompok Kelembagaan data dan informasi dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH)		
				3 Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial	0 kelompok	0,00		0,00		2,00		2,00		2,00		6,00		jumlah kelompok Penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial		

SERANG

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Ir. H. Muhammad Husni Hasan, CES